

EXECUTIVE TRAINING PROGRAM

PARLIAMENTARY GOVERNMENT: TOWARD A MODERN AND DYNAMIC PARLIAMENT IN INDONESIA



2024

EXECUTIVE TRAINING PROGRAM

PARLIAMENTARY GOVERNMENT: TOWARD A MODERN AND DYNAMIC PARLIAMENT IN INDONESIA



2024

Executive Training Program Parliamentary Government: Towards a Modern and Dynamic Parliament in Indonesia

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Koordinator:

Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
Piping Effrianto, SE., M.Si., CFA., QGIA

Penyunting

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Penulis:

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I.
Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak.
Vega Lavlinesia, S.E., M.Ak., QRMA
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos., M.A.
Oki Rusera Azhari Virgian Puswanda, S.Sos.
Mustika Wati, S.Sos., M.Hum.
Pradina Kurnia Sari Hidayah, S.H., M.Tr.AP
Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M.
Hilda Piska Randini, S.I.P., M.A.
Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H., LLM
Fitriyani Lestari, S.E., QGIA
Mutiar Shinta Andini, S.E., M.E.K.K.
Emi Rahmawati, S.H., M.H.
Ratna Tarisa Ekaningtyas, S.I.Kom., M.B.A.
Ghina Dhaifinah, S.H.

Sekretariat:

Warsiti Alfiah, S.IP., DESS
Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Dikeluarkan oleh:

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan dan mempersembahkan buku ini dengan judul Executive Training Program Parliamentary Government: Towards a Modern and Dynamic Parliament in Indonesia. Buku ini hadir sebagai hasil dari komitmen untuk memperkuat kapasitas para Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mewujudkan parlemen yang lebih modern, dinamis, dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya demi kemajuan bangsa.

Sebagai sebuah negara yang terus berkembang, Indonesia membutuhkan lembaga legislatif yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan global yang terus berubah. Dalam konteks ini, pembaruan dan penguatan sistem keparlemenan sangat penting untuk menciptakan parlemen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam memperkuat demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia, serta mendorong terciptanya parlemen yang lebih efisien, efektif, dan berwibawa.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan inspirasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan sistem pemerintahan dan sistem keparlemenan di Indonesia. Semoga upaya kita untuk membangun sebuah parlemen yang lebih modern, dinamis dan sesuai prinsip-prinsip *open parliament* dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	3
A. GAMBARAN UMUM.....	3
B. METODE PEMBELAJARAN	4
C. JADWAL KEGIATAN	5
BAB III SUBSTANSI PEMBELAJARAN	50
A. PUBLIC RELATIONS.....	50
1. Public Relation di Parlemen Australia.....	50
2. Hubungan Masyarakat (Humas) di Parlemen Indonesia	51
3. Best Practices	55
4. Usulan rekomendasi	57
B. FRAUD	58
1. Kondisi Pencegahan dan Pendeteksian <i>Fraud</i> di Australia	58
2. Kondisi Pencegahan dan Pendeteksian <i>Fraud</i> di Indonesia.....	62
3. Best Practices	63
4. Usulan rekomendasi	64
C. BUDGETING.....	65
1. Sistem Budgeting di Parlemen Australia.....	65
2. Sistem Budgeting di Parlemen Indonesia	67
3. Best Practices	68
4. Usulan Rekomendasi.....	68
D. PERSIDANGAN.....	69
1. Sistem Persidangan di Parlemen Australia	69
2. Sistem Persidangan di Parlemen Indonesia.....	71
3. Best Practices	75
4. Rekomendasi.....	77
E. RISALAH.....	78
1. Praktik Penyelenggaraan Risalah Di Parlemen Victoria	78

2.	Praktik Penyelenggaraan Risalah Di Parlemen Indonesia.....	82
3.	Best Practices	86
4.	Usulan Rekomendasi.....	88
F.	ARSIP	88
1.	Sistem Arsip di Parlemen Australia	88
2.	Sistem Arsip di Parlemen Indonesia.....	90
3.	Best Practices	92
4.	Rekomendasi.....	93
G.	MUSEUM.....	96
1.	Museum di Parlemen Australia.....	96
2.	Apa yang terjadi di Indonesia.....	100
3.	Best Practices	102
4.	Usulan rekomendasi	103
H.	PERPUSTAKAAN	104
1.	Perpustakaan Parlemen di Australia & Victoria.....	104
2.	Kondisi Perpustakaan DPR RI	104
3.	Best Practices	105
4.	Usulan Rekomendasi.....	105
	PENUTUP.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal DPR RI, perlu untuk melaksanakan pengembangan kapasitas dalam menghadapi dinamika pemerintahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kami mengikuti program short course di University of Melbourne, Australia, dengan tema "*Executive Training on Parliamentary Government: Towards a Modern and Dynamic Parliament in Indonesia*" yang berlangsung dari tanggal 25 November 2024 hingga 7 Desember 2024. Program ini dirancang khusus dan diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja, yang dipilih melalui proses seleksi yang komprehensif berdasarkan relevansi tema pembelajaran dan potensi kontribusi mereka terhadap pengembangan *supporting system* di DPR RI.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta mengenai praktik terbaik dalam sistem pemerintahan parlementer. Dengan latar belakang Indonesia yang sedang bertransformasi menuju sistem pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, pembelajaran dari negara yang memiliki tradisi parlementer yang kuat seperti Australia sangatlah relevan. Australia dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan ini karena dikenal memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan transparan, serta telah berhasil menerapkan berbagai reformasi yang mendukung fungsi parlemen.

Kerja sama dengan University of Melbourne merupakan langkah strategis yang memberi kami akses ke sumber daya akademik dan pengalaman praktis yang langka. University of Melbourne merupakan salah satu universitas terkemuka di dunia, dikenal atas kualitas akademik dan reputasinya yang luas. Dalam bidang studi pemerintahan dan ilmu sosial, universitas ini secara konsisten menduduki peringkat atas di berbagai pemeringkatan universitas internasional. Dalam QS World University Rankings 2024, University of Melbourne menduduki peringkat ke-13 terbaik di dunia.

Keunggulan *University of Melbourne* dalam bidang studi pemerintahan tidak terlepas dari kualitas fakultas, kurikulum, dan kolaborasi internasional yang dimilikinya. Universitas ini memiliki banyak profesor dan peneliti terkemuka yang aktif dalam publikasi ilmiah serta terlibat dalam konsultasi kebijakan di berbagai negara. Selain itu, program-program yang ditawarkan, termasuk program "*Executive Training on Parliamentary Government*," dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teori, praktik, dan dinamika sistem pemerintahan parlementer.

University of Melbourne memiliki reputasi internasional dalam bidang studi pemerintah dan telah melahirkan banyak pemimpin yang berpengaruh di berbagai sektor. Selain sesi pembelajaran di kampus, program ini juga mencakup site visit ke Parlemen Victoria dan Melbourne Museum, yang memungkinkan peserta melihat secara langsung bagaimana sistem politik dan kebudayaan di Australia. Ini memberikan wawasan praktis yang tidak dapat diperoleh hanya melalui teori di dalam kelas.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Jenderal DPR RI, serta mendorong sistem pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Melalui pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh, kami berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran ini dalam rangka mewujudkan parlemen yang lebih modern dan dinamis.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyelenggaraan program “Executive Training on Parliamentary government: Towards a modern and dynamic Parliament in Indonesia” pada tanggal 25 November 2024 hingga tanggal 7 Desember 2024 di University of Melbourne Australia adalah memberikan kesempatan kepada pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI untuk:

1. menjadi agen perubahan yang berjiwa ASN Ber-Akhlak
2. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan parlemen modern dan prinsip-prinsip *open parliament*
3. memperluas wawasan dan jaringan kerja di luar negeri
4. melakukan pembelajaran tentang sistem keparlemenan dan sistem demokrasi di negara lain

Adapun tujuan dari penyelenggaraan program Executive Training ini adalah

1. Meningkatkan jumlah Smart ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Memenuhi hak pengembangan kompetensi pegawai sebesar 20 JP/tahun
3. Mempererat hubungan bilateral Indonesia – Australia dan meningkatkan kerja sama di bidang *capacity building* untuk pegawai parlemen

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. GAMBARAN UMUM

Rangkaian kunjungan studi yang dilaksanakan pada minggu pertama berfokus pada pemahaman mendalam mengenai sistem parlemen di Australia, khususnya di negara bagian Victoria. Berbagai topik kunci dibahas secara komprehensif, memberikan gambaran yang jelas kepada para peserta mengenai bagaimana parlemen berfungsi di Australia. Kegiatan dimulai dengan sesi pengenalan dan pemberian konteks mengenai peran serta tanggung jawab parlemen. Selanjutnya, dibahas pula permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut dalam menjalankan fungsinya. Untuk memperdalam pemahaman, peserta juga mendapatkan pemaparan tentang sistem parlementer yang diterapkan di negara bagian Victoria. Selain itu, kunjungan langsung ke gedung parlemen Victoria memberikan kesempatan bagi peserta untuk melihat secara langsung bagaimana fungsi komite parlemen dijalankan. Berbagai informasi berharga pun diperoleh melalui interaksi dengan pihak-pihak terkait di dalam gedung parlemen. Rangkaian kegiatan pada minggu pertama ditutup dengan sesi refleksi mengenai pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman kunjungan parlemen Australia, serta perbandingan dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kantor Anggaran Parlemen (PBO) di Australia. Melalui proses ini, peserta dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang berpotensi untuk diadaptasi guna meningkatkan efektivitas lembaga perwakilan rakyat di Indonesia.

Kegiatan pada minggu kedua difokuskan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek administrasi dan pengelolaan parlemen di Australia. Topik-topik yang dibahas mencakup akuntabilitas dan pengawasan keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen rekam, serta diplomasi dan komunikasi parlemen. Sesi mengenai akuntabilitas dan pengawasan keuangan memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan parlemen. Selanjutnya, peserta juga mempelajari bagaimana manajemen sumber daya manusia diterapkan untuk mendukung kinerja parlemen secara optimal. Selain itu, peserta mendapatkan pemaparan mengenai pentingnya manajemen rekam yang efektif dalam menjaga transparansi dan memudahkan akses informasi bagi publik. Tidak kalah penting, diplomasi dan komunikasi parlemen juga dibahas untuk memahami strategi dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan dan menyampaikan pesan secara efektif. Rangkaian kegiatan pada minggu kedua ini diakhiri dengan sesi ringkasan dan kesimpulan, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk merefleksikan pembelajaran yang diperoleh selama dua minggu pelaksanaan kunjungan studi. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang berharga untuk dapat diadaptasi dalam konteks pengelolaan parlemen di Indonesia.

B. METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang digunakan selama kegiatan program ini berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Ceramah Interaktif

Metode pembelajaran ceramah interaktif adalah pendekatan pengajaran yang menggabungkan penyampaian materi secara lisan oleh pengajar dengan partisipasi aktif dari peserta. Tidak seperti metode ceramah konvensional yang bersifat satu arah, ceramah interaktif melibatkan diskusi, tanya jawab, serta berbagai aktivitas yang mendorong keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran.

2. Studi Kasus

Metode pembelajaran studi kasus adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau hipotetis untuk membantu peserta menganalisis, memahami, dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Metode ini menekankan pada pemecahan masalah, berpikir kritis, serta penerapan teori dalam konteks dunia nyata.

3. Experiential Learning

Metode pembelajaran experiential learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung sebagai cara utama untuk memahami dan menginternalisasi pengetahuan. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa peserta belajar lebih efektif ketika mereka mengalami sendiri konsep yang dipelajari, bukan hanya melalui teori atau ceramah.

4. Diskusi

Metode diskusi adalah suatu penyajian bahan materi dengan cara peserta membahas, bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti tentang topik/sesuatu atau untuk mempersiapkan tentang dan menyelesaikan keputusan bersama.

5. Simulasi

Metode pembelajaran simulasi adalah pendekatan pengajaran yang meniru situasi dunia nyata dalam lingkungan yang terkendali, memungkinkan peserta untuk belajar melalui pengalaman langsung. Metode ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengambilan keputusan dengan menghadirkan skenario realistis yang menyerupai kondisi sebenarnya dalam suatu bidang tertentu.

6. Kunjungan Studi

Metode pembelajaran kunjungan studi adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan kunjungan langsung ke lokasi atau institusi tertentu untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang dipelajari. Metode ini memungkinkan peserta untuk mengamati secara langsung bagaimana teori yang dipelajari di kelas diterapkan dalam dunia nyata.

C. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan program ini berlangsung selama 10 hari kerja dari tanggal 25 November 2024 hingga tanggal 6 Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut:

Day	Day & Date	Section Title	Instructor Name
1	Monday, 25 November	Introductions/Scene Setting: How parliaments function in Australia	Dr Michael Breen
2	Tuesday, 26 November	Issues and Challenges for Parliaments	Dr Michael Breen
3	Wednesday, 27 November	The Victorian Parliamentary Systems	Dr Michael Breen
4	Thursday, 28 November	The functions of Parliamentary Committees and a Visit to Victorian Parliament House	Dr Ali Reza
5	Friday, 29 November	Reflections on the Parliamentary Visit and the role of the Parliamentary Budget Office (PBO)	Dr Ali Reza
6	Monday, 2 December	Accountability and Financial Oversight in Parliaments	Dr Steve Perryman
7	Tuesday, 3 December	Human Resource Management	Dr Valerie Sands
8	Wednesday, 4 December	Record Management	Dr Ali Reza
9	Thursday, 5 December	Parliamentary Diplomacy and Communication	Dr Valerie Sands and Dr Steve Perryman
10	Friday, 6 December	Summary and Conclusion	Dr Michael Breen

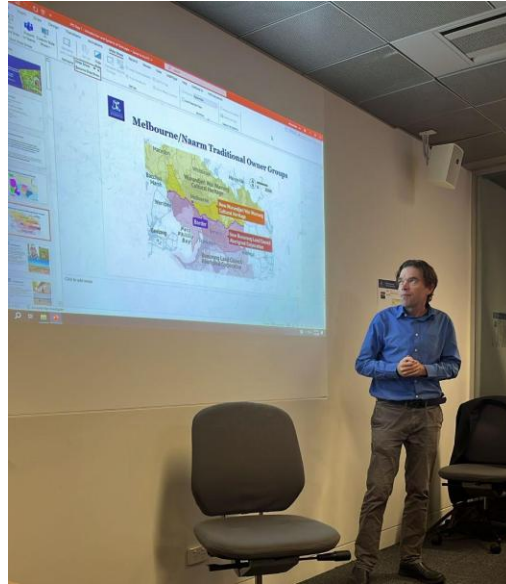
* Sesi pembelajaran berlangsung dari pukul 09.00 hingga 16.00 dan mencakup istirahat makan siang (12.00–13.00) serta istirahat kopi sore (15.00–15.15).

Kegiatan *short course* secara detail dijelaskan sebagai berikut:

1. Hari 1: Senin, 25 November 2024

Topik : Perkenalan dan Agenda Setting: Bagaimana parlemen berfungsi di Australia
Mentor: Dr. Michael Breen (School of Social and Political Sciences, University of Melbourne)

Kegiatan diawali dengan perkenalan Peserta dan Pengajar, serta dilanjutkan dengan pemberian materi. Peserta diajak untuk memahami pengaturan konteks mengenai bagaimana parlemen berfungsi di Australia. Dari pemahaman mengenai sistem pemerintahan Australia, terlihat bahwa federalisme gaya jam pasir memberikan stabilitas dan otonomi bagi pemerintah daerah, yang relevan untuk tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Penekanan pada transparansi sebagai fondasi kepercayaan publik menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam proses legislasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Mengingat tantangan sistem presidensial yang dapat menyebabkan kebuntuan antara eksekutif dan legislatif, penting bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme mediasi dan kerja sama antar-lembaga guna memperlancar proses pengambilan keputusan.



Gambar 2.1. Dr. Michael Breen dalam Sesi Hari 1

Lebih lanjut, integrasi teknologi digital dalam parlemen Australia, seperti penggunaan aplikasi e-petisi dan platform konsultasi publik, menunjukkan potensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelajaran dari Parlemen Victoria tentang penguatan peran komite legislatif melalui staf ahli dan akses data berkualitas juga memberikan inspirasi bagi transformasi parlemen Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, efisiensi legislatif, dan transformasi digital, serta menguatkan budaya etika dan integritas, sistem legislatif Indonesia dapat modernisasi menuju parlemen yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar 2.2. Suasana belajar di kelas dengan pendamping Dr. Valarie Sands

Sesi dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi kelompok terkait tantangan-tantangan yang dihadapi parlemen Indonesia, seperti masalah transparansi, efisiensi legislatif, dan transformasi digital, dengan membandingkan pendekatan parlemen Australia yang telah lebih maju dalam penerapan teknologi dan sistem digital. Presentasi dari peserta diberikan feedback oleh Dr. Breen yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik yang lebih inklusif dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan parlemen sebagai elemen kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Diskusi interaktif dan presentasi pada hari pertama ini terkait berbagai pandangan tentang bagaimana pelajaran dari sistem parlemen Australia dapat diterapkan untuk mendukung transformasi parlemen Indonesia menjadi institusi yang lebih modern, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Rekomendasi yang diberikan menjadi pijakan penting bagi langkah-langkah strategis di hari-hari berikutnya dalam program ini.



Gambar 2.3 Foto bersama peserta dengan Dr. Michael Breen dan Dr. Valarie Sands



Gambar 2.4 Presentasi Kelompok 1



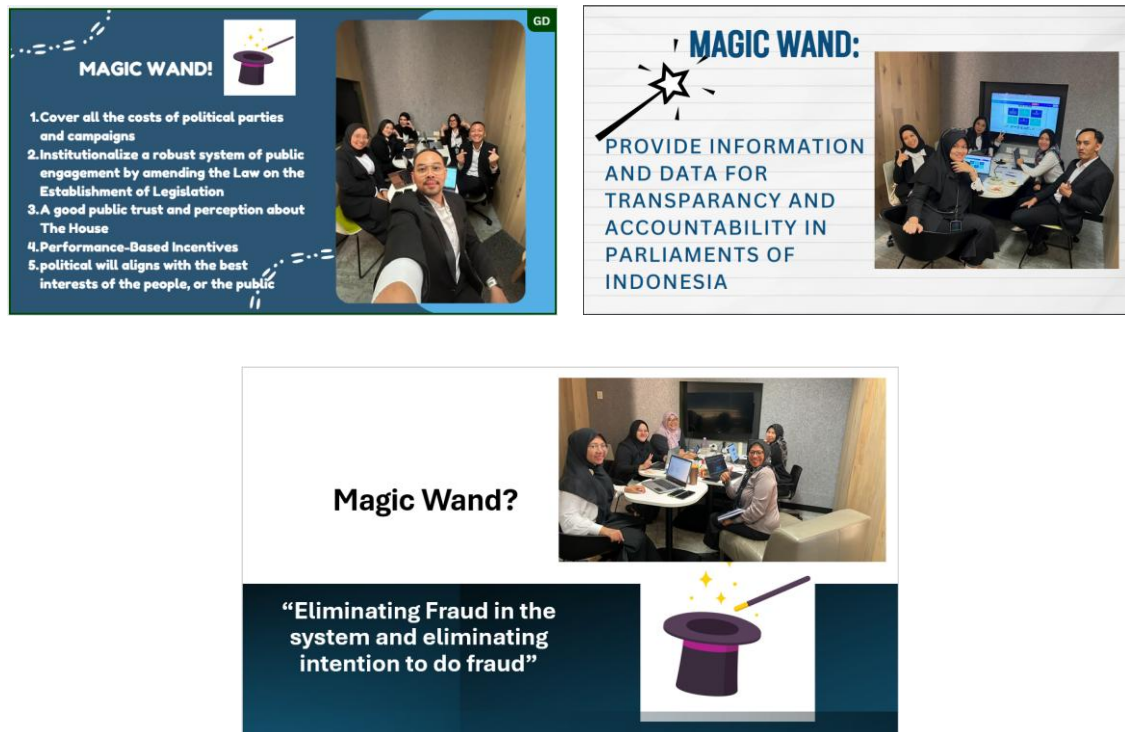
Gambar 2.5 Presentasi Kelompok 2



Gambar 2.6 Presentasi Kelompok 3

Selanjutnya, para Peserta diberikan waktu untuk membuat paparan dan presentasi terkait apa saja permasalahan dan tantangan yang dihadapi DPR RI sebagai parlemen di Indonesia. Dalam presentasi tersebut, para peserta diminta untuk memberikan *magic wand*, yang direpresentasikan sebagai perumpamaan jika memiliki sebuah kekuatan yang

bisa merubah program atau kebijakan yang bisa mengatasi permasalahan atau tantangan dalam parlemen.



Gambar 2.7. Rangkuman Presentasi Kelompok

Sebagai bagian dari sesi ini, Dr. Breen memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:

1. Mengadopsi Teknologi Digital untuk Transparansi dan Partisipasi Publik:
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
3. Membangun Sistem Check and Balance yang Lebih Kuat:
4. Mengintegrasikan Prinsip Federalisme yang Fleksibel:

Kegiatan hari pertama ditutup dengan *Welcoming Dinner* yang diselenggarakan oleh *University of Melbourne* berlokasi di The Woodward, University House. Kegiatan makan malam ini dihadiri oleh para pengajar yakni Dr. Michael Breen, Dr. Valerie Sands, Dr. Steve Perryman dengan mengundang Professor Vedi Hadiz (Director Asia Institute, Professor of Asian Studies-Assistant Deputy Vice-Chancellor International).



Gambar 2.8. Welcome Dinner

2. Hari 2: Selasa, 26 November 2024

Topik : Permasalahan dan Tantangan Parlemen

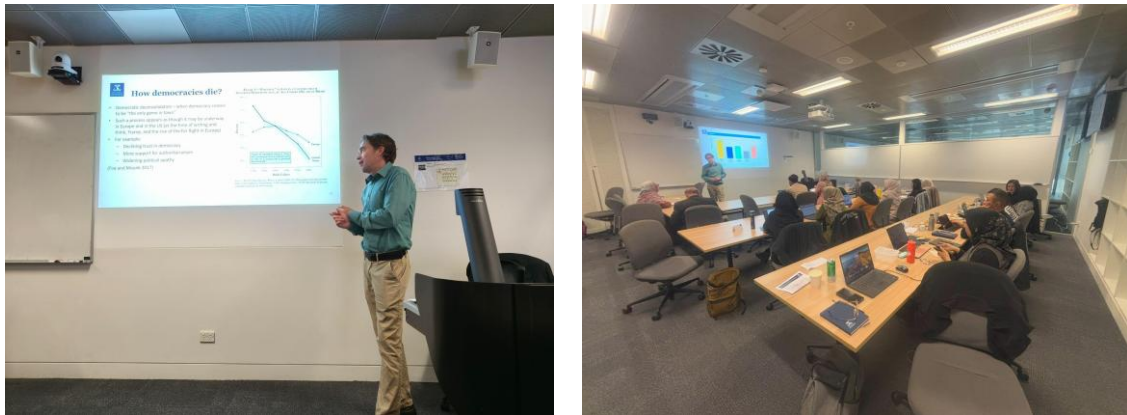
Mentor: Dr. Michael Breen (School of Social and Political Sciences, University of Melbourne)

Pada hari Selasa, 26 November 2024 para Peserta mempelajari permasalahan dan tantangan parlemen dengan pengajar Dr. Michael Breen. Breen menjelaskan bahwa saat ini jumlah negara demokrasi di seluruh dunia telah berkembang pesat dalam 50 tahun terakhir, yaitu dari 35 (tiga puluh lima) pada tahun 1970 menjadi hampir 120 (seratus dua puluh) negara. Akan tetapi, kondisi saat ini menggambarkan kepercayaan terhadap demokrasi yang menurun, hal tersebut memiliki implikasi pada tidak stabilnya kondisi dan berkurangnya dukungan terhadap demokrasi yang sudah mapan dalam suatu negara.

Dr. Breen menjelaskan dalam penelitian yang dilakukannya, beliau menemukan contoh permasalahan terkait sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi di suatu negara, yaitu negara Nepal. Kasus Parlemen Nepal mencerminkan ketidakstabilan politik yang terjadi di negara tersebut akibat persaingan kekuasaan antara berbagai partai politik dan pemimpin. Krisis yang dimulai dengan pembubaran Parlemen oleh Perdana Menteri Oli dan pembatalannya oleh Mahkamah Konstitusi menyoroti tantangan besar dalam implementasi konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi di Nepal. Krisis ini juga menunjukkan ketegangan yang mendalam antara kekuatan eksekutif dan legislatif, serta ketegangan di dalam koalisi pemerintah.

Terkait menurunnya kepercayaan dalam urusan kenegaraan, diperlukan adanya kontrol eksekutif terhadap legislatif sebagai langkah krusial dalam menjunjung tinggi pemisahan kekuasaan sehingga tercipta kondisi *check and balances*. *Check and balances* berfungsi untuk memeriksa dan mengimbangi tindakan lembaga lain agar setiap keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan rakyat. Kemudian, diperlukan pula transparansi yang menjadi prasyarat akuntabilitas

demokrasi karena menyediakan keterbukaan informasi kepada warga negara. Transparansi adalah kunci agar warga negara dapat mengakses informasi mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah, dimana pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka di depan publik. Selanjutnya, agar demokrasi dapat berkelanjutan, harus didukung dengan terbukanya partisipasi setiap warga negara dalam proses politik, tidak adanya diskriminasi terhadap suatu golongan dan pilihan kebijakan yang dapat mewakili kepentingan seluruh warga negara. Demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, lembaga legislatif juga harus mampu mengambil langkah yang dapat menanggulangi kondisi krisis. Seperti halnya disaat terjadi pandemi Covid-19, lembaga legislatif diharapkan dapat menyusun strategi dan bertindak dengan bijak dengan cara melakukan digitalisasi, merevisi kebijakan agar dapat beradaptasi dengan krisis, meningkatkan pengawasan pasca-legislatif, memprioritaskan bisnis terkait penanggulangan krisis serta membentuk satuan unit khusus yang fokus menanggulangi krisis.



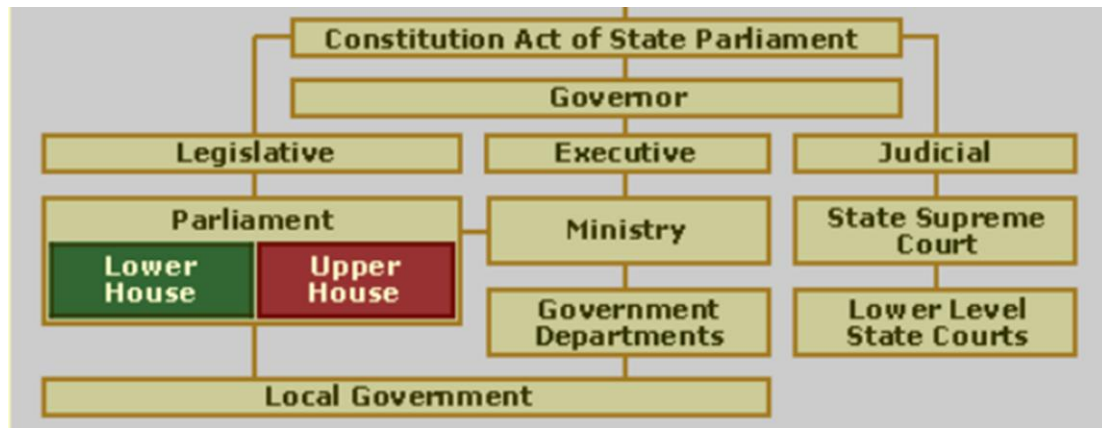
Gambar 2.9. Dr. Michael Breen dalam Sesi Hari 2

3. Hari 3: Rabu, 27 November 2024

Topik : Sistem Parlementer Victoria

Mentor: Dr. Michael Breen (School of Social and Political Sciences, University of Melbourne)

Dr Breen menjelaskan Australia menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang memilih perwakilan mereka untuk duduk di parlemen. Parlemen kemudian membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Parlemen Australia terdiri dari dua kamar yaitu *Upper House* (Senat: Majelis tinggi yang mewakili negara bagian dan wilayah) dan *Lower House* (Dewan Perwakilan Rakyat: Majelis rendah yang mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk).



Gambar 2.10. Sistem Parleментар Australia

Lower House, atau Dewan Perwakilan Rakyat, memainkan peran krusial dalam sistem pemerintahan parlementer. Salah satu fungsi utamanya adalah menentukan pemerintahan, di mana anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk memilih perdana menteri dan mengonfirmasi kabinet yang akan menjalankan pemerintahan. Selain itu, Lower House juga mempertimbangkan, membahas, dan membuat undang-undang baru, yang merupakan salah satu aspek fundamental dari fungsi legislatif. Proses ini melibatkan diskusi yang mendalam dan kolaborasi antar anggota, untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain peran legislasi, Lower House berfungsi untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah dan menjaga eksekutif tetap terkendali. Ini dilakukan melalui sesi **Question Time**, dimana anggota dewan dapat meminta klarifikasi atau pertanggungjawaban dari menteri terkait kebijakan yang diambil. Lower House juga melakukan debat dan voting tentang anggaran, yang merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui kerja di komite, anggota dewan dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap isu-isu tertentu, serta mengangkat masalah ataupun peluang penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga menerima petisi dari masyarakat, memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Semua fungsi ini bertujuan untuk membantu membuat parlemen bekerja lebih baik, memastikan bahwa suara rakyat terwakili dan pemerintahan berjalan dengan efektif dan akuntabel.

Dr Breen menjelaskan bahwa *The Senate (Upper House)* merupakan salah satu majelis tinggi parlemen terkuat di dunia. Kekuasaan yang hampir setara dengan DPR (*Lower House*), kecuali mengenai rancangan undang-undang apropriasi dan pembentukan pemerintahan. Terdiri dari perwakilan masing-masing negara bagian (12) dan teritori (2). Dipilih untuk masa jabatan enam tahun menggunakan sistem pemilihan perwakilan proporsional. Parlemen Australia didukung oleh empat departemen terpisah yaitu Departemen Senat, Departemen Dewan Perwakilan Rakyat, Departemen Pelayanan Parlemen dan Kantor Anggaran Parlemen. Departemen-departemen tersebut dikelola berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Parlemen tahun 1999.

Sebagai parlemen negara bagian, Parlemen Victoria bertanggung jawab atas sektor-sektor seperti kejahatan, sekolah, rumah sakit, layanan darurat, air, angkutan umum dan jalan raya, pertanian. Undang-undang mengenai masalah nasional seperti

pertahanan, imigrasi dan urusan luar negeri merupakan tanggung jawab Parlemen federal. Urusan lokal seperti izin mendirikan bangunan, pengelolaan limbah dan pengendalian hama merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Parlemen Victoria terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Legislatif yang merupakan kelompok terpilih yang terdiri dari 88 anggota, dan Dewan Legislatif yang terdiri dari 40 anggota. Sebagai lembaga legislatif, Parlemen Victoria memiliki peran penting dalam membentuk pemerintahan dari para anggotanya, yang diharapkan dapat mewakili kepentingan dan pendapat masyarakat Victoria di forum publik. Salah satu fungsi utama dari Parlemen Victoria adalah melakukan perdebatan, serta mengesahkan, mengubah, dan mencabut undang-undang yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, mereka juga bertugas untuk memeriksa dan menyetujui pajak serta pengeluaran pemerintah, memastikan bahwa anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Parlemen Victoria juga berfungsi untuk meminta pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya, sehingga menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, Parlemen Victoria berperan sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi yang memastikan suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Sistem parlemen di Victoria memiliki beberapa keunikan menarik dibandingkan dengan sistem parlemen di negara bagian lain di Australia. Meskipun Australia secara umum menganut sistem parlemen, terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerapannya di tingkat negara bagian. Pertama, struktur parlemen Victoria berbeda dengan struktur parlemen federal Australia. Parlemen Victoria terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Legislatif (*upper house*) dan Dewan Perwakilan Rakyat (*lower house*). Sementara itu, parlemen federal Australia juga bikameral, tetapi dengan komposisi yang berbeda, yaitu Senat (*upper house*) dan Dewan Perwakilan Rakyat (*lower house*). Kedua, sistem pemilihan anggota parlemen di Victoria juga berbeda. Anggota Dewan Legislatif Victoria dipilih melalui sistem pemungutan suara preferensial, yang memungkinkan pemilih untuk mengurutkan pilihan mereka. Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Victoria dipilih melalui sistem pemungutan suara sederhana (*first-past-the-post*). Ini berbeda dengan sistem pemilihan anggota parlemen federal Australia yang juga menggunakan sistem preferensial untuk kedua kamar. Ketiga, peran Perdana Menteri Victoria juga lebih kuat dibandingkan dengan Perdana Menteri federal Australia. Perdana Menteri Victoria dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan meminta pemilihan umum baru, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Perdana Menteri federal. Jadi, meskipun Australia secara umum menganut sistem parlemen, terdapat perbedaan-perbedaan menarik dalam penerapannya di tingkat negara bagian, seperti yang terlihat pada kasus Victoria. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan keunikan dan keragaman sistem pemerintahan di Australia.



Gambar 2.11. Dr. Michael Breen dalam Sesi Hari 3

4. Hari 4: Kamis, 28 November 2024

Topik : Fungsi Komite Parlemen dan Kunjungan ke Gedung Parlemen Victoria

Mentor: Dr. Ali Reza Yunespour (School of Social and Political Sciences at Melbourne University)

Kegiatan pada hari Kamis, 28 November 2024 dibagi ke dalam 2 sesi. Pertama adalah sesi di kelas untuk mendapatkan pembekalan terkait sistem parlemen di Victoria. Sesi kedua adalah site visit ke gedung Victorian Parliament untuk melakukan observasi secara langsung seperti apa kegiatan di Victorian Parliament, termasuk sesi Question Time yang akan digelar pada siang hari.

Sesi pertama diawali dengan penjelasan terkait Komite Parlemen Victoria. Kami mempelajari secara komprehensif mengenai fungsi dan kewenangan Komite Parlemen Victoria, jenis Komite, keanggotaan Komite di *Legislative Assembly (lower house)* dan *Legislative Council (upper house)*, peran sekretariat Komite, dan alur kerja Komite Parlemen Victoria. Selama kelas berlangsung, Kami juga aktif berdiskusi terkait dengan perbedaan peran dan fungsi Komisi di Parlemen Indonesia dengan Komite di Parlemen Victoria serta mekanisme kerja yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Parlemen Indonesia.

Berdasarkan angka 201 Tata Tertib Parlemen Victoria (*Standing Orders*) Parlemen Victoria dapat membentuk komite untuk melakukan investigasi terhadap isu tertentu. Pada awal masa keanggotaan, Parlemen Victoria membentuk 3 (tiga) *Standing Committees* baik pada *Legislative Assembly (lower house)* maupun pada *Legislative Council (upper house)*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komite Ekonomi dan Infrastruktur (melakukan investigasi dan menyusun laporan hasil investigasi serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan; Kementerian Pekerjaan, Kawasan, dan Wilayah; Kementerian Perhubungan; dan Departemen Keuangan dan Perbendaharaan Negara; serta lembaga terkait).
2. Komite Lingkungan dan Perencanaan; (melakukan investigasi dan menyusun laporan hasil investigasi serta berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan, Pertanahan, dan Air, serta lembaga terkait); dan
3. Komite Hukum dan Isu Sosial (melakukan investigasi dan menyusun laporan hasil investigasi serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Sumber Daya

Manusia; Kementerian Hukum dan Keselamatan Komunitas; dan Departemen Perdana Menteri dan Kabinet serta lembaga terkait).

Anggota setiap Komite terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 12 (dua belas) orang Anggota Parlemen Victoria, kecuali ditentukan lain. Daftar keanggotaan pada setiap Komisi harus dipublikasikan dalam *notice paper*. Ketua atau Wakil Ketua Parlemen tidak diperbolehkan menjadi anggota Komite. Setiap Komite dapat membentuk sub-Komite yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komite untuk melakukan investigasi dan melaporkan kepada Komite hasil investigasinya, namun tidak memiliki kewenangan pembuktian.



Gambar 2.12. Dr. Ali dan suasana belajar dalam Sesi Hari 3

Komite Parlemen Victoria tidak memiliki kewenangan untuk mengubah sebuah undang-undang. Akan tetapi, Komite di Parlemen Victoria sering kali mengkaji kemungkinan untuk mengubah materi muatan dalam sebuah undang-undang atau kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi kepada Parlemen Victoria. Komite Parlemen Victoria memiliki delapan peran utama dalam mendukung tata pemerintahan yang lebih baik, yaitu:

1. Berkontribusi dalam proses perumusan dan pengembangan kebijakan pemerintah;
2. Mengumpulkan berbagai macam data dan informasi dari sumber-sumber yang beragam sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan;
3. Menyoroti dan memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu sosial dan politik yang penting bagi masyarakat;
4. Bertindak sebagai penghubung antara lembaga-lembaga pemerintahan untuk menciptakan koordinasi yang lebih efektif;

5. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dengan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang transparan;
6. Mengungkap kelemahan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
7. Menimbulkan efek jera atau rasa takut melalui sidang komite yang terbuka untuk umum, yang dapat menyebabkan rasa malu bagi pihak yang terlibat jika ditemukan kesalahan; dan
8. Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian dan analisis mendalam untuk perbaikan di masa mendatang.

Setiap Komite Parlemen didukung oleh sekretariat yang terdiri dari manajer, staf investigasi, asisten peneliti, dan staf administrasi. Sekretariat Komite bertugas untuk mengumpulkan bukti dan membantu Komite menyusun laporan; dan menyusun draft awal laporan (*chair's draft*) dan mengelola proses hingga laporan akhir disetujui. Dalam hal terdapat anggota Komite tidak menyetujui laporan akhir Komite, anggota tersebut dapat menyusun laporan *dissenting opinion* yang menjelaskan alasan ketidaksetujuan dan laporan ini akan dicantumkan sebagai lampiran dalam laporan akhir yang diterbitkan.

Alur kerja Komite Parlemen Victoria dimulai dengan penyusunan **Term of Reference (ToR)**, yang berfungsi sebagai pedoman dan instruksi untuk mengatur bagaimana komite harus menjalankan investigasi. Setelah ToR disusun, komite melakukan **call for submissions**, di mana publik dan pihak terkait diundang untuk memberikan masukan. Komite juga dapat menghubungi individu atau organisasi yang memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan informasi dan perspektif yang lebih dalam. Selanjutnya, komite melakukan **penelitian**, yang dapat mencakup kunjungan lapangan atau konsultasi dengan wilayah hukum lainnya, agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang sedang ditangani.

Setelah proses penelitian, komite menyelenggarakan **konsultasi publik** untuk menjaring masukan dari berbagai stakeholders, termasuk pandangan akademik dan pengalaman praktis yang relevan. Setelah semua informasi dan masukan terkumpul, komite menyusun **laporan kepada Parlemen Victoria** yang memuat hasil investigasi dan rekomendasi kepada pemerintah. Laporan ini kemudian disampaikan di Parlemen dan dipublikasikan untuk umum, agar transparansi dan akuntabilitas terjaga. Terakhir, **pemerintah diberikan waktu selama enam bulan untuk memberikan tanggapan terhadap laporan** tersebut, termasuk apakah mereka mendukung rekomendasi yang diajukan. Melalui alur kerja ini, Komite Parlemen Victoria berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada penelitian yang mendalam dan masukan dari masyarakat.

Sesi Siang: Kunjungan ke Gedung Parlemen Victoria

Siang harinya, para delegasi mengunjungi Parlemen Victoria di Melbourne. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan langsung tentang proses legislatif dan sejarah negara bagian pentingnya salah satu bangunan publik paling terkemuka di Australia. Kegiatan didampingi 2 (dua) orang pemandu tur, menjelajahi bidang-bidang utama seperti Ruang Utama, Ruang Sidang, Ruang Perpustakaan, Ruang Komite dan menyaksikan secara langsung perdebatan anggota parlemen pada saat Question Time. Selain itu, kunjungan ini memperluas wawasan tentang evolusi badan legislatif Victoria dan perannya dalam membentuk negara bagian pemerintahan. Tur ini juga mengkaji

desain dan simbolisme yang tertanam di dalamnya struktur Gedung Parlemen. Kesempatan yang diberikan untuk mendiskusikan operasi sehari-hari dan tanggung jawab di Parlemen dengan staf parlemen. Jika Parlemen sedang bersidang, delegasi dapat mengamati debat langsung, memberikan paparan langsung terhadap diskusi legislatif dan proses pengambilan keputusan. Kunjungan ini juga mencakup melihat karya seni penting dan artefak bersejarah yang disimpan di Gedung Parlemen, memperkaya apresiasi para delegasi Warisan budaya Victoria.



Gambar 2.13. Kunjungan ke Parlemen Victoria

Selain peserta melakukan tur gedung Parlemen Victoria dan menghadiri Question Time, Peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dengan Sekretariat Parlemen Victoria yakni Ms. Annemarie Burt sebagai Manager of Table Office dan Mr. Liam Moran, Manager of Procedure Office perihal Parliamentary Meetings dan Record Keeping. Di Parlemen Victoria (Australia), Parliamentary Meetings dan Record Keeping merupakan dua fungsi penting dalam mendukung aktivitas legislatif.



Gambar 2.13. Diskusi Parliamentary Meetings dan Record Keeping

Tugas utama terkait Parliamentary Meetings mencakup: (1) pengelolaan jadwal pertemuan parlemen, seperti Memastikan semua sesi legislatif direncanakan dengan baik, termasuk waktu, tempat, dan agenda rapat; (2) menyusun agenda sidang untuk pertemuan parlemen, termasuk debat legislasi, pertanyaan resmi, dan penyampaian laporan; (3) memfasilitasi rapat, seperti menyediakan dukungan logistik dan administratif selama rapat berlangsung, seperti pengaturan ruang sidang, teknologi, dan protokol parlemen; (4) melakukan komunikasi antar anggota untuk memastikan koordinasi antar anggota parlemen dan memberikan informasi terkait jadwal dan proses legislatif; dan (5) memberikan dukungan administratif kepada komite-komite yang melakukan penyelidikan atau konsultasi terkait kebijakan.

Sedangkan Record Keeping mencakup: (1) mencatat jalannya sidang (Hansard) dengan membuat transkrip resmi dari semua diskusi, debat, dan keputusan yang terjadi di parlemen; (2) mengarsipkan dokumen resmi seperti RUU, laporan, keputusan, dan mosi diarsipkan secara terorganisasi untuk keperluan hukum dan publik; (3) melakukan publikasi informasi kepada publik melalui saluran resmi seperti situs web parlemen atau perpustakaan legislatif; (4) memastikan transparansi dengan menjaga agar dokumen-dokumen ini dapat diakses publik sesuai dengan kebijakan keterbukaan pemerintah; (5) melakukan penyimpanan jangka panjang dengan mengelola arsip sejarah parlemen untuk melindungi dokumen penting bagi generasi mendatang.

Setelah mendapat penjelasan mengenai Parliamentary Meetings dan Record Keeping, peserta diterima oleh Anggota Parlemen Victoria, yaitu Mr. Tom McIntosh sebagai Anggota Parlemen Legislative Council (Upper House) dan Mrs. Ella George sebagai Anggota Parlemen Legislative Assembly (Lower House). Kedua Anggota Parlemen tersebut memberikan penjelasan mengenai peran Parliamentary Committees di Parlemen Victoria. Parliamentary Committee memiliki peran penting dalam mendukung fungsi legislatif.



Gambar 2.14. Diskusi Bersama Anggota Parlemen Victoria

Parliamentary Committees memiliki peran penting, yaitu melakukan penyidikan, memberikan rekomendasi dan mengawasi kinerja pemerintah tentang masalah yang berkembang di publik, masalah legislasi dan masalah anggaran. Komite di Parlemen Victoria dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bidang tugas, yakni: Komite Tetap (Standing Committees); Komite Khusus (Select Committees); dan Komite Bersama (Joint Committees).

Oleh karena itu, Parliamentary Committees memainkan peran vital dalam memperkuat sistem demokrasi dengan menyelidiki isu-isu penting, memberikan rekomendasi kebijakan, dan mengawasi kinerja pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 2.15. Foto Bersama Anggota Parlemen Victoria

5. Hari 5: Jumat, 29 November 2024

Topik : Refleksi Kunjungan Parlemen dan peran DPR Kantor Anggaran Parlemen (PBO)
Mentor: Dr. Ali Reza Yunespour (School of Social and Political Sciences at Melbourne University)

Sesi Pagi: Refleksi Kunjungan Parlemen dan Studi Kasus Laporan Komite Parlemen

Pada sesi pagi pelatihan hari ke-5, para peserta berkesempatan memberikan refleksi dan kontemplasi terkait kunjungan ke Parlemen Victoria yang telah dilakukan pada hari sebelumnya. Kunjungan pada hari ke-4 tersebut merupakan pengalaman yang berharga dengan memberikan gambaran praktis tentang bagaimana sistem parlementer Victoria berjalan dalam kerangka demokrasi yang kuat. Mengamati proses secara langsung memberikan wawasan tentang fungsi praktis tugas legislatif, pengambilan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas.

Beberapa hal yang menjadi poin pengamatan para peserta yang disampaikan selama kunjungan itu adalah:

1. Pendekatan proaktif dan egalitarian yang menonjol

Poin ini secara langsung disampaikan anggota parlemen Ella George dengan menegaskan untuk setiap program atau pertemuan yang dibutuhkan oleh konstituennya, Sebagian besar pendekatan yang dilakukan untuk "mengambil bola dan lebih dekat dengan rakyat." Metafora ini dengan tepat menggambarkan bagaimana anggota parlemen Victoria secara aktif terlibat dengan konstituen mereka untuk memahami dan mengatasi kekhawatiran mereka. Salah satu strategi yang paling

menonjol yang dilakukan anggota parlemen Victoria adalah pendekatan egaliter untuk meminimalisasi jarak yang tercipta antara anggota parlemen dan publik.

2. Suasana yang sangat cepat dan dinamis

Question Time di Parlemen Victoria dikenal dengan suasana yang cepat, dinamis, dan penuh energi. Setiap anggota parlemen, baik yang mendukung pemerintahan maupun oposisi, mengajukan pertanyaan yang sering kali bersifat tajam dan kritis. Proses ini berlangsung dalam tempo yang cepat, dengan anggota parlemen seringkali berbicara secara bersamaan dan dalam waktu yang terbatas.

3. Tantangan dan Keterbatasan Waktu dalam Forum Question Time

Karena waktu yang terbatas, anggota parlemen harus menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan langsung ke pokok permasalahan. Demikian juga dengan jawaban yang diberikan oleh anggota eksekutif, yang harus mengelola waktu dengan bijak. Kecepatan ini menuntut proses diskusi yang efektif dan tepat waktu.

4. Petisi dan Forum Terbuka

Parlemen Victoria juga menyediakan saluran bagi perorangan untuk mengajukan petisi atau mendiskusikan isu-isu mereka. Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan petisi langsung kepada Parlemen, yang dapat diterima dan dibahas dalam sesi-sesi tertentu. Ini adalah cara lain bagi individu untuk ikut serta dalam proses demokrasi.

5. Bangunan, Tradisi dan Sejarah yang sangat Kuat

Gedung Parlemen Victoria adalah sebuah simbol sejarah dan warisan budaya Australia. Dibangun pada tahun 1856, gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai saksi bisu perjalanan politik dan sosial negara selama lebih dari satu abad. Keberadaan gedung ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan bentuk aslinya, dengan banyak elemen arsitektur yang masih terjaga hingga kini. Ornamen kecil, mulai dari lantai, meja, hingga gagang pintu, semuanya dirancang dengan detail yang tinggi dan mencantumkan tahun pembuatan, yang memberikan nuansa autentik pada setiap sudut gedung.

Dengan gaya arsitektur yang megah, gedung ini merupakan contoh yang luar biasa dari neo-klasikisme, menampilkan kolom-kolom besar dan ukiran yang indah, yang menggambarkan kekuatan dan keanggunan lembaga legislatif. Gedung Parlemen Victoria bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga merupakan monumen sejarah yang mengisahkan perjalanan demokrasi dan identitas negara Australia. Filosofi utama yang terkandung dalam desainnya adalah semangat demokrasi dan keterbukaan. Pilar-pilar besar di fasad utama merepresentasikan kekuatan prinsip hukum dan keadilan. Aula Besar (*Queen's Hall*) di dalamnya dihiasi dengan patung dan simbol yang mencerminkan sejarah dan perkembangan politik Victoria, termasuk perjuangan menuju pemerintahan mandiri. Kemegahan gedung ini juga mencerminkan optimisme era *Gold Rush* Victoria, ketika kekayaan melimpah dari tambang emas menjadi fondasi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah ini.



Gambar 2.16. Dr. Ali dan suasana belajar dalam Sesi Hari 5

Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman peserta terkait peran komite dan memahami seperti apa tugas fungsi serta produk yang dihasilkan, para peserta pelatihan diberikan penugasan analisis atas:

a. **Laporan Komite Parlemen Hukum dan Sosial Victoria mengenai Analisis Dukungan untuk Warga Lansia Victoria dari Latar Belakang Migran dan Pengungsi**

Topik yang dianalisis adalah kerangka acuan (yaitu, tujuan dan ruang lingkup) laporan komite tersebut. Peserta juga membahas hal yang menjadi temuan utama serta rekomendasi dari laporan tersebut. Laporan komite yang diberikan terdapat dalam tautan

sbb:

https://www.parliament.vic.gov.au/49c30d/contentassets/aad1a69084f34c4a827fa9dbd6d1089d/lalsic-59-04-support-for-older-victorians_migrant-and-refugee-backgrounds.pdf

b. **Tanggapan Pemerintah Victoria atas Laporan Komite Parlemen Hukum dan Sosial**

<https://www.parliament.vic.gov.au/49c30e/contentassets/dc40a004f9ee4f78a6bdb3ee063ed16f/inquiry-into-support-for-older-victorians-from-migrant-and-refugee-backgrounds.pdf>

untuk menemukan dan mempelajari: Apa prioritas utama dalam tanggapan pemerintah Victoria terhadap laporan komite pada bagian sebelumnya.

Diskusi berjalan sangat aktif dan dinamis dengan seluruh kelompok memberikan pandangan dan hasil analisisnya terhadap laporan komite serta tanggapan pemerintah tersebut. Kesimpulan dari analisis kelompok yang telah dilakukan terhadap contoh laporan komite dan respon pemerintah yang diberikan.

Sesi Siang: Pengenalan Parliamentary Budget Office (PBO) dan Studi Kasus

Pada sesi siang pelatihan hari ke-5, para peserta juga berkesempatan mendapatkan pemaparan materi terkait pengenalan institusi *Parliamentary budget office* (PBO) yang berjalan di Australia termasuk di Victoria. PBO adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memberikan analisis dan saran terkait anggaran kepada parlemen. Fungsi utama PBO adalah untuk menghasilkan laporan dan proyeksi yang membantu anggota parlemen dalam memahami dan mengevaluasi implikasi fiskal dari kebijakan yang diusulkan, serta untuk memastikan transparansi dalam proses penganggaran. PBO juga bertugas untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai kondisi ekonomi dan anggaran, sehingga anggota parlemen dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang terpercaya.

Menurut Dr. Ali, PBO memiliki beberapa tujuan penting yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pertama, PBO bertujuan untuk memperkirakan biaya kebijakan dengan memberikan estimasi biaya untuk kebijakan yang diusulkan oleh anggota parlemen, terutama selama periode pemilu. Hal ini memungkinkan anggota parlemen untuk mengevaluasi dampak finansial dari kebijakan yang mereka usulkan sebelum implementasinya.

Kedua, PBO melakukan analisis anggaran dengan menyusun laporan yang mengulas tren fiskal dan ekonomi, termasuk keberlanjutan keuangan pemerintah. Laporan ini memberikan wawasan yang berharga bagi anggota parlemen dalam memahami kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi masa depan. Terakhir, PBO memberikan dukungan untuk anggota parlemen dengan membantu mereka memahami implikasi kebijakan fiskal. Dengan demikian, PBO berperan sebagai sumber informasi yang objektif dan mendalam, yang mendukung proses pembuatan kebijakan yang lebih informatif dan bertanggung jawab.

Setiap analisa yang diminta ke PBO untuk dibuatkan, dihasilkan dalam bentuk laporan yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat pada website <https://pbo.vic.gov.au/>. Data dan informasi yang disediakan merupakan data yang diolah dengan menggunakan asumsi dan tren kondisi dari beragam faktor yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh usulan kebijakan publik yang sedang dikaji. Anggota parlemen (MP) dapat meminta perkiraan biaya kebijakan secara pribadi atau publik. PBO menjaga kerahasiaan permintaan tersebut kecuali pemohon memutuskan untuk mempublikasikannya. Selama periode pemerintahan sementara pemilu, PBO sering menjadi pemain kunci dalam memastikan transparansi dalam perkiraan biaya kebijakan.

Peserta berdiskusi tentang produk layanan PBO Victoria yakni produk ***Pre-Election Policy Costing*** terhadap kebijakan: **Transportasi Umum Gratis untuk Lansia dan Siswa Penuh Waktu.** (Artikel: <https://pbo.vic.gov.au/response/5368>) Pada kegiatan ini, para peserta diminta mendiskusikan dan menganalisis: Untuk partai politik mana yang dikeluarkan pemilu ini? Apakah itu partai politik besar atau kecil di Victoria? Apa yang ditemukan analisis PBO? Mengapa hal ini signifikan menjelang pemilihan negara bagian Victoria tahun 2022? Bagaimana analisis independen seperti studi kasus ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah di Indonesia? Apa saja tantangan untuk mendirikan atau memelihara (jika sudah ada) kantor yang serupa dengan PBO di Indonesia.



Gambar 2.17. Dr. Ali dan suasana belajar dalam Sesi Hari 5 Sesi Siang

Setelah melakukan diskusi kelompok serta melihat kajian dan output yang dihasilkan oleh Victoria PBO Sebagai lembaga yang non-partisan dan independen, para peserta sampai pada kesimpulan bahwa institusi semacam PBO Victoria memainkan peran krusial dalam mendorong transparansi parlemen dan meningkatkan kualitas debat publik. Dengan menyediakan analisis anggaran yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, PBO membantu masyarakat dan anggota Parlemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

6. Hari 6: Senin, 2 Desember 2024

Topik : Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan

Mentor: **Dr Steve Perryman BA., DipEd, BPPM (H1), PhD**

Dr Steve Perryman BA, DipEd., BPPM (H1), PhD menjelaskan dalam konteks manajemen keuangan sektor publik, anggaran (budget) adalah suatu rencana yang terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diperkirakan akan terjadi selama periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Anggaran dalam sektor publik berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Anggaran merupakan dokumen politik karena mencerminkan prioritas, nilai, dan kebijakan dari badan pemerintahan atau kepemimpinan politik. Keputusan tentang bagaimana sumberdaya dialokasikan (misalnya, sektor mana yang menerima lebih banyak dana) dipengaruhi oleh negosiasi politik, opini publik, dan ideologi partai. Anggaran juga dapat digunakan untuk mendukung agenda politik atau memenuhi kebutuhan kelompok pemilih tertentu.

Anggaran berfungsi sebagai peta jalan atau rencana untuk bagaimana pemerintah atau organisasi akan mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan-tujuannya. Anggaran merinci perkiraan pendapatan dan pengeluaran serta menetapkan sumber daya keuangan untuk berbagai program, departemen, atau inisiatif, pada dasarnya menyusun strategi untuk bagaimana pelayanan publik dan proyek akan dilaksanakan.

Sebagai alat pengendalian, anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap dalam batas yang disetujui dan sesuai dengan tujuan strategis. Anggaran menetapkan batasan tentang berapa banyak yang dapat dibelanjakan dan oleh siapa, serta membantu memantau kinerja keuangan sepanjang tahun. Pemerintah atau organisasi seringkali membentuk mekanisme untuk melacak kinerja anggaran, memastikan kepatuhan terhadap aturan keuangan, dan mengidentifikasi area yang membutuhkan penghematan atau peralihan dana. Sistem anggaran di Australia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Badan yang bertanggung jawab atas anggaran

Di pemerintahan Australia, *Treasury dan Finance* adalah dua lembaga utama yang memiliki peran kunci dalam pengelolaan anggaran dan keuangan negara. Masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling mendukung untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, dan transparan.



Gambar 2.18. Dr. Steve dan suasana belajar dalam Sesi Hari 6

Departemen Treasury memiliki peran utama dalam perencanaan fiskal dan ekonomi pemerintah. Treasury bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan ekonomi dan fiskal, termasuk perencanaan dan pengelolaan anggaran nasional. Mereka mengelola proyeksi pendapatan dan pengeluaran pemerintah serta menetapkan kebijakan fiskal yang mencakup pengelolaan utang, pajak, dan pengeluaran negara. Selain itu, Treasury juga memainkan peran sentral dalam penyusunan anggaran tahunan pemerintah. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan dan analisis anggaran serta memastikan bahwa kebijakan fiskal mendukung tujuan ekonomi jangka panjang. Treasury juga terlibat dalam kebijakan

ekonomi makro, termasuk pengawasan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Mereka memberikan saran mengenai kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.

Department of Finance (Departemen Keuangan) memiliki peran utama dalam manajemen keuangan pemerintah. Salah satu tanggung jawab utama mereka adalah memastikan pengelolaan anggaran yang tepat dan pengawasan terhadap pengeluaran pemerintah. Departemen Keuangan memfasilitasi proses penyusunan anggaran dengan memberikan panduan kepada departemen lain mengenai cara menyusun dan mengelola anggaran mereka.

Oleh karena itu *Treasury* dan *Finance departemen* bekerja bersama dalam proses penyusunan anggaran tahunan. *Treasury* lebih fokus pada kebijakan fiskal dan proyeksi ekonomi, sedangkan *Finance* lebih berfokus pada pengelolaan dan distribusi anggaran serta pengawasan pengeluaran. Dalam hal Kebijakan Fiskal dan Pengeluaran *Treasury* mengembangkan kebijakan fiskal makro ekonomi, sementara *Finance* memastikan bahwa pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebijakan tersebut dan efisien. Sedangkan dalam Audit dan Evaluasi *Finance* mengawasi implementasi anggaran di level departemen, sementara *Treasury* mengawasi implikasi fiskal keseluruhan dan kestabilan ekonomi. Departemen *Treasury* berfokus pada kebijakan fiskal, ekonomi makro, dan perencanaan anggaran, sedangkan *Department of Finance* lebih fokus pada pengelolaan pengeluaran dan keuangan operasional pemerintah. Kedua lembaga ini memiliki peran saling melengkapi dan bekerja sama untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan sesuai dengan prioritas kebijakan pemerintah Australia.

b. *Budget Cycle in Australia*

Penyusunan anggaran di pemerintahan Australia pada umumnya berdasarkan pada kinerja masa lalu, anggaran saat ini, dan rencana pengeluaran masa depan. Siklus Anggaran Pemerintah Australia adalah proses terstruktur melalui mana pemerintah merencanakan, mengalokasikan, dan memantau pengeluaran publik serta pengumpulan pendapatan. Proses ini melibatkan beberapa tahap kunci yang memastikan transparansi keuangan, akuntabilitas, dan keselarasan dengan prioritas nasional. Berikut merupakan unsur-unsur penting dalam penyusunan anggaran di pemerintah Australia :

- a. Departemen Keuangan mengelola proses anggaran. Mereka terlibat dalam mengembangkan parameter kebijakan anggaran dan kebijakan fiskal.
- b. Para Menteri dalam Kabinet, melalui komite tinjauan strategis, menetapkan parameter anggaran dan prioritas kebijakan berdasarkan pemerintah dan kebijakan sebelumnya.
- c. Rencana portofolio dan rancangan perhitungan biaya dilakukan oleh bagian keuangan, kemudian dikembalikan ke departemen.
- d. Rencana agensi/portofolio diselesaikan dan diserahkan ke ERC (*Expenditure Review Committee of Cabinet*) untuk memeriksanya dengan cermat. Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan juga sangat terlibat dalam ERC.
- e. Penyesuaian dilakukan jika diperlukan oleh Perdana Menteri.

- f. Persetujuan penuh dari kabinet dan para Menteri.
- g. Anggaran disampaikan ke parlemen, Komite Estimasi Senat memeriksa anggaran tersebut, sebelum legislasi anggaran disahkan ke parlemen.

c. *Expenditure Review Committee*

Dalam melakukan pengajuan anggaran dan sebelum disahkan, maka perlu dilakukan revidi oleh ERC. ERC (*Expenditure Review Committee*) adalah Komite Peninjauan Pengeluaran yang merupakan bagian dari Kabinet Pemerintah Australia. Komite ini bertanggung jawab untuk meninjau dan menilai usulan pengeluaran dari berbagai departemen dan agensi pemerintah. ERC memainkan peran kunci dalam menentukan alokasi dana dan prioritas pengeluaran anggaran, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan, serta efektif dan efisien. Komite ini terdiri dari sejumlah menteri senior, termasuk Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri terkait lainnya. Mereka menganalisis proposal anggaran, mengidentifikasi trade-off antara berbagai kebutuhan pengeluaran, dan membuat rekomendasi untuk keputusan anggaran yang final yang akan diajukan kepada Kabinet dan kemudian ke Parlemen.

d. Fungsi PEFA dan PBO

Di Australia, PEFA (*Public Expenditure and Financial Accountability*) dan PBO (*Parliamentary Budget Office*) memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan baik, sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan dengan pengawasan yang ketat dari lembaga legislatif.

Meskipun Australia tidak menggunakan PEFA secara formal dalam setiap evaluasi pengelolaan keuangan, sistem pengelolaan keuangan publik di negara ini telah mengadopsi banyak prinsip yang terkandung dalam standar PEFA. Australia memiliki sistem pengelolaan keuangan yang sangat transparan dan efisien, dengan beberapa komponen utama yang sesuai dengan prinsip-prinsip PEFA.

PBO di Australia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses penganggaran dan memberikan informasi yang objektif serta analisis yang dapat digunakan oleh parlemen untuk membuat keputusan terkait anggaran. PBO didirikan pada tahun 2012 sebagai respons terhadap kebutuhan akan lembaga yang memberikan analisis dan saran independen terkait anggaran.

Secara keseluruhan, PEFA dan PBO membantu mempromosikan pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien di Australia, yang mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan penggunaan dana publik.

e. Perbedaan antara evaluasi dengan audit

Evaluasi sangat penting untuk dilakukan dalam kegiatan manajemen publik dan publik akuntabilitas. Evaluasi membantu manajer publik memahami kebijakan atau program mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Dengan hasil evaluasi,

mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai pengalokasian sumber daya, perbaikan program, dan penyesuaian lainnya. Menteri menggunakan hasil evaluasi untuk merumuskan kebijakan masa depan. Memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak membantu mereka merancang strategi yang lebih baik dan melakukan penyesuaian pada kebijakan yang ada agar hasil yang diinginkan tercapai.

Sedangkan audit Bertujuan untuk menilai kepatuhan dan akurasi terhadap standar, kebijakan, atau prosedur yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan keuangan, pengelolaan sumber daya, atau kepatuhan hukum. Audit lebih menekankan pada pemeriksaan apakah kegiatan atau laporan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pemerintahan Australia dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan *Audit Financial* dan *Audit Performance* yang dilakukan oleh *Auditor General*, *Ombudsman*, dan *Parliamentary Committees* – mengevaluasi secara mendalam atas kinerja, nilai uang, limbah, dan kegagalan pemerintah.

f. Strategi audit internal

Dalam melakukan internal audit perlu dilakukan *risk assessment* terkait dengan pengendalian dalam sistem dan proses, manajemen keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Implementasi atas *risk assessment* adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko *fraud* dan korupsi yang mungkin akan terjadi. Di Australia, audit internal di sektor publik diatur oleh beberapa kerangka hukum dan peraturan, baik di tingkat federal maupun negara bagian. Hal ini memastikan bahwa proses audit internal dilakukan secara konsisten, transparan, dan independen.

- **Australian National Audit Office (ANAO)** merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas audit keuangan dan kinerja untuk lembaga pemerintah federal. Meskipun tidak secara langsung mengawasi audit internal di setiap lembaga pemerintah, ANAO memberikan pedoman dan mengawasi laporan audit eksternal, yang mempengaruhi audit internal.
- **IBAC – Independent broad based anti-corruption commission** adalah lembaga yang ada di negara bagian Victoria, Australia, yang bertugas untuk menangani dan mencegah korupsi di sektor publik. Meskipun IBAC beroperasi di Victoria, fungsinya sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat negara bagian tersebut.
- **Ombudsman Australia** adalah lembaga yang bertugas untuk menyelidiki keluhan dari warga negara terkait dengan tindakan atau kebijakan yang tidak adil, tidak transparan, atau tidak memadai yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Ombudsman Australia berperan sebagai pengawas yang independen untuk memastikan bahwa administrasi publik bekerja secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.
- **Victorian Auditor-General Office Victorian Auditor-General's Office (VAGO)** adalah lembaga independen yang memainkan peran kunci dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah di negara bagian Victoria, Australia. Melalui audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan, VAGO membantu memastikan bahwa dana

publik digunakan secara efektif dan bahwa lembaga pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat Victoria.



Gambar 2.19. Dr. Steve dan suasana belajar dalam Sesi Hari 6

Sesi Siang: Pembahasan Pencegahan dan Deteksi Kecurangan (*Fraud*)

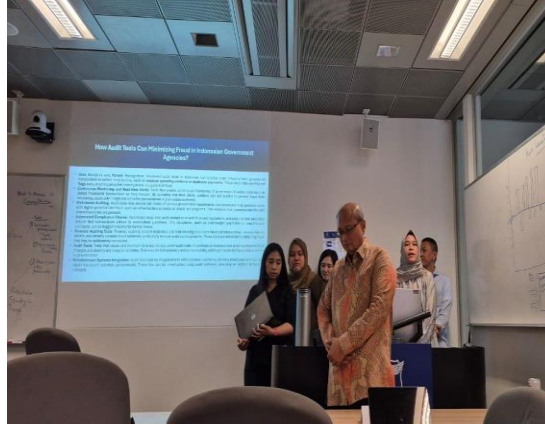
Sesi siang pembelajaran ini, diampu oleh **Dr Steve Perryman BA., DipEd, BPPM (H1), PhD** membahas tentang teori pencegahan dan deteksi kecurangan (*fraud*) serta menjelaskan metode yang digunakan oleh auditor internal untuk menguji dan mengevaluasi potensi risiko dan kerentanan terhadap kecurangan (*Fraud*) dalam suatu organisasi, proses dan sistem.

Dr Steve juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa isu mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam proses penggunaan anggaran. Isu tersebut berkaitan dengan pengalokasian, pendistribusian dan stabilisasi ekonomi terkait dengan kebijakan mikroekonomi dan makroekonomi. Isu-isu tersebut biasanya berhubungan dengan strategi manajemen sumber daya, evaluasi kinerja dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan monitoring keuangan dan manajemen risiko dengan menggunakan *international best practice* dan standar akuntansi yang berlaku umum.

Setelah melakukan pembahasan tersebut, dilanjutkan diskusi studi kasus tentang bagaimana peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui kegiatan audit dapat digunakan untuk meminimalkan potensi kecurangan di lembaga pemerintah yang memiliki dampak keberhasilan yang tinggi. Dalam sesi ini, peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok diskusi kemudian dilanjutkan mempresentasikan hasil diskusi tersebut.

a. Presentasi Kelompok 1 dengan judul *Minimizing Fraud in Indonesian Government Agencies*

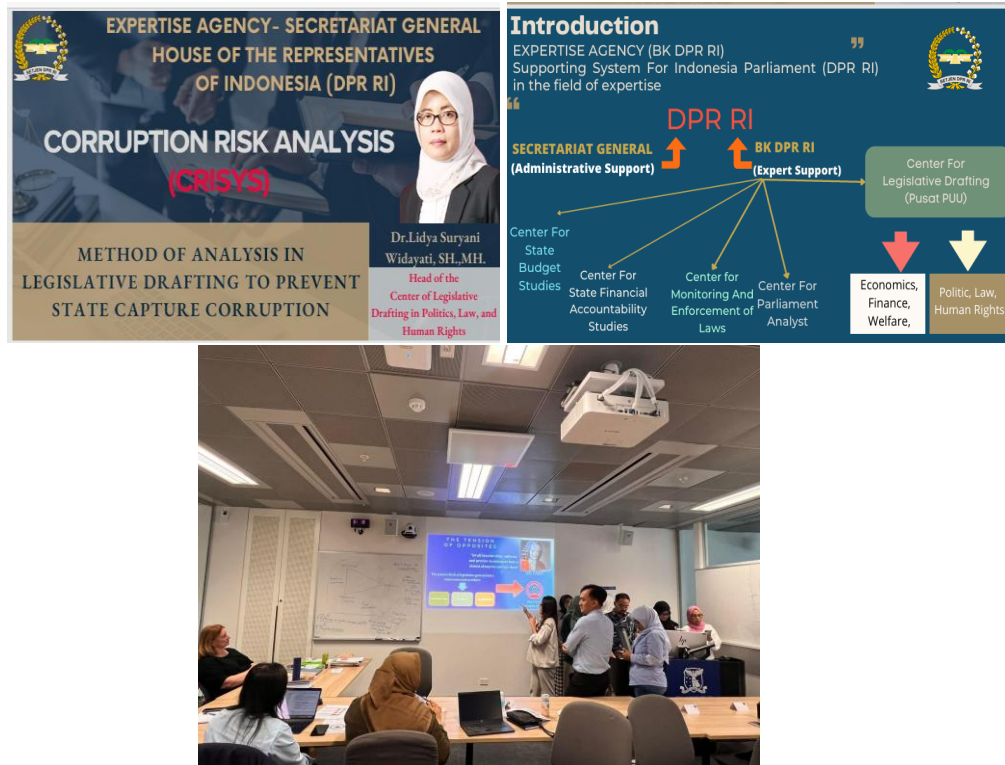




Gambar 2.20. Paparan Kelompok 1 dalam Sesi Hari 6

Presentasi pertama menjelaskan mengenai kegiatan audit, reviu dan monitoring dapat meminimalisir adanya potensi kecurangan akibat adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal. *Whistleblowing System* dan juga monitoring atas pencegahan *Conflict of Interest* juga merupakan komponen yang dapat mencegah dan mendeteksi *fraud*.

b. Presentasi Kelompok 2 dengan judul *Corruption Risk Analysis*



Gambar 2.21. Paparan Kelompok 2 dalam Sesi Hari 6

Corruption Risk Analysis merupakan suatu program yang dibuat untuk meminimalisir adanya risiko *fraud* dalam proses perancangan dan penyusunan undang-undang. *Political corruption* memiliki dampak yang jauh lebih besar karena yang dilakukan penyelewengannya adalah pada produk kebijakan hukum yang berdampak kepada masyarakat umum tidak hanya berdampak pada satu orang saja atau kerugian negara

saja sehingga sifat kerugian yang ditimbulkan jauh lebih masif. Partisipasi publik dan upaya perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan metode *Crysis* yang menjadi salah satu metode yang harus ditambahkan untuk mencegah penindakan dari tindak pidana korupsi, khususnya *political corruption* yang terjadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

7. Hari 7: Selasa, 3 Desember
Topik: Manajemen Sumber Daya Manusia
Mentor: Dr. Valarie Sands

Pada hari Selasa, 3 Desember 2024, para Peserta mempelajari tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dengan pengajar Dr. Valarie Sands. Diawali dengan pengenalan Dr. Valarie Sands yang memiliki pengalaman luas dalam reformasi sektor publik, tata kelola yang baik, dan penguatan institusi publik seperti parlemen di berbagai negara, termasuk Indonesia. Manajemen SDM di parlemen harus berpegang pada nilai-nilai dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan efisiensi. Sistem kerja yang berbeda antara sektor sipil dan swasta, dengan fokus pada stabilitas dan integritas. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara telah mengadopsi prinsip manajemen SDM yang baik dalam pengelolaan pegawai parlemen. Dalam manajemen SDM, fokus yang dilakukan adalah pada rekrutmen, pengembangan profesional dan mekanisme untuk mempertahankan pegawai yang berkualitas. Menjadi hal yang penting dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan untuk mencapai pembelajaran organisasi dan pertumbuhan individu. Dalam sesi ini, manajemen SDM yang dibahas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan SDM di parlemen, memastikan sistem yang lebih responsif, akuntabel, dan mampu menciptakan nilai publik melalui pendekatan yang berbasis prinsip manajemen modern.



Gambar 2.22. Dr. Valerie dan suasana belajar dalam Sesi Hari 7

Manajemen SDM di Parlemen Victoria meliputi staf Parlemen dan staf Anggota Parlemen. Perekrutan pegawai di Parlemen Victoria, Australia, melibatkan proses yang terstruktur dan transparan untuk memastikan individu yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Berikut adalah penjelasan umum mengenai proses tersebut:

1. Jenis Pegawai yang Direkrut

- a. **Staf Parlemen:** Pegawai administratif atau profesional yang mendukung fungsi parlemen, seperti staf di bidang hukum, kebijakan, riset, komunikasi, atau layanan publik.
- b. **Staf Anggota Parlemen (MP):** Staf yang bekerja langsung untuk anggota parlemen (seperti penasihat kebijakan, asisten administratif, atau staf media).
- c. **Staf Teknis dan Operasional:** Pegawai yang menangani fasilitas parlemen, teknologi informasi, keamanan, atau layanan lainnya.

2. Proses Perekrutan

- a. Pengumuman Lowongan: Informasi lowongan biasanya diumumkan di situs resmi Parlemen Victoria atau portal karir pemerintah. Pengumuman ini mencakup deskripsi pekerjaan, kualifikasi yang diperlukan, dan proses pendaftaran.
- b. Pengajuan Lamaran: Kandidat harus menyerahkan dokumen seperti surat lamaran, CV, dan terkadang jawaban untuk kriteria seleksi utama yang tercantum dalam pengumuman.
- c. Seleksi Awal: Panitia perekrutan akan memeriksa lamaran untuk menentukan kandidat yang memenuhi persyaratan dasar.
- d. Wawancara: Kandidat yang lolos seleksi awal akan diundang untuk wawancara, yang mungkin mencakup studi kasus atau tes lainnya.
- e. Referensi dan Pemeriksaan Latar Belakang: Pemeriksaan ini memastikan kandidat memiliki rekam jejak yang baik dan layak untuk posisi yang dilamar.
- f. Penawaran Kerja: Kandidat terpilih akan menerima tawaran kerja formal.

3. Persyaratan Umum

- a. Memiliki kewarganegaraan Australia atau izin kerja yang sah.
- b. Kualifikasi dan pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dilamar.
- c. Kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kerja tim yang baik.
- d. Kepatuhan terhadap standar etika, integritas, dan kebijakan keamanan pemerintah.

4. Karir dan Pengembangan

Pegawai di Parlemen Victoria memiliki akses ke pelatihan dan pengembangan profesional untuk mendukung kemajuan karir mereka. Lingkungan kerja ini dirancang untuk mendorong pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan keterampilan. Pengembangan karir dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan harus mendorong pembelajaran di antara pegawai dan dapat memberikan nilai lebih bagi pribadi pegawai. Sedangkan pengembangan melalui pendidikan dirancang untuk meningkatkan kompetensi secara keseluruhan.

Pada sesi ini, para Peserta diberikan waktu untuk berdiskusi secara kelompok mengenai rekrutmen pegawai untuk kemudian didiskusikan bersama dalam bentuk paparan atau presentasi.



Gambar 2.23. Paparan Kelompok dalam Sesi Hari 7

Manajemen SDM di Victoria juga dilengkapi dengan *Code of Conduct* sebagai sebuah standar kode etik yang diperlukan tak terkecuali Anggota Parlemen maupun staf parlemen. Pada tahun 2022, Parlemen Victoria memiliki 5 nilai-nilai kode etik yaitu Daya Tanggap (Responsiveness), Integritas (Integrity), Ketidakberpihakan (Impartiality), Akuntabilitas (Accountability), Penghormatan (Respect). Standar *Code of Conduct* yang dimiliki Parlemen Australia ialah CPA Document yang berisi:

1. Komitmen terhadap demokrasi parlementer dan integritas kelembagaannya
2. Perilaku umum dalam jabatan publik
3. Pengungkapan dan publikasi kepentingan keuangan dan lainnya
4. Komitmen terhadap tempat kerja yang aman dan terhormat
5. Perilaku online, media sosial, Kecerdasan Buatan dan Manajemen Informasi
6. Pengaduan, investigasi independen, dan keadilan prosedural
7. Perbaikan dan sanksi
8. Penasihat etika
9. Kesadaran dan pendidikan

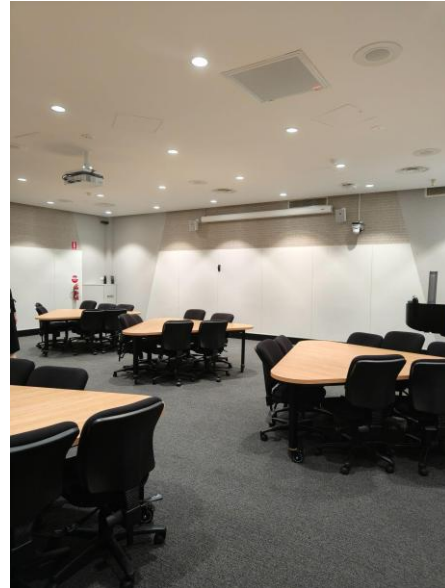
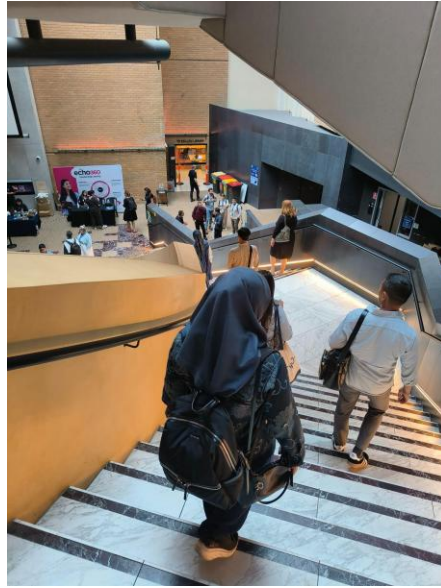
Dr. Valarie juga menjelaskan tentang konflik kepentingan, yang mana mengidentifikasi dan menyelesaikan situasi Konflik Kepentingan sangat penting untuk tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik. Dalam dunia yang kompleks dan penuh gejolak saat ini, menghadapi konflik kepentingan menjadi

suatu hal yang sering kali sulit untuk dicapai dalam praktik sehari-hari. Kemudian Dr. Valarie menjelaskan tentang Pedoman OECD tahun 2010 yang berjudul *Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit*. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah terjadi ketika seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas resmi mereka secara tidak semestinya. Pedoman OECD ini juga berisi strategi dan alat yang dapat mengidentifikasi konflik melalui definisi, diagram, dan tes objektif, pencegahan dan manajemen, serta contoh studi kasus untuk membantu pelatihan dan simulasi penyelesaian konflik. Toolkit ini disusun untuk disesuaikan dengan kebutuhan berbagai negara dengan sistem hukum dan administrasi yang berbeda, serta disarankan untuk digunakan oleh pembuat kebijakan, manajer publik, maupun lembaga pemerintah.

Kegiatan pada hari ini dilanjutkan dengan visitasi lingkungan University of Melbourne. Kegiatan visitasi ini difokuskan pada observasi ruang belajar mahasiswa dan juga ruang bagi pengajar/dosen serta staf. Di University of Melbourne, ruang kerja dosen dirancang untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Ruang ini dilengkapi dengan meja kerja yang nyaman, rak buku, dan peralatan teknologi modern seperti komputer dan perangkat presentasi. Dosen memiliki akses ke ruang pertemuan untuk berdiskusi dengan mahasiswa atau rekan sejawat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi dan pengembangan ide-ide baru.

Sementara itu, ruang staf di universitas ini menyediakan area yang nyaman dan fungsional bagi para staf administrasi dan pendukung akademik. Ruang ini seringkali dilengkapi dengan fasilitas untuk bekerja secara efisien, seperti meja kerja, ruang rapat kecil, dan area untuk berinteraksi dengan kolega. Desain ruang staf mendukung komunikasi yang baik dan kolaborasi antar tim, sehingga meningkatkan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas administratif.

Untuk ruang belajar mahasiswa, University of Melbourne menawarkan lingkungan yang inspiratif dan interaktif. Ruang belajar ini mencakup ruang kuliah yang modern, dilengkapi dengan teknologi terkini seperti proyektor dan sistem audio yang baik. Selain itu, terdapat juga area belajar terbuka yang memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi, bekerja dalam kelompok, atau sekadar bersantai. Dengan berbagai fasilitas yang mendukung, mahasiswa dapat belajar dengan lebih efektif dan terlibat aktif dalam proses pendidikan mereka. Keseluruhan desain ruang di universitas ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan mendukung perkembangan akademik serta sosial mahasiswa.



Gambar 2.24. visitasi lingkungan University of Melbourne

8. Hari 8: Rabu, 4 Desember 2024
 Topik : Manajemen Rekod
 Mentor: Dr. Ali Reza

Sesi Pagi: Pembahasan mengenai Manajemen Rekod & Perpustakaan

Dr. Ali membuka sesi di hari ke-8 dengan mengangkat tentang perbandingan apa itu rekod, arsip dan dokumen. Rekod dijelaskan sebagai informasi yang terekam secara formal dan sistematis, biasanya dalam konteks organisasi atau institusi. Rekod adalah dokumen yang memiliki nilai legal dan administratif. Karakteristiknya memiliki siklus hidup

yang jelas, mulai dari penciptaan, penggunaan, hingga pemusnahan. Rekod juga dibuat untuk merekam aktivitas, transaksi, atau keputusan suatu organisasi.

Sementara arsip merupakan kumpulan rekod yang telah memiliki nilai sejarah, hukum, atau administratif. Arsip biasanya disimpan untuk jangka waktu yang lama. Karakteristiknya konsisten, dan umumnya isi tidak berubah setelah menjadi arsip. Arsip juga memiliki nilai guna yang lebih luas, tidak hanya untuk organisasi yang membuatnya, tetapi juga untuk penelitian atau kepentingan publik.

Sedangkan dokumen adalah segala bentuk informasi tertulis, baik manual maupun digital. Ini bisa berupa surat, laporan, gambar, video, atau bahkan data dalam bentuk elektronik. Karakteristiknya bahwa isi dokumen dapat berubah-ubah, terutama pada dokumen yang masih aktif digunakan. Selain itu dokumen juga fokus pada konten informasi yang terkandung di dalamnya.

Menurut Dr Ali dari sumber text book berjudul "Managing Records: A Handbook of Principles and Practice", karangan Elizabeth Shepherd dan Geoffrey Yeo, terbitan Facet Publishing tahun 2002, pada ulasan tentang 'Understanding Records Management', disimpulkan bahwa rekod adalah dokumen, tapi tidak semua dokumen adalah rekod. Dokumen bisa digolongkan ke dalam rekod jika dapat dijadikan bukti/evidence untuk suatu kegiatan tertentu atau yang mampu menggambarkan tentang bagaimana sebuah keputusan diambil.

Sementara itu sifat dokumen adalah 'progress' dan 'on process', sehingga segala sesuatu yang ada pada sebuah proses kegiatan merupakan bagian dari dokumen. Sementara rekod sifatnya 'finalize documents', sehingga lebih menggambarkan dokumen yang telah selesai dan jelas dari sebuah proses kegiatan.

Rekod memiliki masa waktu keterpakaianya sesuai value. Pada perkembangannya rekod dapat disimpan lebih lama untuk kepentingan kajian dan penelitian. Rekod yang masih disimpan lama dinamakan arsip. Rekod tidak bergantung bentuk, ukuran, usia, atau fakta dalam kontennya. Rekod merupakan bentuk penyimpanan informasi. Sehingga rekod dapat disimpan di beberapa tempat. Jika di Perpustakaan, rekod bisa berbentuk buku, audio, video yang isinya bermanfaat untuk pembelajaran, penelitian dan kajian. Pada Perpustakaan rekod bisa berupa, risalah rapat UU, naskah akademik, laporan penelitian, dan dapat berupa *reference books* (Panduan, pedoman pembuatan UU, dll) serta buku ketika sudah dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Ketika rekod sudah berbentuk buku reference, maka tidak perlu disimpan dan dikelola sebagai rekod (karena tidak menyediakan bukti tentang aktivitas). Sementara ketika di Museum rekod bisa berwujud benda-benda bersejarah seperti: palu sidang, kertas pemilu, seragam dan lain sebagainya.

Pada awal mula perkembangan rekod tidak terlepas salah satunya dengan akar arsip di era Roma dan peradaban Islam (Byzantine) di dunia, di mana rekod sebagai simbol kekuatan berbentuk penyimpanan di perpustakaan dan berguna sebagai bukti untuk pemerintahan dan perkembangan peradaban. Pemusnahan dan pembakaran perpustakaan saat itu merupakan bentuk penghilangan kekuatan pemerintahan yang perlu dihindari.

Untuk memudahkan pembelajaran mengenai rekod, arsip, dokumen, perpustakaan, dan museum, dilampirkan tabel seperti di bawah ini:

Keterangan	Rekod	Arsip	Dokumen
Siklus Hidup	Aktif & Inaktif	Inaktif	Aktif
Nilai	Legal & Administratif	Sejarah, Hukum, Administratif	Informasi
Tujuan	Bukti, Akuntabilitas	Pelestarian, Penelitian	Komunikasi, Informasi

Keterangan	Rekod	Perpustakaan	Museum
Sifat	Terbuka & Tertutup	Terbuka & ada akses terbatas	Terbuka
Bentuk	Finalize documents	data, dokumen, informasi, buku, audio, video	benda bersejarah
Tujuan	Bukti, Akuntabilitas	Pelestarian, Penelitian, Pembelajaran, Kajian, Rekreasi	Pelestarian, Pembelajaran, Rekreasi

Kebijakan menyimpan rekod di Australia ada standarnya, sebagai contoh untuk dokumen pajak (disimpan selama 7 tahun). Hal ini akan berbeda untuk organisasi swasta (private), maupun organisasi swasta yang menjadi konsultan manajemen rekod bagi pemerintah (public).

Di Australia rekod dipertahankan sampai 30 tahun, dan bisa mencapai 50 tahun untuk kasus tertentu, sehingga bisa dibilang tidak ada batasan dalam waktu penyimpanannya. Sementara di Indonesia rekod dipertahankan selama 10 tahun. Rekod kebijakannya bisa dibuka ke publik maupun ditutup. Namun, pada perkembangannya di negara demokrasi ada dorongan yang besar untuk menyediakan rekod ke publik. Dengan adanya UU mengenai kebebasan mendapatkan informasi atau Freedom of Information Act di Australia publik dijamin harus selalu bisa mengakses records. Pemerintah bisa mempertimbangkan menutup akses rekod tertentu jika menyangkut isu keamanan, dan kebijakan keterbukaan publik.

Menurut Dr. Ali sekitar tahun 1980 - 1990 setelah ada perkembangan kebijakan publik rekod berkembang menjadi “continuous process” karena keberadaannya memiliki

keterkaitan kemana-mana. Hal ini terkenal di antara para scholars, dan praktisi kebijakan publik yang melihat kebutuhan rekod tidak hanya bagi organisasi saja, tetapi bagi publik secara keseluruhan untuk kepentingan *collective memory*.

Pada perkembangannya teknologi baru dan 'compound records' (rekod yang lebih kompleks) menggunakan kebijakan 'continuum records' dibandingkan dengan 'life cycle records' (yang bentuk penciptaan utamanya adalah kertas atau tercetak). Dengan kenyataan ada resiko tinggi kehilangan informasi pada rekod elektronik, maka rekod secara fisik masih dipertahankan sesuai kebijakan 'life cycle records'.

Kemudian Dr. Ali memberikan penjelasan mengenai siklus arsip, rekod, dan dokumen. Disebutkan bahwa manajemen rekod dan arsip merupakan bagian integral dari pengelolaan informasi di organisasi modern, termasuk parlemen. Manajemen rekod di parlemen bertujuan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelestarian dokumen legislatif. Hal ini mencakup pengelolaan dokumen sejak penciptaan hingga penyimpanan akhir atau pemusnahan, sesuai dengan siklus hidup arsip yang terstandarisasi.

Siklus ini mencakup:

1. **Penciptaan (Creation):** Rekod dan dokumen diciptakan melalui aktivitas administratif, legislatif, dan pengambilan keputusan. Contoh: rancangan undang-undang, notulen sidang, atau laporan.
2. **Penggunaan Aktif (Active Use):** Rekod digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pembuatan kebijakan yang mendukung fungsi parlemen
3. **Penyimpanan Jangka Menengah (Intermediate Storage):** Rekod disimpan untuk keperluan administratif, akuntabilitas, atau hukum.
4. **Arsip Permanen (Archival Storage):** Rekod bernilai sejarah atau hukum dilestarikan dalam arsip nasional atau lembaga terkait.
5. **Pemusnahan (Disposition):** Rekod yang tidak memiliki nilai residual dihancurkan sesuai dengan kebijakan retensi.

Menurut Dr. Ali pada penerapannya di Australia tidak ada sistem maupun alat yang spesifik untuk mengelola rekod sehingga bisa dikatakan sistem desentralisasi arsip berkembang di Australia. Kantor dan lembaga publik digandeng bekerja sama untuk menjamin pengelolaan dan penyimpanan rekod pada pemerintahan dan parlemen.

Dalam diskusi selanjutnya di kelas, dipaparkan mengenai karakteristik rekod yang efektif, yaitu:

1. Content

Bahwa rekod mampu menjawab 5W+1H dari fakta tentang aktivitas dan keputusan, baik itu pada rekod berbentuk fisik maupun digital. Oleh karenanya rekod harus dapat tersimpan secara akurat dan komplit.

Contohnya: dalam sebuah 'meeting', diperlukan untuk menyimpan keseluruhan transkrip rekaman dari pertemuan tersebut, namun ada juga rekod yang menyimpan hanya sebagian isi meeting berupa catatan kegiatan yang perlu ditindaklanjuti, atau berupa data kehadiran meeting, dan lainnya. Sehingga rekod tidak harus selalu disimpan keseluruhan. Rekod berupa palu sidang, dan kertas pemilu dapat disimpan di Museum, Perpustakaan, ataupun Galeri. Rekod berupa percakapan dan data juga dapat disimpan dalam e-mail.

Risalah di DPR merupakan contoh rekod di DPR yang menyimpan semua keadaan pada saat pembahasan dan penyusunan UU. Pada transkrip rekod mencakup 'body language', emosi, pakaian yang dipakai, dan lain sebagainya.

2. Context

Informasi yang diberikan dalam rekod bisa konteksnya berasal dari internal organisasi, maupun eksternal organisasi. Dalam hal ini rekod perlu memiliki konteks untuk setiap aktivitas yang direkam.

3. Structure

Rekod perlu memiliki sistem yang mengatur baik rekod berbentuk fisik maupun elektronik. Setiap organisasi di Australia memiliki standar metadata rekod masing-masing yang disesuaikan dengan standar data rekod dari lembaga NAA (National Archives of Australia).

Secara kualitas, rekod yang efektif dan reliable perlu memiliki: authenticity, integrity, usability, dan reliability. Oleh karenanya, bagaimana di era kemajuan teknologi informasi saat ini agar dapat dibedakan deep fake, maka perlu dipastikan keamanan data, standar keamanan, dan prosedur keamanan untuk menjaga rekod utamanya rekod publik dari kejahatan cyber.

Kebijakan pengelolaan arsip:

1. Ada yang dimusnahkan fisik maupun digitalnya
2. Ada yang dimusnahkan hanya fisiknya
3. Ada yang dilakukan back-up sebelum dilakukan retensi
4. Ada beberapa data yang memiliki resiko tinggi, sehingga setelah mencapai waktunya untuk diretensi, maka harus dimusnahkan semuanya.

Rekomendasi Penguatan:

1. **Adopsi Teknologi Digital:** Mengintegrasikan AI dan big data dalam manajemen rekod dan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya analitik.
2. **Kolaborasi antar Departemen:** Membangun ekosistem manajemen informasi yang terpadu. Memperkuat hubungan antara perpustakaan, arsip, dan departemen legislatif lainnya.
3. **Pengembangan Kompetensi Digital:** Melatih staf di parlemen untuk memahami teknologi terbaru dalam pengelolaan informasi.
4. **Adopsi Standar Internasional:** Memastikan kebijakan rekod memenuhi standar global seperti ISO 15489 dan kebijakan perpustakaan memenuhi standar ISO 11620: 2023.

Sesi Siang: Kunjungan ke Melbourne Museum

1. **The welcome area of the exhibition**

Area penyambutan pameran, Wominjeka, memperlihatkan banyak Negara Aborigin Victoria. Di sini diperkenalkan dengan beragam bahasa orang Aborigin Victoria, bahasa yang akan Anda lihat dan dengar di seluruh *First Peoples*.

Di Generations, pengunjung dapat mendengarkan orang-orang dari seluruh Victoria berbagi cerita tentang koneksi, keluarga, budaya, dan ketahanan, dan menjelajahi koleksi foto sejarah dan kontemporer yang semarak dan pedih. Generations adalah perayaan dinamis dan interaktif dari identitas Koorie kontemporer yang menampilkan cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi – cerita dari kemarin dan hari ini, dan cerita untuk masa depan.

Beragam budaya Aborigin dan Torres Strait Islander Australia ditata dalam rangkaian Many Nations yang spektakuler. Label digital menghubungkan masing-masing dari hampir 500 artefak dengan orang-orang yang membuatnya dan menggunakannya. Fitur-fiturnya termasuk meja aktivitas langsung dengan pengalaman menyenangkan dan mendidik untuk anak-anak, dan kotak benda-benda anak-anak yang dihidupkan melalui animasi.

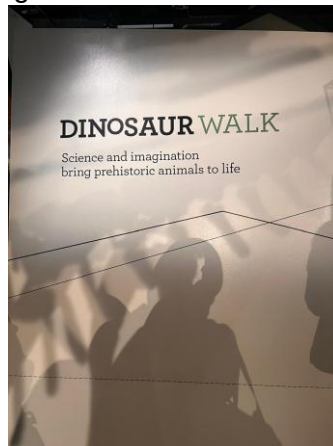
Di sini tercatat sejarah dan budaya orang-orang pertama Victoria, dari Penciptaan hingga saat ini, dengan cerita upacara, adat istiadat, Hukum dan ketahanan, sebelum dan sesudah kedatangan orang Eropa. Bagian ini merayakan berkembangnya masyarakat dan budaya Aborigin di zaman modern dan memberi penghormatan kepada mereka yang berusaha belajar dan menghormati Hukum Aborigin.



Gambar 2.25. Area penyambutan pameran, Wominjeka

2. Dinosaur Walk

Terdapat 17 kerangka hewan prasejarah yang dipamerkan dalam pameran Dinosaur Walk. Pameran ini adalah sumber pengajaran yang sangat baik. Pengunjung dapat melihat berbagai kerangka dari samping, dalam dan atas. Benda-benda yang dapat disentuh, pengalaman imersif, dan pameran multimedia memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi bagaimana hewan-hewan prasejarah ini bergerak, makan, dan bertahan hidup di lingkungan mereka yang berubah.



Gambar 2.26. Pameran Dinosaur Walk

3. Dynamic Earth

Pameran yang sangat visual dan imersif ini mengeksplorasi kisah pembentukan, struktur, dan kekuatan Bumi melalui tampilan ekstensif koleksi geologi Museum Victoria yang mengesankan yang dikombinasikan dengan multimedia yang spektakuler dan interaktif.

- The Earth and The Moon

Bagaimana planet kita dan satelitnya terbentuk?

Bumi dan planet-planet lain terbentuk dari awan gas dan debu 4,5 miliar tahun yang lalu. Diperkirakan bahwa Bulan terbentuk segera setelah itu ketika sebuah benda besar bertabrakan dengan Bumi dan melemparkan sebangkah Bumi ke luar angkasa.

Setelah mendingin dan mengeras, Bumi segera dibanjiri lautan air yang dihasilkan oleh reaksi kimia di kerak mudanya, dan dari dampak komet es. Rotasi bumi dan tarikan gravitasi Bulan menciptakan pasang surut di lautan ini.

Bagaimana bulan terbentuk?

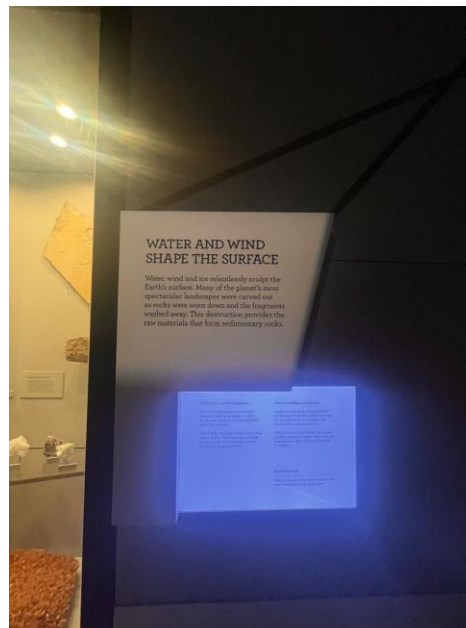
Lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu, benda seukuran planet bertabrakan dengan Bumi. Meskipun sebagian besar benturan diserap ke Bumi yang masih cair, tabrakan itu melemparkan puing-puing ke luar angkasa. Sebagian besar puing-puing ini mengeras di orbit mengelilingi Bumi dan membentuk Bulan kita.

- Introduction to Rocks and Minerals

Batuan dan mineral adalah blok bangunan planet kita yang dinamis. Mereka membentuk lanskap dan memberi kita sumber daya yang berharga. Dengan mempelajari batuan dan mineral, kita dapat lebih memahami peristiwa yang membentuk dan terus membentuk Bumi.

Mineral adalah senyawa kimia alami yang telah terbentuk oleh proses geologis. Mineral juga menyediakan bahan kimia yang penting bagi kehidupan di Bumi.

Sebagian besar batuan adalah campuran mineral yang berbeda. Mereka menunjukkan variasi tekstur dan komposisi yang luar biasa, tergantung pada bagaimana mereka terbentuk.



Gambar 2.27. Dynamic Earth

9. Hari 9: Kamis, 5 Desember 2024

Topik : **Diplomasi dan Komunikasi Parlemen**

Mentor : Dr. Valerie Sands dan Dr. Steve Perryman (School of Social and Political Sciences, the University of Melbourne)

Hari ke-9 pada kursus ini kami para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran diplomasi parlemen dan pentingnya strategi komunikasi yang efektif berdasarkan perspektif Parlemen Victoria, Australia. Dalam sesi ini, dibahas dua topik utama: **Diplomasi Parlemen** dan **Komunikasi Efektif dalam Parlemen**. Materi ini sangat relevan dalam mendalami cara parlemen berinteraksi dengan dunia internasional dan cara memperbaiki komunikasi internal serta eksternal di dalam lembaga legislatif.



Gambar 2.28. Suasana belajar Hari 9

Diplomasi parlemen melibatkan keterlibatan langsung parlemen dalam urusan luar negeri melalui perwakilan atau delegasi yang menghadiri forum-forum internasional dan organisasi antarpallemen. Di sesi ini, kami mempelajari bagaimana delegasi parlemen tidak hanya berperan sebagai wakil negara, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam membentuk hubungan internasional dan kebijakan luar negeri.

Diplomasi parlemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh parlemen untuk terlibat dalam diplomasi internasional, memperkuat kerjasama antar negara, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Parlemen Australia sangat mendukung pengembangan demokrasi parlementer melalui berbagai program penguatan parlemen yang meliputi kunjungan studi, seminar, lokakarya, serta proyek lainnya. Program-program ini dikelola oleh International and Parliamentary Relations Office (IPRO), bekerja sama dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan organisasi internasional lainnya seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Commonwealth Parliamentary Association (CPA).

Salah satu program utama adalah Inter-Parliamentary Study Program (IPSP), yang mempertemukan staf parlemen dari berbagai negara untuk mempelajari prosedur dan praktik di Parlemen Australia. Program ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ide mengenai praktik parlementer, serta membangun jaringan internasional. Program ini diselenggarakan setiap tahun di Canberra dan melibatkan presentasi dari pejabat senior Parlemen Australia mengenai sejarah, struktur, prosedur, serta operasional parlemen yang terdiri dari dua kamar: House of Representatives dan Senate.

Selain itu, diplomasi parlemen juga melibatkan perencanaan kunjungan delegasi, baik yang masuk maupun keluar. Peserta dalam sesi ini berdiskusi tentang urgensi menyusun perencanaan tujuan kunjungan dengan cermat, menentukan siapa yang akan terlibat dalam delegasi, serta apa yang perlu dilihat selama kunjungan tersebut. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan untuk memaksimalkan hasil kunjungan dan meminimalisir potensi masalah yang bisa timbul. Secara keseluruhan, tugas ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang sangat relevan dalam konteks kerja staf parlemen, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan kunjungan diplomatik dengan tujuan belajar dan berkolaborasi dengan lembaga legislatif internasional.



Gambar 2.29. Presentasi Kelompok Hari 9

Sesi kedua membahas pentingnya komunikasi yang baik, baik secara internal antar anggota parlemen dan staf, maupun eksternal antara parlemen, media, dan masyarakat. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki hubungan parlemen dengan publik. Strategi komunikasi internal yang efektif bagi parlemen sangat bergantung pada penggunaan alat digital untuk mempermudah dan mempercepat alur komunikasi, tidak hanya antara anggota parlemen dan publik, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan staf parlemen. Menggunakan alat digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas internal dan mempercepat respons terhadap pertanyaan masyarakat. Selain itu, aspek penting lainnya adalah transparansi dan komunikasi dua arah, yang dapat membangun budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan parlemen dan memastikan bahwa semua staf merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menghadapi tantangan

seperti informasi yang berlebihan atau hambatan bahasa, penting untuk memanfaatkan berbagai saluran komunikasi secara bersamaan, yang akan memastikan konsistensi pesan dan mengatasi masalah yang muncul terkait dengan komunikasi yang tidak efektif. Pelatihan bagi staf parlemen dan investasi dalam teknologi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi.

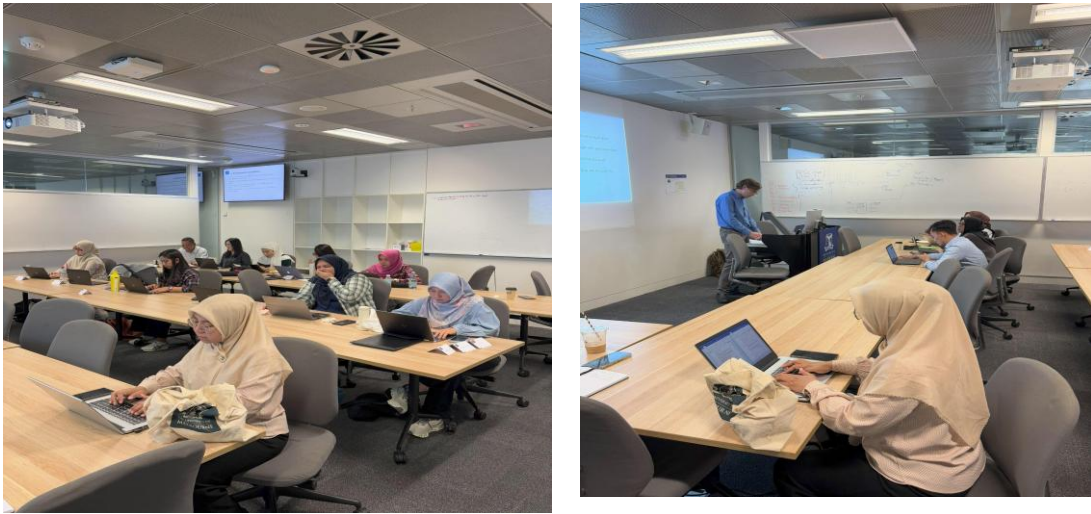
Sebagai lembaga publik, Parlemen juga dituntut untuk memiliki strategi komunikasi di saat krisis. Komunikasi krisis menjadi aspek penting dalam mengelola persepsi publik ketika menghadapi kontroversi politik atau legislatif. Parlemen harus memiliki strategi komunikasi yang matang untuk mengelola krisis tersebut dan meminimalkan dampak negatif terhadap citra mereka. Untuk mengelola persepsi publik, parlemen dapat menggunakan kombinasi strategi komunikasi seperti penyangkalan, justifikasi, dan pengakuan, yang dapat meningkatkan pemberitaan positif di media. Menggunakan berbagai pendekatan komunikasi krisis secara bersamaan biasanya lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Dalam mengelola krisis, strategi legitimasi mencakup penggunaan emosi, altruisme, keahlian, serta rasionalitas untuk membangun kredibilitas, sedangkan strategi delegitimasi melibatkan evaluasi negatif, tuduhan, dan pergeseran kesalahan untuk melemahkan pihak lawan. Strategi mitigasi seperti *transcendence* (menurunkan tingkat ketegangan) dan *differentiation* (membedakan isu utama) digunakan untuk meredakan krisis, sementara intensifikasi dengan penggunaan repetisi atau metafora dapat digunakan untuk menegaskan pesan-pesan kunci. Penggunaan media sosial untuk memberikan pembaruan secara real-time dan berinteraksi dengan publik sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan meningkatkan komunikasi selama krisis, dengan praktik terbaik meliputi pembaruan tepat waktu, pesan yang konsisten, dan komunikasi interaktif. Konsistensi dalam pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik, serta komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan informasi yang salah.

10. Hari 10: Jumat, 6 Desember 2024
Topik : Ringkasan dan Kesimpulan
Mentor: Dr. Michael Breen

Sesi penutupan *Executive Training Program on “Parliamentary Government: Toward a Modern and Dynamic Parliament in Indonesia”* menjadi momen reflektif untuk melihat kembali perjalanan selama program berlangsung. Short course ini dirancang untuk memperkaya pemahaman peserta, terutama dari kalangan staf parlemen dan pemangku kepentingan terkait, mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern, tantangan legislatif, dan praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk memperkuat peran parlemen di Indonesia.

Pada sesi terakhir ini, Dr. Michael Breen membuka dengan refleksi mengenai pentingnya peran parlemen dalam demokrasi modern, khususnya dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti krisis kepercayaan publik, inefisiensi legislasi, dan tuntutan transparansi. Sebagai contoh nyata, peserta diajak untuk memahami peristiwa di Korea Selatan, di mana staf parlemen memainkan peran krusial dalam mencegah terjadinya otoritarianisme melalui penolakan darurat militer. Kasus ini memberikan gambaran bagaimana peran aktif parlemen dan staf pendukung mampu menjaga stabilitas demokrasi dalam situasi krisis.

Selain itu, studi kasus dari Australia tentang pengesahan 31 rancangan undang-undang dalam waktu singkat memicu diskusi mengenai efisiensi proses legislasi vs kualitas undang-undang yang ditetapkan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan antara percepatan legislasi dan pengawasan publik agar kualitas undang-undang tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia, peserta menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap hambatan legislasi yang menyebabkan beberapa RUU tertunda hingga puluhan tahun.



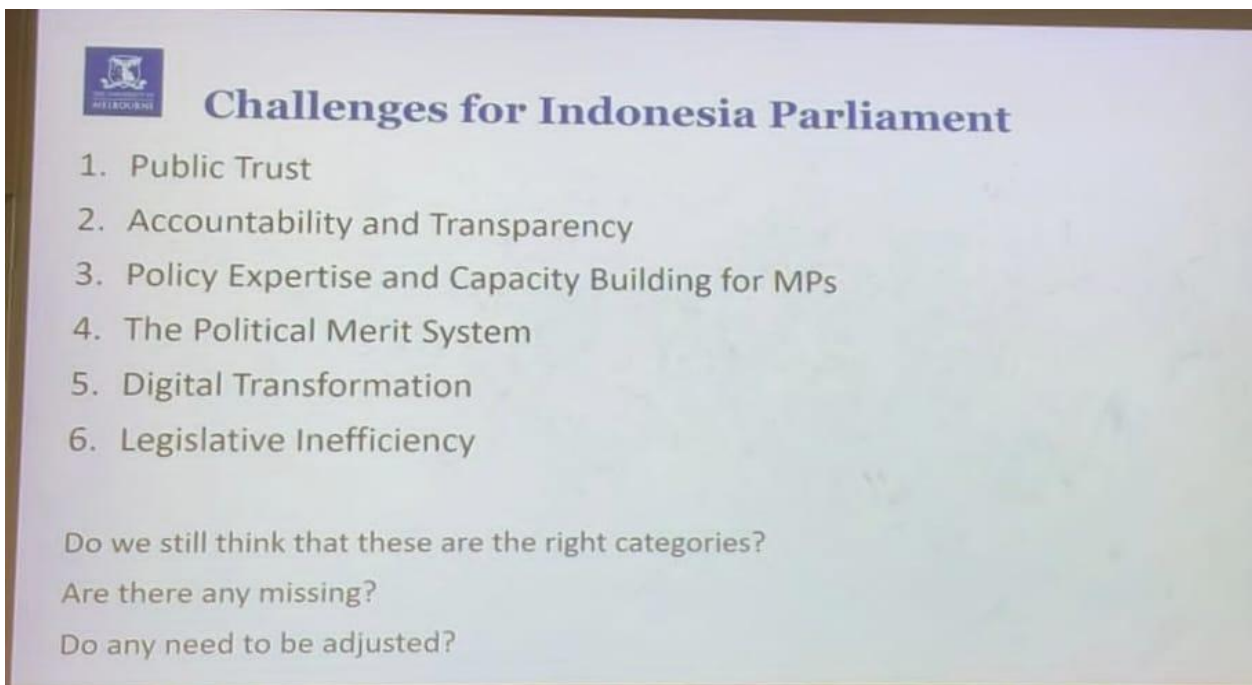
Gambar 2.29. Suasana belajar Hari 10

Selanjutnya, Dr. Michael Breen menekankan pentingnya rekam jejak atau arsip sebagai elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan modern. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik dan transparansi. Dalam konteks demokrasi modern, arsip harus dapat diakses oleh publik untuk memastikan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan otoriter, di mana arsip sering kali digunakan untuk mempertahankan kontrol kekuasaan.

Setelah melakukan pemaparan selanjutnya Dr. Michael Breen mengajak diskusi kepada seluruh peserta untuk membahas tentang tantangan utama parlemen Indonesia yang dalam hasil diskusi Dr. Michael Breen menyimpulkan beberapa poin antara lain:

1. Krisis Kepercayaan publik yang dipengaruhi oleh citra negatif legislatif dan isu korupsi;
2. Inefisiensi legislasi, di mana proses pembahasan RUU yang sifatnya permintaan masyarakat Seringkali memakan waktu bertahun-tahun;
3. Kesenjangan inklusi politik terutama bagi perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Transformasi digital yang belum optimal yang berpengaruh pada transparansi dan akses publik terhadap informasi.

Sebelum sesi ditutup untuk makan siang, Dr. Michael Breen memberikan tantangan kepada peserta untuk menyusun paparan komprehensif mengenai enam isu utama yang dihadapi oleh parlemen Indonesia. Selain itu, peserta juga diminta melakukan simulasi penyusunan program pelatihan yang ideal sebagai solusi strategis dalam menjawab keenam tantangan tersebut.



Sesi Siang Hari (13.10 - 16.00)

Kelompok pertama membahas topik peningkatan kapasitas anggota dewan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam paparannya, kelompok pertama menekankan perlunya program pelatihan khusus terkait pembuatan kebijakan publik agar anggota dewan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berdampak nyata. Program pelatihan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi anggota dewan, terutama ketika dihadapkan pada situasi pembahasan dan penyusunan undang-undang di masa mendatang.



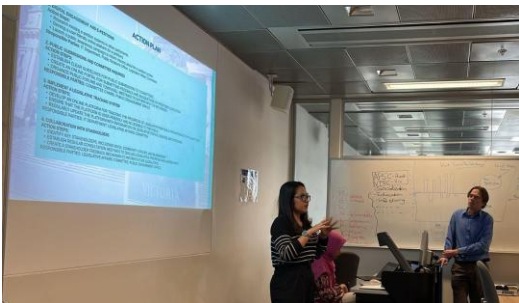


Setelah kelompok pertama melakukan presentasi, kelompok berikutnya membahas tentang kepercayaan masyarakat. Dalam paparannya, kelompok kedua menyampaikan gagasan untuk meningkatkan pola yang tepat dan ideal dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi DPR RI. Langkah-langkah yang ditawarkan antara lain adalah transformasi keterbukaan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat.

Selanjutnya, paparan kelompok ketiga membahas tentang transformasi digital dalam mendukung kinerja parlemen. Poin penting yang dijelaskan oleh kelompok ini adalah tentang penggunaan sistem satu data yang terintegrasi. Penggunaan sistem satu data tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas terutama bagi anggota parlemen dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, baik dalam substansi maupun dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.



Kelompok empat membahas tentang rencana aksi akuntabilitas dan transparansi dalam parlemen di Indonesia. Dalam paparannya, kelompok tersebut memberikan masukan untuk memperkuat peran Inspektorat sebagai unit kerja yang mendorong pengawasan terhadap anggaran di DPR RI. Selain itu, kelompok empat juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif dengan P3AKN dalam membahas rancangan APBN. Penerapan efektifitas dan efisiensi sangatlah penting dalam penggunaan anggaran. Hal tersebut sudah diimplementasikan oleh pemerintah Australia yang penerapan penggunaan anggarannya berdasarkan

	kinerja dan diukur menggunakan KPI. Sedangkan di pemerintahan Indonesia masih menggunakan presentasi realisasi anggaran.
Kelompok terakhir membahas tentang inefisiensi dalam proses penyelenggaraan legislatif di Indonesia. Dalam paparannya, kelompok tersebut memberikan pandangan mengenai faktor-faktor yang dinilai menjadi penyebab inefisiensi dalam kinerja DPR RI. Salah satunya adalah anggapan bahwa terdapat kurangnya penangkapan aspirasi dari masyarakat serta keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses penyampaian aspirasi, salah satunya melalui e-petisi.	

Setelah seluruh kelompok menyampaikan paparannya, Dr. Michael Breen memberikan komentar dan apresiasi terhadap materi yang telah disampaikan. Ia menilai bahwa paparan tersebut sangat komprehensif, terstruktur dengan baik, dan kaya informasi, mencerminkan pemahaman yang mendalam dari setiap kelompok mengenai tantangan dan potensi perbaikan dalam tata kelola parlemen. Dr. Breen mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan kapasitas, dedikasi, dan wawasan yang dimiliki oleh seluruh peserta, mereka akan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap perbaikan tata kelola kinerja DPR RI dan Setjen DPR RI. Beliau juga menambahkan bahwa materi yang disampaikan dapat menjadi pijakan yang kuat untuk merancang langkah-langkah strategis yang lebih efektif, serta mendorong transformasi dalam sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Komentar tersebut menjadi penutup dari rangkaian kegiatan kelas selama *short course Parliamentary Government: Toward a Modern and Dynamic Parliament in Indonesia*. selanjutnya akan ditutup dalam acara makan malam yang akan diselenggarakan pada pukul 17.30 waktu Melbourne.

Sesi Farewell Dinner

Puncak pelaksanaan *Short Course Parliamentary Government: Toward a Modern and Dynamic Parliament in Indonesia* akan ditutup dengan acara makan malam yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Melbourne. Dalam acara tersebut, turut hadir salah satu Profesor Kajian Politik Asia Tenggara, Profesor Andrew Rosser, serta perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne, Geovannie Palembang. Acara dimulai dengan sambutan dari Profesor Andrew Rosser, yang juga berperan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan short course. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepercayaan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Universitas Melbourne dalam menyelenggarakan program ini. Beliau juga berharap agar hasil pembelajaran yang diperoleh

selama short course dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kinerja DPR RI maupun Setjen DPR RI.

Setelah mendengarkan sambutan dari Profesor Andrew Rosser, acara dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang kali ini disampaikan oleh Ibu Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas upaya luar biasa yang telah dilakukan oleh Universitas Melbourne dalam menyelenggarakan kegiatan *Short Course*. Ibu Dr. Lidya juga memberikan apresiasi tinggi kepada para pengajar yang telah menyampaikan informasi dan pengalaman berharga, yang sangat mendukung perbaikan kinerja di DPR RI dan Setjen DPR RI, khususnya dalam konteks transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.



Gambar 2.30. Sambutan Profesor Andrew Rosser dan Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Selain itu, Ibu Lidya juga meminta dua orang peserta untuk menyampaikan sambutan, yang kali ini diwakili oleh Wiryawan Narendro Putro dan Esther Putri Lasmaida. Dalam sambutannya, mereka tidak hanya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan para pengajar, tetapi juga menyampaikan permohonan maaf jika selama proses pembelajaran terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sesuai harapan. Mereka berharap agar setiap peserta dapat terus mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dalam kegiatan ini untuk mendukung peningkatan kualitas kerja di DPR RI dan Setjen DPR RI, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem legislasi yang lebih modern dan efisien.



Gambar 2.31. Testimoni oleh Peserta

Setelah rangkaian sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan pembagian sertifikat dari pihak Universitas Melbourne kepada seluruh peserta. Acara tersebut sekaligus menutup rangkaian seluruh acara pelaksanaan *short course Parliamentary Government: Toward a Modern and Dynamic Parliament in Indonesia*.



Gambar 2.32. Foto Bersama sesi farewell dinner

BAB III

SUBSTANSI PEMBELAJARAN

Bab ini membahas tentang perbandingan praktik-praktik (*best practices* dan *lesson learned*) yang dilakukan di Australia dengan di Indonesia. Perbandingan ini akan memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan pendekatan yang diterapkan oleh kedua negara, serta mengidentifikasi potensi pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari pengalaman Australia. Dengan menganalisis isu-isu kunci dan *best practices* di Australia, diharapkan dapat ditemukan wawasan berharga yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan administrasi publik di Indonesia. Bagian ini akan menjadi landasan untuk menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat membantu Indonesia dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahannya.

A. PUBLIC RELATIONS

1. Public Relation di Parlemen Australia

Public relations di Parlemen Australia menekankan pada pentingnya transparansi, penggunaan teknologi untuk keterlibatan publik, serta pengelolaan krisis yang efektif. Inovasi dalam komunikasi digital dan strategi keterlibatan publik yang inklusif memberikan contoh yang dapat diterapkan di DPR RI untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan memperbaiki citra lembaga legislatif. Parlemen Australia memahami bahwa komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki hubungan parlemen dengan publik. Adapun beberapa hal terkait strategi komunikasi efektif yang diterapkan oleh Parlemen Australia adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi Internal dan Eksternal

Di Parlemen Australia, komunikasi internal dan eksternal memiliki peran krusial dalam menjaga transparansi dan hubungan yang efektif dengan publik. Komunikasi internal berfokus pada pemanfaatan alat digital untuk meningkatkan efisiensi rutinitas administratif dan interaksi antara anggota parlemen dengan staf mereka. Komunikasi eksternal, di sisi lain, mencakup upaya untuk mendekatkan parlemen kepada masyarakat dengan cara mendengarkan, merespons permintaan informasi, dan memberikan informasi yang jelas dan transparan. Komunikasi yang lancar dan jelas antara anggota parlemen dan staf disadari sebagai hal sangat penting untuk efisiensi kerja. Selain itu, parlemen perlu menjalin komunikasi yang baik dengan media untuk memastikan informasi yang benar sampai ke publik.

b. Komunikasi Digital

Parlemen Australia semakin memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat. Penggunaan platform digital memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih terbuka antara anggota parlemen dan publik. Misalnya, e-petisi, konsultasi publik berbasis teknologi, dan perangkat lunak deliberatif seperti "Liquid Feedback" yang memfasilitasi partisipasi langsung masyarakat dalam keputusan legislatif. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas di tengah masyarakat.

c. Strategi Komunikasi Krisis

Ketika menghadapi kontroversi politik atau legislatif, Parlemen Australia menggunakan berbagai strategi komunikasi krisis. Strategi ini mencakup kombinasi dari penyangkalan, justifikasi, dan konsesi untuk meminimalkan kerusakan reputasi. Lebih

lanjut, menggunakan strategi mitigasi (seperti transcendence) dan intensifikasi (seperti repetisi atau metafora) memungkinkan parlemen untuk mengelola krisis dengan lebih efektif. Penggunaan media sosial secara real-time juga menjadi alat yang sangat penting dalam strategi komunikasi krisis, untuk memastikan informasi yang konsisten dan transparan sampai ke publik.

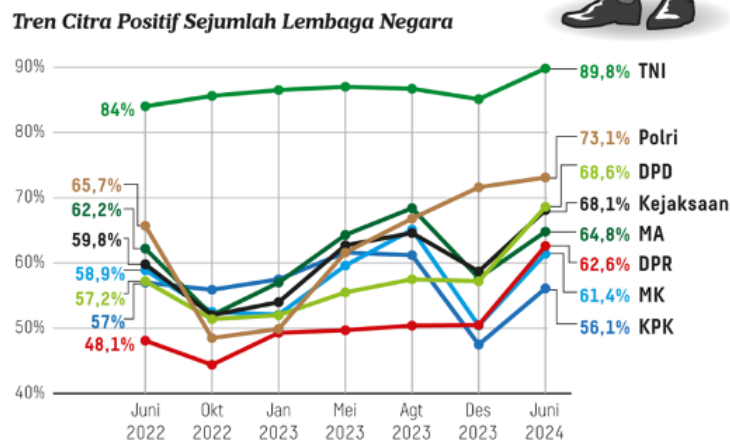
Salah satu poin penting dalam public relations di Parlemen Australia adalah pentingnya strategi komunikasi krisis yang efektif. Penggunaan narasi yang empatik dan transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Selain itu, personalisasi komunikasi dan penggunaan media sosial untuk interaksi langsung dengan masyarakat memungkinkan parlemen untuk menjaga hubungan yang relevan dan responsif.

d. Peningkatan Keterlibatan Publik

Parlemen Australia berfokus pada meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai inovasi. Konsep keterlibatan publik di Australia dibagi dalam tiga elemen diantaranya komunikasi publik, konsultasi publik, dan partisipasi publik. Salah satu contohnya adalah penggunaan “Citizen’s Juries”, dimana sekelompok warga yang dipilih secara acak berdiskusi untuk mencapai kesepakatan mengenai rekomendasi kebijakan. Inovasi lainnya adalah penyelenggaraan konsultasi dengan mitra komunitas untuk memastikan suara dari berbagai kelompok masyarakat terwakili.

2. Hubungan Masyarakat (Humas) di Parlemen Indonesia

DPR RI selaku Parlemen Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dalam hal Hubungan Masyarakat atau *Public Relations* (PR) dan Diplomasi Parlemen, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di Indonesia, humas dan diplomasi parlemen memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang lebih baik antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan masyarakat, serta antara Indonesia dengan negara-negara lain.



Metode Penelitian

Survei periodik melalui wawancara tatap muka diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian $\pm 2,83$ persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Sumber: Litbang Kompas/RFC/EDR



Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, DPR RI semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi dan aksesibilitas bagi publik. Media sosial, situs web,

dan aplikasi komunikasi lainnya kini menjadi saluran utama bagi DPR untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR dan meningkatkan transparansi di institusi legislatif. Meskipun demikian, tantangan utama dalam PR parlemen Indonesia adalah rendahnya kepercayaan publik dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar dipengaruhi oleh miskomunikasi dan disinformasi yang beredar di media. Di sisi lain, DPR RI juga telah berupaya meningkatkan citra melalui berbagai kampanye publik, termasuk pembuatan konten edukasi tentang peran dan fungsi parlemen di media sosial, serta pembukaan akses informasi melalui situs resmi DPR RI. Fungsi Humas DPR RI sangat penting dalam meningkatkan citra, persepsi, dan kepercayaan publik, melalui program-program yang bertujuan untuk mendekatkan DPR kepada publik dan membangun citra positif, seperti Penerimaan Kunjungan Edukasi Parlemen, Program Parlemen Remaja, dan Program Parlemen Kampus.

Fungsi Humas DPR RI (Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) sangat penting dalam meningkatkan citra, persepsi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh DPR, terutama terkait dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, humas memiliki peran utama dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai kegiatan edukasional yang dapat mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan transparansi serta keterlibatan publik dalam proses legislatif. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Humas DPR RI bertujuan untuk mendekatkan DPR kepada publik dan membangun citra positif, antara lain melalui kegiatan-kegiatan seperti:

a. Penerimaan Kunjungan Edukasi Parlemen

Program ini terbuka bagi masyarakat umum dan bertujuan memberikan edukasi tentang proses legislasi, fungsi pengawasan, serta anggaran negara yang menjadi tugas utama DPR. Kegiatan ini juga disertai dengan sesi diskusi yang dipandu oleh staf DPR atau anggota legislatif yang relevan. Melalui kegiatan ini, Humas DPR RI berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem keparlemenan dan proses legislatif yang berlangsung di Indonesia. Dengan membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara DPR dan masyarakat, Humas berusaha membangun transparansi yang memungkinkan publik untuk lebih memahami apa yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mendekatkan DPR kepada masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja dan fungsi DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.





Gambar 3.1. Penerimaan Kunjungan Edukasi Parlemen

b. Program Parlemen Remaja

Program Parlemen Remaja adalah salah satu upaya DPR RI untuk melibatkan generasi muda dalam kegiatan legislatif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR. Program ini memberi kesempatan kepada pelajar dan mahasiswa untuk secara langsung mengerti dan merasakan pengalaman seperti apa yang terjadi di dalam parlemen melalui aktivitas role play atau bermain peran layaknya Anggota Dewan. Dalam program Parlemen Remaja, peserta diberikan kesempatan untuk berperan sebagai anggota DPR dalam simulasi sidang, membahas isu-isu terkini, dan mengambil keputusan yang mencerminkan fungsi legislasi. Selain itu, mereka juga dilibatkan dalam pembelajaran tentang sistem pemerintahan Indonesia serta mekanisme kerja DPR.



Gambar 3.2. Program Parlemen Remaja

c. Program Parlemen Kampus

Parlemen Kampus adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk menjembatani hubungan antara DPR RI dengan dunia akademik, khususnya dengan kampus-kampus dan mahasiswa. Melalui program ini, DPR RI melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang fungsi dan peran DPR, serta mengajak mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi politik yang konstruktif.



Gambar 3.3. Program Parlemen Kampus

Program Parlemen Kampus mengajak mahasiswa untuk lebih memahami kebijakan publik, rancangan undang-undang, serta bagaimana DPR berperan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan anggota DPR, baik dalam bentuk seminar, diskusi panel, maupun sesi tanya jawab. Program ini memiliki tujuan:

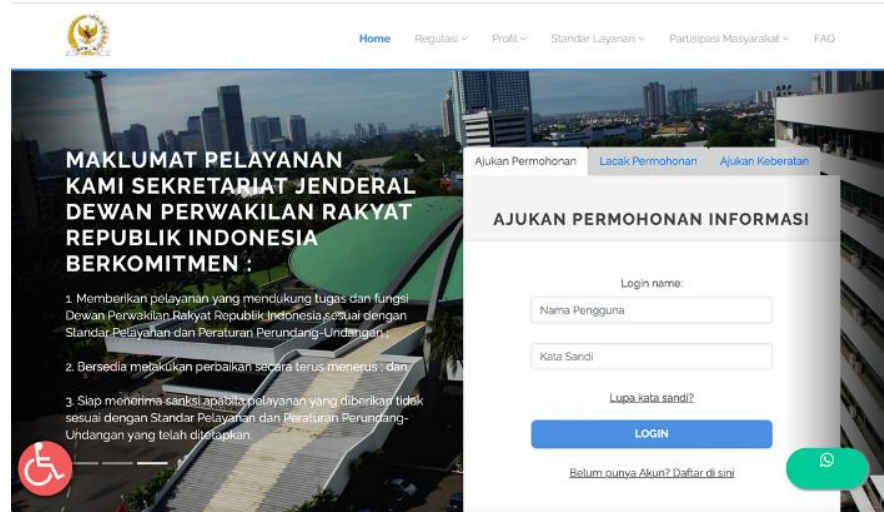
- **Meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik** di kalangan mahasiswa.
- **Mendorong mahasiswa untuk lebih peduli** terhadap proses legislatif dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh DPR.
- **Meningkatkan citra positif DPR**, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan bagian penting dari pemilih masa depan.

Melalui Parlemen Kampus, Humas DPR RI berusaha untuk memperkenalkan DPR sebagai lembaga yang terbuka terhadap diskusi, serta lebih inklusif dalam melibatkan suara-suara mahasiswa dalam kebijakan legislatif.

d. Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID DPR RI

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan oleh lembaga negara, termasuk DPR RI, untuk membangun transparansi dan akuntabilitas. DPR RI memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk mengelola dan menyebarkan informasi yang relevan kepada publik. Melalui website resmi ppid.dpr.go.id, PPID DPR RI memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kegiatan parlemen, termasuk

risalah rapat, naskah akademik, keputusan legislatif, *draft* undang-undang, dan laporan singkat maupun laporan kinerja parlemen.



Gambar 3.4. PPID DPR RI

Melalui sistem keterbukaan informasi ini, DPR RI menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap parlemen. Keterbukaan ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai dan mengkritisi kinerja DPR berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan langkah yang sangat penting dalam menanggulangi isu ketidakpercayaan dan negatifitas yang sering dilontarkan kepada lembaga legislatif. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan terbuka akan merasa lebih terlibat dalam proses politik dan lebih percaya terhadap integritas DPR.

e. Program dan Kegiatan Lainnya yang Bersifat Edukasional

Selain program-program yang telah disebutkan, Humas DPR RI juga melaksanakan berbagai kegiatan edukasi lainnya, seperti:

- **Penyelenggaraan pameran** yang menampilkan sejarah legislatif Indonesia, peran serta anggota DPR, serta pencapaian-pencapaian DPR dalam berbagai bidang.
- **Workshop dan seminar** yang melibatkan masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum untuk membahas topik-topik terkini mengenai sistem pemerintahan Indonesia dan peran DPR dalam pembentukan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan DPR secara lebih mendalam kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran legislatif, serta mengubah persepsi negatif tentang DPR yang sering kali muncul di media sosial atau pemberitaan yang tidak selalu objektif.

3. Best Practices

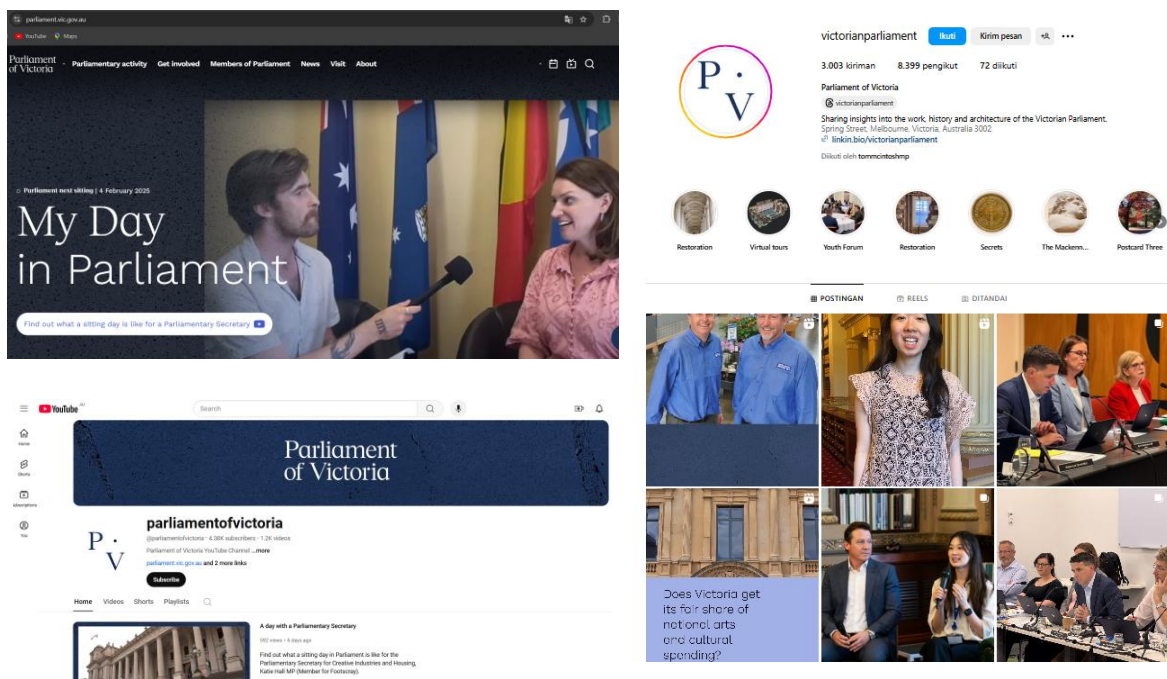
Selama mengikuti *Parliamentary Short Course* di Melbourne University, terdapat sejumlah pelajaran penting yang dapat diambil, baik dari segi teori maupun praktik yang

terkait dengan PR parlemen dan diplomasi parlemen. Beberapa pelajaran utama yang bisa diterapkan di Indonesia adalah:

a. Profesionalisme dalam PR Parlemen

Pentingnya pendekatan profesional dalam mengelola komunikasi publik menjadi hal yang sangat penting. Di Melbourne, banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam komunikasi parlemen. Hal ini mengingatkan kita bahwa PR parlemen tidak hanya bertugas untuk memberikan informasi tetapi juga untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara parlemen dan publik, media, serta lembaga-lembaga negara lainnya.

Melalui digital communication strategies yang lebih terintegrasi, seperti media sosial, website interaktif, dan *live streaming* untuk rapat-rapat parlemen, peningkatan transparansi dapat tercapai, yang pada gilirannya akan memperbaiki kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.



Gambar 3.5. Media social Parlemen Victoria

b. Pengelolaan Krisis dan Misinformasi

Krisis yang terjadi dalam PR parlemen dapat disebabkan oleh pernyataan anggota parlemen. Pernyataan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial dan politik ataupun yang bersifat spontan, kebijakan yang bersifat kontroversial, atau pemberitaan negatif dari media. Pembelajaran yang didapat adalah perlunya memiliki strategi komunikasi krisis yang kuat, dengan melibatkan jurnalis, media massa, dan pihak terkait lainnya untuk meredakan ketegangan dan memastikan penyampaian informasi yang jelas dan akurat.



Gambar 3.6. Hubungan Masyarakat Parlemen Victoria

4. Usulan rekomendasi

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama mengikuti Parliamentary Short Course dan menganalisis kondisi di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki PR parlemen dan diplomasi parlemen Indonesia:

a. Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi

Rekomendasi pertama adalah meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik melalui platform digital yang lebih efektif, termasuk penyebaran informasi secara real-time melalui media sosial dan website parlemen. Hal ini penting untuk memperbaiki kepercayaan publik dan meminimalisir misinformasi. Parlemen Australia memanfaatkan platform digital seperti situs web resmi, media sosial, dan siaran langsung untuk menjelaskan kebijakan mereka secara *real-time*. Anggota parlemen secara aktif menggunakan *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram* untuk memberikan informasi terbaru mengenai kebijakan yang sedang dibahas atau undang-undang yang sedang diusulkan. Ini memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

b. Pembentukan Tim PR Parlemen yang Profesional

Penting untuk membentuk tim PR parlemen yang terdiri dari profesional komunikasi seperti ahli komunikasi, *media relations*, dan *digital PR* yang dapat merancang strategi komunikasi yang lebih sistematis dan terarah. Pendekatan berbasis data dan analitik dapat digunakan untuk memahami persepsi publik dan menyesuaikan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Contoh implementasi yang relevan adalah strategi PR yang diterapkan oleh parlemen Australia. Di sana, anggota parlemen memiliki kontak langsung dengan media dan menggunakan platform digital untuk menjelaskan kebijakan mereka secara lebih transparan. Ini bisa diadaptasi oleh DPR RI untuk meningkatkan aksesibilitas informasi kepada publik, terutama melalui penyampaian informasi secara real-time.

Tim ahli ini juga harus didukung oleh pelatihan-pelatihan seperti pelatihan *media relations*, *crisis communication*, dan *digital PR* yang menjadi agenda penting dalam rangka memperkuat hubungan antara DPR dan publik.

c. Hubungan yang konstruktif antara Anggota dan Media

Anggota parlemen di Australia sering berkomunikasi langsung dengan wartawan dan media untuk menyampaikan pandangan, menjelaskan kebijakan yang sedang dijalankan, serta memberikan klarifikasi jika diperlukan. Ini menciptakan jalur komunikasi yang langsung antara parlemen dan masyarakat melalui media massa yang lebih luas. Selain itu, hal ini juga membantu mengurangi risiko mis-informasi yang dapat muncul di masyarakat.

d. Peningkatan Kapasitas Diplomasi Parlemen

Rekomendasi selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas diplomasi parlemen dengan mengirimkan anggota DPR untuk mengikuti program pelatihan diplomasi internasional, serta aktif dalam pertemuan internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum-forum global. Memperkuat peran Indonesia dalam AIPA, PAM, serta forum antar parlemen lainnya akan meningkatkan posisi Indonesia dalam perundingan internasional.

e. Kolaborasi dengan Media dan Lembaga Internasional

Mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan media internasional dan lembaga internasional lainnya dapat menjadi strategi untuk meningkatkan pengaruh dan citra positif DPR di dunia internasional.

f. **Pengembangan Sistem Pemantauan Opini Publik**

Untuk memperbaiki PR parlemen, penting juga untuk memiliki sistem pemantauan opini publik yang efektif. Ini akan memungkinkan DPR untuk mengetahui apa yang dipikirkan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil, serta memberikan feedback yang konstruktif untuk perbaikan.

B. FRAUD

Pencegahan dan pendeteksian *fraud* (penipuan) di Australia dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebijakan, sistem, metode, dan lembaga yang terlibat. Meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam mengurangi dan mengatasi praktik *fraud*, namun strategi menangani masalah ini dipengaruhi oleh konteks hukum, budaya, dan infrastruktur pemerintahan masing-masing, seperti yang dijabarkan pada penjelasan berikut ini:

1. Kondisi Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* di Australia

Kementerian atau departemen pemerintah di Australia, pada umumnya tidak memiliki Inspektorat dalam arti tradisional seperti di beberapa negara lain termasuk Indonesia, tetapi pengawasan atau *check and balance* dilakukan melalui regulator, audit independen, dan komite parlemen yang memantau kinerja kementerian dan departemen pemerintah, salah satunya mengadakan sesi dengar pendapat (*questioning*) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Struktur Pemerintahan Australia bersifat federal, dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah federal, negara bagian dan pemerintah lokal, masing-masing tingkat pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada parlemen atau masyarakatnya. Pengawasan lebih menitikberatkan pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik yang berfokus pada pencegahan korupsi dan peningkatan layanan kepada parlemen dan masyarakat. Lembaga pengawas di Australia seperti

VAGO dan ombudsman bersifat independen dari eksekutif/pemerintah karena bertanggung jawab langsung kepada parlemen yang membantu menjaga objektivitas dan akuntabilitas.

Pencegahan fraud di australia melibatkan kebijakan, sistem, dan kontrol internal yang diterapkan oleh organisasi atau lembaga pemerintah, sebagai berikut:

- a. Pencegahan Berbasis Kebijakan Nasional dan Pemerintah: Pemerintah Australia memiliki kebijakan dan peraturan yang sangat ketat terkait dengan pencegahan fraud, terutama dalam sektor publik. Misalnya, di tingkat federal, **Australian National Audit Office (ANAO)** berperan dalam memastikan adanya kontrol yang tepat di lembaga-lembaga pemerintah dan mengeluarkan panduan untuk pencegahan *fraud*.
- b. Framework Anti-Korupsi: Australia memiliki berbagai lembaga yang mendukung pencegahan fraud, termasuk **Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)** yang bertanggung jawab untuk mencegah korupsi di sektor penegakan hukum dan lembaga-lembaga terkait.
- c. **Victorian Auditor-General's Office (VAGO)** adalah lembaga independen yang memainkan peran kunci dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah di negara bagian Victoria, Australia. Melalui audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan, VAGO membantu memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan bahwa lembaga pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat Victoria. VAGO beroperasi secara independen, yang memastikan bahwa hasil auditnya objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau eksternal lainnya. VAGO sering berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi diterima dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan efektif.
- d. **Ombudsman Australia** adalah lembaga yang bertugas untuk menyelidiki keluhan dari warga negara terkait dengan tindakan atau kebijakan yang tidak adil, tidak transparan, atau tidak memadai yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Ombudsman Australia berperan sebagai pengawas yang independen untuk memastikan bahwa administrasi publik bekerja secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Ombudsman memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya dan warga negara memiliki saluran untuk menyuarkan keluhan mereka terkait administrasi publik.
- e. **IBAC (Independent Broad-based Anti-corruption Commission)** adalah lembaga yang ada di negara bagian Victoria, Australia, yang bertugas untuk menangani dan mencegah korupsi di sektor publik. Meskipun IBAC beroperasi di Victoria, fungsinya sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat negara bagian tersebut. IBAC dibentuk untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelidiki korupsi dalam sektor publik, termasuk di antara pejabat publik dan lembaga pemerintah di Victoria.
- f. Kontrol Internal dan Pelatihan: Banyak lembaga pemerintah di Australia mengimplementasikan sistem kontrol internal yang ketat dan memberikan pelatihan anti-fraud kepada karyawan dan pejabat publik untuk mendeteksi potensi fraud lebih awal.
- g. Penilaian Risiko Fraud: Lembaga-lembaga di Australia diharuskan melakukan penilaian risiko fraud secara berkala dan menyusun strategi pencegahan yang proaktif. Ini juga termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan menganalisis transaksi atau aktivitas yang mencurigakan.

Sistem politik Australia di tingkat federal maupun negara bagian, memiliki berbagai aturan dan mekanisme untuk menangani benturan kepentingan guna menjaga integritas parlemen salah satunya dengan melakukan deklarasi kepentingan pribadi, sebagai contoh: anggota parlemen diwajibkan mengungkapkan kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka dalam bentuk daftar kepentingan anggota parlemen (*Register of members interests*) mencakup informasi tentang bisnis yang dimiliki, keterlibatan dengan organisasi tertentu dan sumber pendapatan lainnya. apabila terdapat anggota parlemen memiliki kepentingan pribadi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas atau diputuskan, anggota tersebut diharapkan untuk mengundurkan diri dari diskusi atau pemungutan suara terkait isu. Deklarasi kepentingan pribadi tersimpan dalam daftar publik yang dapat diakses oleh masyarakat. selain itu parlemen australia memiliki kode etik, yang diharapkan setiap anggota parlemen untuk mengikuti pedoman perilaku etis yang menetapkan mereka harus bertindak dalam kepentingan publik dan menghindari pengaruh pribadi yang dapat merusak integritas atau kepercayaan publik. sedangkan pedoman benturan kepentingan untuk pegawai pemerintah di Australia, terdapat pedoman yang tercantum pada *Public Service Act 1999* (Federal) dimana pegawai pemerintahan diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan profesional dan dilarang terlibat dalam benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan objektif selain itu pegawai pemerintah diharuskan mengikuti *code of conduct* yang menerapkan prinsip-prinsip yang perilaku termasuk menghindari benturan kepentingan.

Anggota parlemen di Australia baik di tingkat federal maupun negara bagian memiliki kantor konstituen yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dengan warga di daerah pemilihannya, kantor ini biasanya berada di wilayah pemilihan mereka, di pusat kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan mekanisme pembayaran dilakukan langsung kepada pemilik properti yang disewakan, bukan dengan cara memberikan uang tunai kepada anggota parlemen. Kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan anggota parlemen di Australia relatif jarang dan sebagian besar berfokus pada penyalahgunaan dana atau fasilitas publik dan benturan kepentingan.

Penyediaan jamuan dalam rapat parlemen Australia dirancang untuk mendukung efisiensi kerja, kesederhanaan dan mematuhi kebijakan anggaran dan prinsip etika karena jamuan menggunakan dana publik sehingga pengelolaan anggarannya sangat ketat untuk memastikan akuntabilitas. Terdapat beberapa jenis jamuan dalam konteks parlemen di australia yaitu:

- a. Jamuan pada rapat komite parlemen, hanya berupa jamuan ringan seperti kopi, teh dan makanan kecil yang disediakan untuk anggota parlemen dan staf selama rapat komite berlangsung.
- b. Jamuan pada debat (*questioning*) atau sidang parlemen, pada kegiatan ini, jamuan ringan tidak selalu disediakan, namun tersedia fasilitas kafetaria di gedung parlemen, dan pada umumnya pimpinan, perdana menteri dan anggota parlemen dapat membeli jamuan ringan di kafetaria tersebut dengan menggunakan uang pribadi.

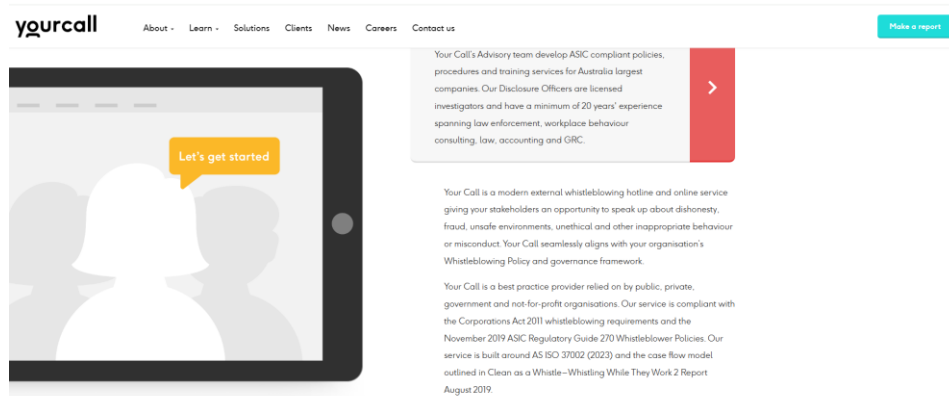
Implementasi *Whistleblowing System* yang berhasil di Pemerintahan Australia

Whistleblowing (pelaporan pelanggaran) merupakan media yang paling efektif dalam mendeteksi fraud. *Whistleblowing* di Indonesia dan Australia memiliki beberapa

perbedaan mendasar, terutama dalam aspek regulasi, perlindungan pelapor, dan budaya pelaporan. Whistleblowing di pemerintahan Australia sangatlah independen dan efektif. Budaya pelaporan masih lemah di Indonesia karena stigma negatif terhadap pelapor, seperti dianggap “pengadu” atau “pembawa masalah.” Tingkat partisipasi rendah akibat rasa takut atau kurangnya kepercayaan pada sistem hukum.

Sedangkan Budaya *whistleblowing* di Australia lebih diterima karena masyarakat melihatnya sebagai tanggung jawab moral dan legal untuk mencegah pelanggaran. Tingkat partisipasi lebih tinggi karena sistem hukum dan perlindungan terhadap pelapor sudah matang.

Whistleblowing di Australia memiliki sistem yang lebih terstruktur, perlindungan yang lebih kuat, dan budaya yang lebih mendukung dibandingkan dengan di Indonesia. *Whistleblowing* di pemerintahan Australia sudah berdasarkan ISO 370002 yaitu tentang *Whistleblowing Management System*. *Whistleblowing* di Australia juga dapat diakses melalui *gadget* dan direspon secara cepat dan tersedia selama 24 jam.



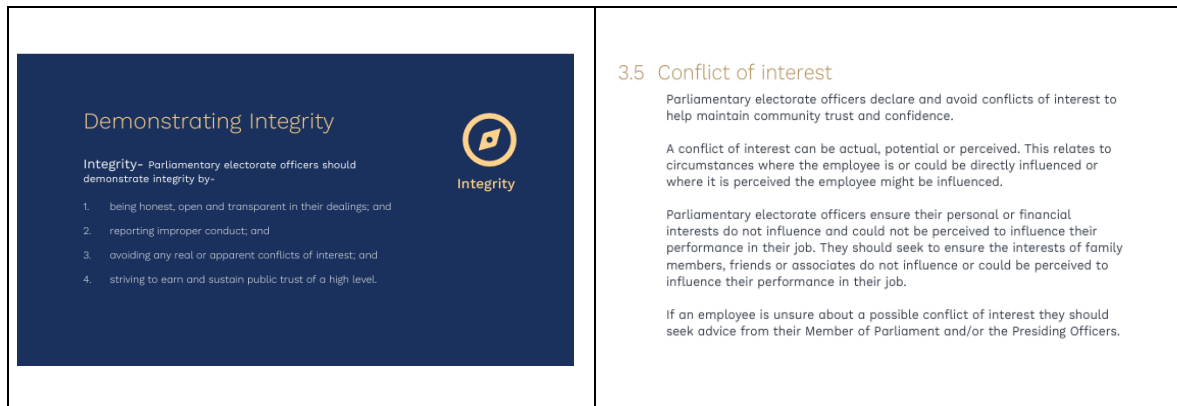
Gambar 3.7. Sistem *Whistleblowing* di Australia

Implementasi *code of conduct* dalam menghindari, melaporkan, dan mengelola konflik kepentingan

Australia telah mengembangkan sejumlah inovasi untuk mengatasi *conflict of interest* di pemerintahan, dengan pendekatan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Inovasi di Australia dalam mengatasi konflik kepentingan menggabungkan regulasi yang ketat, teknologi modern, dan budaya tata kelola yang tinggi. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Berikut beberapa inovasi yang digunakan pemerintah Australia dalam menghadapi adanya potensi *conflict of interest*:

1. **Deklarasi Kepentingan dan Kepemilikan atau Mandatory Disclosure of Interests** yaitu Pejabat publik, termasuk anggota parlemen dan eksekutif senior, diwajibkan untuk secara rutin mengungkapkan kepemilikan aset, saham, dan hubungan finansial melalui Register of Interests. Ini mencakup kepemilikan pribadi atau keluarga yang dapat menimbulkan konflik dengan tugas publik. Informasi ini biasanya tersedia untuk publik, memberikan transparansi tinggi.

2. **Real-Time Declaration:** Di beberapa kasus, pejabat diwajibkan melaporkan potensi konflik secara langsung jika muncul dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya melalui laporan berkala.
3. **Aturan dan Kebijakan Etika yang Ketat yaitu *APS Code of Conduct*:** Pegawai Negeri Australia tunduk pada Australian Public Service (APS) Code of Conduct, yang menetapkan standar tinggi untuk menghindari, melaporkan, dan mengelola konflik kepentingan.



Gambar 3.8. Australian Public Service (APS) Code of Conduct

2. Kondisi Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud* di Indonesia

Setiap Kementerian atau Lembaga pemerintah serta pemerintah pusat dan daerah di Indonesia memiliki **Inspektorat Jenderal/Utama/Daerah** yang bertugas sebagai unit pengawasan internal yang berperan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan kebijakan dijalankan oleh kementerian atau lembaga pemerintah sesuai aturan yang berlaku, efisien, efektif dan akuntabel. Hal tersebut berbeda dengan pemerintah Australia yang tidak memiliki Unit Pengawasan Internal pada setiap kementerian. Dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas, Indonesia memiliki badan pengawasan yang bertugas untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

- a. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** yang bertugas menangani fraud yang terkait dengan korupsi, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara dan merugikan keuangan negara. Kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, serta mengawasi sistem pengelolaan keuangan negara untuk mencegah tindakan fraud.
- b. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara termasuk mendeteksi dan melaporkan fraud keuangan. Kewenangan BPK adalah melakukan audit, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana negara, serta melaporkan hasil audit kepada DPR dan Instansi penegak hukum jika ditemukan indikasi fraud.
- c. **Ombudsman Republik Indonesia (ORI)** yang bertugas menangani fraud yang terkait maladministrasi dalam pelayanan publik. ORI memiliki kewenangan menangani laporan masyarakat tentang tindakan fraud atau pelayanan yang merugikan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk perbaikan atau penindakan.

- d. **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** yang bertugas mencegah dan mendeteksi fraud dalam pelaksanaan program pemerintah. BPKP berwenang melakukan audit internal terhadap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya fraud.

Struktur pemerintahan Indonesia menggunakan sistem kesatuan dengan desentralisasi, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi dalam beberapa bidang tetapi tetap tunduk pada kebijakan pusat. Pengawasan di Indonesia menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi, pencegahan korupsi, akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga pengawasan di Indonesia berada dibawah kendali pemerintah pusat sehingga cenderung tidak independen.

Parlemen di Indonesia yaitu DPR RI belum memiliki pedoman benturan kepentingan seperti di Australia, namun parlemen di Indonesia sudah memiliki peraturan tentang kode etik DPR RI yang tercantum pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Sedangkan untuk pegawai ASN di Setjen DPR RI Indonesia terikat oleh kode etik dan kode perilaku ASN BerAKHLAK yang tertuang dalam UU No. 5/2024 tentang ASN dan menerapkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Setjen DPR RI. Anggota DPR RI diberikan fasilitas rumah aspirasi oleh pemerintah sebagai wadah dimana anggota dewan dapat berkomunikasi dengan konstituennya, namun mekanisme pembayarannya berupa uang tunai yang dibayarkan dengan transfer kepada anggota DPR tersebut.

Berdasarkan data KPK sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2023, menyebutkan sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD, yang paling banyak terjadi adalah kasus suap pada pengadaan barang dan jasa. Tersedianya anggaran jamuan makan besar dan kecil yang relatif besar di DPR RI, karena baik rapat dengar pendapat maupun rapat paripurna disediakan makan besar dan snack sesuai standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk penerapan/implementasi *Whistleblowing System* Di Indonesia, meskipun mekanisme dasar sudah ada, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal perlindungan pelapor dan penguatan budaya pelaporan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Indonesia perlu memperbaiki regulasi, memperkuat perlindungan pelapor, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme *whistleblowing*.

3. Best Practices

Selama mengikuti *Parliamentary Short Course di Melbourne University*, ada sejumlah pelajaran penting yang dapat diambil, baik dari segi teori maupun praktik yang terkait tindak pencegahan dan pendeteksian *fraud* baik di pemerintahan Australia maupun dalam lingkup parlemen Australia. Beberapa pelajaran utama yang bisa diterapkan di Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya di Inspektorat Utama Setjen DPR RI adalah:

- a. Pengawasan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan Australia memiliki perbedaan dalam fokus, struktur dan pelaksanaannya, yang disebabkan oleh perbedaan sistem politik dan pemerintahan di kedua negara tersebut. Pemerintah Australia dan Parlemen Australia mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi secara ketat, hal tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintahan Australia

memiliki *code of conduct* secara detail yang mengatur, khususnya tentang *Whistleblowing System* dan *Conflict of Interest*.

- b. Dalam kegiatan di Parlemen Australia juga terdapat *Question Time* yaitu merupakan sesi resmi yang berlangsung setiap hari selama masa sidang parlemen, di mana para anggota parlemen, terutama dari pihak oposisi, dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pemerintah, yang kerap ditujukan kepada Perdana Menteri atau Menteri terkait. Sesi ini menjadi bagian penting dari sistem demokrasi parlementer Australia, karena memberikan kesempatan bagi parlemen untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah secara langsung. *Question Time* merupakan perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi Parlemen Australia karena memberikan peluang bagi anggota parlemen untuk mempertanyakan kebijakan, keputusan, atau tindakan pemerintah secara langsung di forum terbuka. Selain itu Jawaban dari pemerintah dicatat secara resmi dan biasanya disiarkan secara langsung, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan isu-isu politik terkini.
- c. Dalam kegiatan Parlemen Australia khususnya kegiatan persidangan berjalan sangat efektif dan efisien. Hal tersebut dapat terlihat bahwa selama kegiatan persidangan berlangsung tidak disediakan jamuan yaitu hanya minuman saja, dan kegiatan persidangan berjalan dengan tepat waktu.
- d. Kualitas auditor di Indonesia dan di Australia memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Australia lebih unggul dalam independensi, teknologi, dan budaya akuntabilitas. Sementara itu, Indonesia masih terus berupaya memperkuat kompetensi, integritas, serta independensi auditor dalam menghadapi tantangan birokrasi dan sistem yang kompleks. Auditor di Australia mengikuti standar tinggi yang ditetapkan oleh *Auditing and Assurance Standards Board (AUASB)*, serta panduan dari lembaga internasional seperti *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*. Di sektor publik, Australian National Audit Office (ANAO) berperan besar dalam memastikan akuntabilitas di seluruh tingkat pemerintahan.
- e. Auditor pemerintah, seperti *Auditor-General*, memiliki tingkat independensi yang tinggi, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Hal ini memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan tugas tanpa intervensi politik atau administratif. Sedangkan di Indonesia, independensi auditor seringkali menjadi isu, terutama untuk APIP yang berada di bawah instansi eksekutif. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas audit jika ada tekanan politik atau konflik kepentingan.
- f. Auditor di Australia telah mengadopsi teknologi canggih seperti *data analytics*, *artificial intelligence*, dan sistem manajemen audit digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Di Indonesia, penerapan teknologi audit juga mulai berkembang, terutama dengan sistem *e-government*. Namun, adopsi teknologi seringkali menghadapi kendala infrastruktur dan sumber daya manusia.

4. Usulan rekomendasi

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama mengikuti *Parliamentary Short Course* dan menganalisis kondisi di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas kinerja di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi dengan standar audit berbasis global untuk mengambil sertifikasi internasional seperti *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Fraud Examiner (CFE)*, atau sertifikasi audit publik lainnya. Melakukan

peningkatan pelatihan di bidang audit kinerja, audit berbasis risiko, dan audit IT. Pelatihan berbasis kasus nyata dari sektor publik akan memberikan wawasan praktis. Melakukan *benchmarking* yaitu dengan program pertukaran atau kunjungan kerja dengan lembaga audit di Australia, seperti *Australian National Audit Office (ANAO)*, atau menjalin kerjasama dengan ANAO untuk memahami praktik terbaik mereka.

- b. Inspektorat Utama mulai memajukan secara serius praktik *whistleblowing system* yang telah dimiliki, baik dalam segi kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas *whistleblower*, dari segi independensi, maupun dari segi peningkatan teknologi agar dapat dengan mudah diakses.
- c. Inspektorat Utama perlu meningkatkan mekanisme secara rinci atas monitoring *conflict of interest* dalam bentuk kebijakan atau *code of conduct conflict of interest* seperti pada Pemerintahan Australia.
- d. Inspektorat Utama perlu melakukan peningkatan penerapan teknologi dan data analisis dengan menggunakan perangkat lunak audit modern untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar secara efisien serta menerapkan teknik *data analytics* untuk mendeteksi anomali, mengidentifikasi risiko, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti.
- e. Inspektorat Utama perlu fokus terhadap peningkatan kualitas audit kinerja (*Performance Audit*) selain audit kepatuhan, auditor pemerintah harus fokus pada evaluasi dan kinerja apakah program kerja di lingkungan Setjen DPR RI memberikan hasil sesuai tujuan dengan efisiensi.
- f. Menginisiasi pemerintah untuk membentuk badan yang memiliki peranan seperti Parliamentary Budget Office yang diberikan independensi dalam memberikan kajian dan analisis atas setiap kebijakan publik yang diambil. Hal ini dapat dimulai dari internal DPR RI, untuk memiliki unit kerja yang memberikan masukan kepada Anggota DPR RI dalam bentuk evidence-based dan kajian yang bersifat ilmiah menggunakan instrumen asumsi dan penghitungan yang bebas dari intervensi dan kepentingan tertentu.
- g. Menggiatkan program-program yang dapat mendekatkan Parlemen dan Pemerintah dengan masyarakat. Keterbukaan informasi, transparansi, edukasi masyarakat, diharapkan dapat menumbuhkan citizen's engagement dan kepercayaan publik, sehingga masyarakat dapat menjalankan peran pengawasan kepada Parlemen dan Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- h. Keterbukaan publik dapat ditunjukkan dengan dipublikasikannya setiap hasil kerja yang dilakukan oleh Parlemen dan Pemerintah kepada masyarakat secara tepat waktu dan relevan.

C. BUDGETING

1. Sistem Budgeting di Parlemen Australia

Sistem penganggaran di Parlemen Australia adalah proses yang komprehensif dan terstruktur dengan baik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab fiskal. Pada intinya, sistem ini berfokus pada persiapan, penyajian, dan persetujuan anggaran federal, yang menguraikan rencana keuangan pemerintah untuk tahun fiskal yang akan datang. Proses ini dimulai pada bulan November dengan perencanaan awal dan pembaruan estimasi, diikuti dengan pengajuan anggaran dari berbagai lembaga pada bulan Februari. Komite Tinjauan Pengeluaran, yang merupakan komite kabinet, kemudian meninjau pengajuan ini pada bulan Maret untuk menentukan alokasi pendanaan.

Salah satu fitur utama dari sistem penganggaran Australia adalah *Parliamentary Budget Office* (PBO), sebuah lembaga independen dan non-partisan yang didirikan pada tahun 2012 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal. PBO menyediakan layanan penting seperti perhitungan biaya kebijakan, pelaporan komitmen pemilu, dan analisis fiskal independen, yang mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi oleh anggota parlemen dan berkontribusi pada pemahaman publik tentang masalah anggaran. Lembaga ini memainkan peran vital dalam menciptakan keseimbangan antara pemerintah dan partai oposisi dengan menawarkan akses kepada layanan perhitungan dan analisis yang sebelumnya hanya tersedia untuk pemerintah.

Anggaran tradisionalanya disampaikan kepada Parlemen pada hari Selasa kedua di bulan Mei, menandai awal periode pengawasan parlemen yang intensif. Anggota Parlemen terlibat aktif dalam proses penganggaran melalui persetujuan anggaran, kerja komite, dan kekuasaan untuk mengusulkan amandemen. Komite-komite khusus, seperti Komite Keuangan dan Administrasi Publik, melakukan pemeriksaan mendetail terhadap anggaran, termasuk dengar pendapat dan pengumpulan bukti dari berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan parlemen ini memastikan bahwa anggaran sesuai dengan kepentingan publik dan menjaga akuntabilitas pemerintah.

Transparansi merupakan ciri khas dari sistem penganggaran Australia, dengan negara ini memperoleh skor 79 dari 100 dalam Survei Anggaran Terbuka 2021. Pemerintah merilis dokumen dan laporan anggaran yang komprehensif untuk menginformasikan publik dan pemangku kepentingan tentang kebijakan dan keputusan fiskal. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam partisipasi publik, seperti yang ditunjukkan oleh skor yang lebih rendah, yaitu 37 dari 100 dalam area ini. Upaya untuk meningkatkan keterlibatan publik mencakup pengajuan pra-anggaran dan konsultasi kebijakan, meskipun saat ini masih terbatas dalam jangkauan.

Siklus penganggaran berlanjut sepanjang tahun dengan dirilisnya Mid-Year Economic and Fiscal Outlook (MYEFO) pada bulan Desember, yang memberikan informasi terkini tentang posisi fiskal pemerintah. Siklus ini ditutup dengan laporan Hasil Anggaran Akhir, yang dirilis paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun fiskal, yang merinci hasil fiskal akhir berdasarkan standar pelaporan eksternal.

Jika dibandingkan dengan negara lain, sistem Australia memiliki kesamaan dengan parlemen bergaya Westminster lainnya tetapi memiliki fitur khas, seperti PBO, yang merupakan bagian dari tren global untuk mendirikan lembaga fiskal independen. Meskipun sistem ini kuat, ada diskusi yang terus berlangsung tentang potensi perbaikan, seperti menerbitkan pernyataan pra-anggaran dan meningkatkan analisis distribusi dalam dokumen anggaran untuk lebih menginformasikan debat publik.

Parlemen Victoria memiliki beberapa kekhususan dibandingkan dengan parlemen Australia pada umumnya. Parlemen Victoria memiliki sistem penganggaran yang lebih terdesentralisasi, di mana pemerintah negara bagian memiliki otonomi lebih besar dalam menentukan prioritas dan alokasi anggaran. Hal ini memungkinkan Parlemen Victoria untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan isu-isu spesifik yang dihadapi oleh masyarakat di negara bagian tersebut. Selain itu, Victoria juga memiliki proses konsultasi yang lebih intensif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan anggaran, yang menciptakan rasa keterlibatan dan kepemilikan di kalangan warga. Kekhususan lain dari sistem di Victoria adalah adanya komite anggaran yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Komite ini berperan penting dalam memastikan bahwa anggaran yang disetujui digunakan

secara efisien dan efektif, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, sistem penganggaran parlemen Australia mencerminkan pendekatan canggih terhadap manajemen fiskal, menyeimbangkan kebutuhan untuk pengendalian pemerintah dengan pengawasan parlemen dan transparansi publik. Sistem ini memberikan fondasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang terinformasi dan tanggung jawab fiskal, meskipun upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dapat lebih memperkuat efektivitasnya dalam melayani masyarakat Australia.

2. Sistem Budgeting di Parlemen Indonesia

Sistem penganggaran di internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan proses yang terstruktur dan melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel. Proses ini dimulai dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) DPR yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggaran ini mencakup semua kebutuhan operasional dan kegiatan DPR, termasuk gaji anggota, biaya perjalanan dinas, serta pengeluaran untuk kegiatan legislasi dan pengawasan.

Setelah RAPB disusun, dokumen tersebut diajukan kepada pimpinan DPR untuk dibahas lebih lanjut. Pimpinan DPR kemudian mengkoordinasikan pembahasan anggaran ini dengan komisi-komisi yang ada di DPR, di mana masing-masing komisi memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan masukan terkait alokasi anggaran yang diajukan. Proses ini melibatkan diskusi dan negosiasi antara anggota DPR untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan dan prioritas lembaga dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Setelah melalui proses pembahasan dan revisi, RAPB DPR disetujui dalam rapat paripurna DPR. Anggaran yang telah disetujui kemudian menjadi anggaran yang berlaku untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Selama pelaksanaan anggaran, DPR juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran melalui laporan berkala yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal. Laporan ini mencakup realisasi anggaran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, yang memungkinkan DPR untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara spesifik, Indonesia tidak memiliki lembaga penganggaran yang terpisah dan independen seperti PBO. Namun, Sekretariat Jenderal DPR RI sendiri didukung oleh salah satu pusat yang memiliki institusi serta fungsi yang sama dengan Australian PBO yakni Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN DPR RI). PA3KN DPR RI berangkat dari visi misi yang sama dengan PBO di negara lain termasuk di Australia bahwa anggota DPR perlu diperkaya dengan dukungan substansi yang independen dan nonpartisan khususnya terkait anggaran. Tantangan PA3KN sendiri sebagai institusi pendukung substansi anggaran di parlemen Indonesia adalah: Data Komprehensif yang masih sangat terbatas, serta pengambilan keputusan yang masih dipengaruhi dominasi politik. Selain itu, cakupan produk dan analisis yang dilakukan oleh PA3KN masih belum secara spesifik mengakomodasi analisis terkait kebijakan pada masa-masa *pre-election*, dan lebih fokus kepada bagaimana anggota ataupun partai yang “telah terpilih” dapat bekerja secara optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya.

3. Best Practices

Sistem penganggaran di parlemen Australia memberikan sejumlah pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan anggaran di negara lain, termasuk Indonesia. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran. Dengan adanya lembaga seperti *Parliamentary Budget Office* (PBO), yang menyediakan analisis independen dan objektif, proses penganggaran menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memungkinkan anggota parlemen dan publik untuk memahami dan mengevaluasi keputusan anggaran secara lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penganggaran juga menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Melibatkan anggota parlemen dari berbagai komisi dalam pembahasan anggaran memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat diperhatikan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di kalangan anggota parlemen terhadap anggaran yang disetujui.

Pelajaran lain yang dapat diambil adalah pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan adanya laporan berkala dan audit oleh lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga anggaran tetap relevan dengan kondisi yang berubah.

4. Usulan Rekomendasi

Berdasarkan sistem penganggaran di Parlemen Australia, berikut adalah rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem budgeting di DPR RI:

- a. Memperkuat fungsi Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai sistem pendukung DPR RI yang independen dan non-partisan untuk menyediakan analisis fiskal dan kebijakan anggaran secara objektif. Dengan memperluas cakupan analisisnya, termasuk analisis kebijakan pra-pemilu (pre-election policy costing), PA3KN dapat membantu anggota DPR membuat keputusan yang lebih teknokratis serta meningkatkan transparansi dalam proses penganggaran. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi dominasi politik dalam pengambilan keputusan anggaran.
- b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Sistem penganggaran di Australia menekankan transparansi dengan menyediakan dokumen anggaran yang komprehensif dan mudah diakses oleh publik. Indonesia dapat mengadopsi praktik ini dengan memastikan bahwa semua dokumen anggaran, termasuk laporan realisasi anggaran, tersedia secara terbuka untuk masyarakat. Selain itu, audit berkala oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diperkuat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan prinsip akuntabilitas.
- c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Penganggaran
Salah satu kelemahan dalam sistem penganggaran di Indonesia adalah minimnya keterlibatan publik. Indonesia dapat belajar dari Parlemen Victoria, yang memiliki proses konsultasi intensif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam tahap awal penyusunan anggaran, seperti

melalui pengajuan pra-anggaran atau forum konsultasi publik, DPR dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat.

d. Memperkuat Peran Komite dalam Pengawasan Anggaran

Di Australia, komite-komite khusus seperti Komite Keuangan dan Administrasi Publik memainkan peran penting dalam memeriksa dan mengevaluasi anggaran. Indonesia dapat memperkuat peran komisi-komisi di DPR dalam pengawasan anggaran dengan memberikan mereka akses ke data yang lebih komprehensif dan dukungan analisis dari PA3KN. Komisi-komisi ini juga dapat mengadakan lebih banyak dengar pendapat dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif.

e. Mengurangi Dominasi Politik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran

Salah satu tantangan utama dalam sistem penganggaran di Indonesia adalah pengaruh politik yang kuat dalam pengambilan keputusan. Dengan memperkuat independensi PA3KN dan memastikan bahwa analisis anggaran didasarkan pada data dan fakta yang objektif, DPR dapat mengurangi pengaruh politik dalam proses penganggaran. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penganggaran di Indonesia.

f. Meningkatkan Kapasitas Data dan Analisis

PA3KN menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan data yang komprehensif. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu membangun sistem data yang lebih terintegrasi dan mendukung PA3KN dengan teknologi serta sumber daya manusia yang memadai. Dengan data yang lebih baik, PA3KN dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan relevan untuk mendukung fungsi anggaran DPR.

Dengan mengadopsi praktik terbaik dari sistem penganggaran di Parlemen Australia, Indonesia dapat menciptakan sistem budgeting yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga legislatif.

D. PERSIDANGAN

1. Sistem Persidangan di Parlemen Australia

Persidangan di Parlemen Australia memiliki struktur dan proses yang mencerminkan sistem pemerintahan Westminster. Struktur Parlemen Australia terdiri dari dua majelis yaitu House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Senat. House of Representative beranggotakan 151 anggota yang mewakili distrik pemilihan dan bertanggung jawab atas pengusulan dan pengesahan undang-undang. Pemerintah dibentuk di majelis ini dan Perdana Menteri berasal dari mayoritas partai atau koalisi. Sementara Senat beranggotakan 76 senator, masing-masing negara bagian diwakili oleh 12 senator, sementara wilayah teritorial memiliki 2 senator. Senat berfokus pada peninjauan undang-undang yang diajukan oleh House of Representatives.

Parlemen Australia menyelenggarakan beberapa sidang yang terdiri dari:

a. Sidang Legislasi

- 1) Membahas rancangan undang-undang (RUU)
- 2) Proses dimulai dari pengajuan, pembahasan, revisi hingga pengesahan

- 3) RUU dapat dimulai di *House of Representatives* atau Senat (kecuali undang-undang anggaran, yang harus dimulai di *House of Representatives*)
- b. Sidang Pertanyaan (Question Time)
 - 1) Sesi dimana anggota parlemen mengajukan pertanyaan pada Menteri pemerintah terkait kebijakan atau isu tertentu
 - 2) Bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah
- c. Sidang Komite. Komite menyelidiki isu-isu tertentu, meninjau legislasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Contohnya: Komite Anggaran, Komite Hukum atau Komite Lingkungan
- d. Sidang Debat
 - 1) Digunakan untuk diskusi tentang isu-isu penting, termasuk proposal kebijakan.
 - 2) Anggota parlemen menyampaikan pandangan mereka untuk memengaruhi pengambilan keputusan

Pada sesi pagi Kamis, 28 November 2024, para Delegasi diberikan penjelasan oleh Dr. Ali Reza Yunespour, yang menjabat sebagai Koordinator Magang Akademik dan Direktur Pembelajaran Terpadu Kerja (WIL) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Melbourne. Dalam kapasitas ini, beliau mengawasi program-program seperti Magang Parlemen dan Magang Urusan Masyarakat, berperan dalam koordinasi dengan pejabat dan staf parlemen untuk mengatur seminar dan penempatan, dan berpengalaman memberikan wawasan tentang cara kerja parlemen dan urusan masyarakat. Pada sesi ini, para delegasi mengikuti sesi yang berfokus pada fungsi dan pentingnya komite parlemen dalam kerangka legislative Victoria. Para delegasi memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang cara kerja komite-komite ini, peran mereka dalam meneliti peraturan perundang-undangan, dan dampaknya terhadap tata kelola.

Fungsi utama komite-komite di Parlemen Australia meliputi:

- a. Dukungan Pengembangan Kebijakan: Komite membantu proses pengembangan kebijakan dengan menyelidiki permasalahan dan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung menteri dalam mendorong proposal kebijakan baru. Rekomendasi bulat dari sebuah komite dapat memperkuat argumen seorang menteri dalam diskusi kabinet.
- b. Penetapan Agenda: Komite dapat mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah melalui penyelidikan dan peninjauan, sehingga berperan dalam menentukan permasalahan mana yang diprioritaskan untuk tindakan pemerintah.
- c. Penilaian Legislatif: Komite memeriksa usulan undang-undang, merekomendasikan amandemen, dan melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang ada. Hal ini termasuk meneliti pelaksanaan keputusan dan menilai kinerja badan publik.
- d. Konsultasi Publik: Komite berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan mewakili pandangan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Mereka terlibat dalam konsultasi dengan kepentingan masyarakat, memastikan bahwa pengambilan kebijakan didasarkan pada opini publik.
- e. Evaluasi Implementasi Kebijakan: Komite meninjau efektivitas implementasi kebijakan, memberikan pengawasan dan akuntabilitas terhadap administrasi publik dan kinerja lembaga pemerintah.
- f. Komunikasi dan Interaksi: Komite memfasilitasi komunikasi antara anggota parlemen dan masyarakat, sehingga memungkinkan masukan publik mengenai masalah legislasi dan kebijakan. Interaksi ini dipandang penting bagi proses demokrasi partisipatif.

Komite di Parlemen Australia mempengaruhi kebijakan publik melalui laporan dan rekomendasinya melalui beberapa cara utama, diantaranya:

- a. Memberikan Rekomendasi Berbasis Bukti: Komite melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para ahli, anggota masyarakat, dan pejabat pemerintah. Temuan-temuan dari penyelidikan ini dikumpulkan menjadi laporan-laporan yang menawarkan rekomendasi-rekomendasi yang telah diteliti dengan baik untuk perubahan atau perbaikan kebijakan.
- b. Membentuk Agenda Kebijakan: Dengan mengidentifikasi dan menyoroti isu-isu tertentu melalui laporan mereka, komite dapat memberikan perhatian pada topik-topik yang mungkin tidak diperhatikan oleh pemerintah. Fungsi penetapan agenda ini dapat membuat pemerintah memprioritaskan isu-isu tertentu untuk diambil tindakannya, sehingga mempengaruhi lanskap kebijakan secara keseluruhan.
- c. Memfasilitasi Konsensus: Komite sering kali berupaya membangun konsensus di antara anggota partai politik yang berbeda. Laporan yang diterima dengan suara bulat atau mayoritas dapat memberikan bobot yang signifikan terhadap rekomendasi tersebut, sehingga lebih besar kemungkinannya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan melaksanakannya.
- d. Meningkatkan Akuntabilitas: Melalui pengawasan mereka terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah, komite menjaga akuntabilitas pemerintah. Laporan mereka sering kali mencakup evaluasi implementasi kebijakan dan rekomendasi perbaikan, yang dapat menekan pemerintah untuk mengambil tindakan atas kekurangan yang teridentifikasi.
- e. Mempengaruhi proses legislatif. Komite memainkan peran penting selama tahap legislatif dengan meninjau rancangan undang-undang yang diusulkan dan menyarankan amandemen. Rekomendasi mereka dapat menghasilkan perubahan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kebutuhan dan keprihatinan masyarakat, sehingga berdampak langsung pada kebijakan publik.
- f. Melibatkan Masyarakat: Dengan melibatkan masyarakat dalam penyelidikan dan konsultasi, komite memastikan bahwa opini dan kekhawatiran masyarakat tercermin dalam laporan mereka. Keterlibatan ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik.

2. Sistem Persidangan di Parlemen Indonesia

Persidangan yang dilakukan oleh DPR RI merujuk pada kegiatan resmi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. DPR RI menyelenggarakan persidangan berdasarkan Masa Sidang, yang diatur dalam satu tahun sidang. Dalam satu tahun, terdapat empat masa sidang dan satu masa reses setelah setiap masa sidang.

Masa Sidang adalah periode dimana Anggota DPR RI bekerja di parlemen baik dalam sidang pleno, rapat komisi, maupun alat kelengkapan lainnya. Sementara masa reses adalah waktu ketika Anggota DPR RI turun ke daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat. Persidangan DPR RI terdiri dari beberapa jenis yaitu:

a. Sidang Paripurna

Rapat Paripurna DPR RI adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. Penjadwalan dan acara Rapat Paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat

Badan Musyawarah (BAMUS) atau Rapat Konsultasi pengganti Rapat BAMUS antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, atau Rapat Paripurna itu sendiri. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR. Setiap Rapat Paripurna DPR RI diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota. Dalam setiap pembukaan Rapat Paripurna DPR RI, lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan. Selama penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR RI, dilarang mengadakan rapat atau kegiatan lain.

Dalam hal tertentu, dapat diselenggarakan Rapat Paripurna Luar Biasa dilaksanakan dalam masa reses. Rapat Paripurna Luar Biasa dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan BAMUS atau Rapat Konsultasi. Rapat Paripurna Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh:

- 1) Presiden;
- 2) Pimpinan alat kelengkapan DPR;
- 3) Pimpinan Fraksi; atau
- 4) Anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

b. Rapat Komisi

Rapat komisi dilakukan oleh masing-masing komisi DPR sesuai bidangnya (seperti Komisi I untuk pertahanan dan luar negeri, Komisi XI untuk keuangan, dll). Agenda rapat komisi meliputi: pembahasan rancangan undang-undang (RUU), pengawasan terhadap kinerja kementerian/lembaga yang menjadi mitra, dan pembahasan isu spesifik terkait bidang masing-masing

c. Rapat Badan (Alat Kelengkapan Dewan)

Rapat Badan (Alat Kelengkapan Dewan) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR seperti Badan Legislasi (Baleg) yang membahas rancangan undang-undang sebelum masuk ke sidang paripurna, dan Badan Anggaran (Banggar) yang membahas RAPBN bersama pemerintah. Ada pula Sidang Gabungan yang melibatkan dua atau lebih komisi yang membahas isu lintas bidang atau lintas sektor.

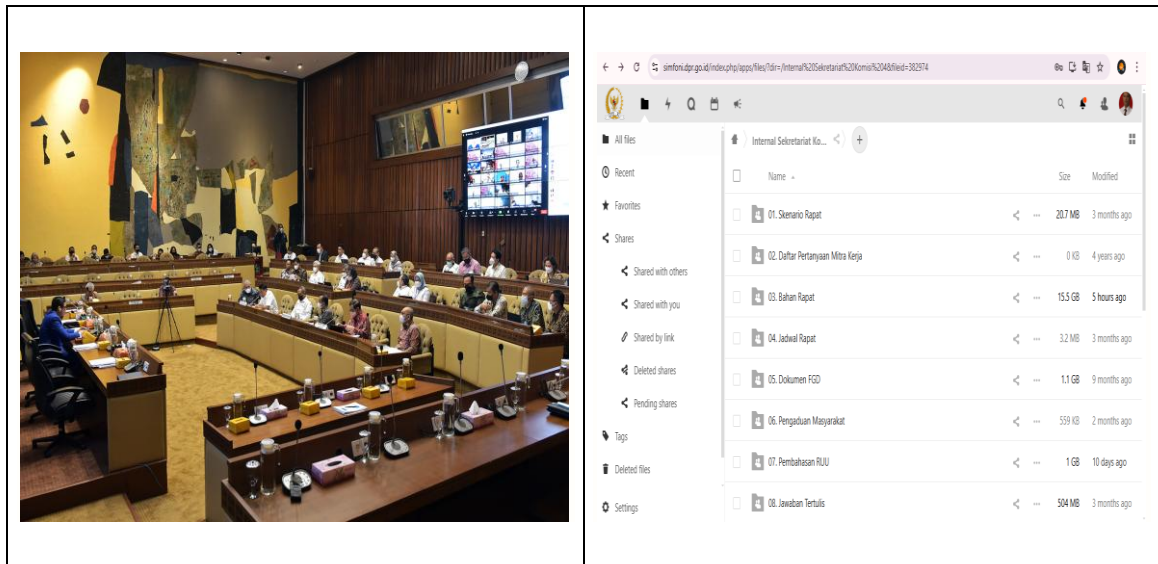
d. Sidang Gabungan.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat di lingkungan DPR RI, seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk Pimpinan DPR RI, diatur secara jelas dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Peraturan ini mencakup pengaturan secara sistematis dan detail mengenai seluruh tahapan rapat, mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut pasca-sidang. Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas persidangan, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui unit kerja terkait, yaitu Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan, memiliki peran strategis dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan rapat. Persiapan tersebut meliputi, antara lain:

- a. Penyusunan dan distribusi surat undangan kepada peserta rapat,
- b. Penyediaan bahan rapat yang disusun oleh narasumber terkait sesuai agenda, dan
- c. Fasilitasi kebutuhan konsumsi berupa jamuan yang disediakan untuk mendukung kenyamanan peserta selama rapat berlangsung.

Proses penyampaian bahan rapat beserta undangan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Masing-masing Sekretariat AKD menyampaikan dokumen tersebut melalui aplikasi WhatsApp dan SIMFONI (Sistem Informasi Forum

Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja), yang memungkinkan distribusi informasi berjalan lebih efisien, cepat, dan terintegrasi.

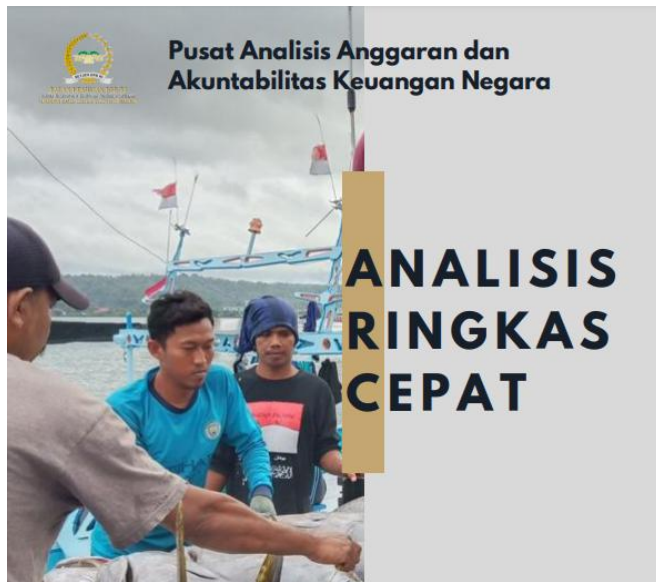


Gambar 3.9. Proses penyampaian bahan rapat melalui aplikasi

Dalam rangka mendukung kinerja Anggota DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Badan Keahlian (BK) telah menerbitkan berbagai produk substansi yang disusun oleh Pejabat Fungsional di bawah Pusat-Pusat Kajian yang berada dalam struktur Badan Keahlian. Produk-produk tersebut mencakup:

1. Kajian analisis substansi masing-masing bidang yang berupa jurnal, info singkat, buku, serta policy brief yang dipublikasikan oleh Pusat Analisis Keparlemenan.
2. Analisis pembahasan penggunaan APBN pada seluruh mitra kerja yang dipublikasikan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN).
3. Naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang.
4. Kajian terkait pemantauan dan pelaksanaan undang-undang yang dipublikasikan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Produk-produk ini disusun secara komprehensif untuk memberikan dukungan berbasis keahlian yang mendalam dan terstruktur, sehingga dapat memperkuat peran Anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal.



Gambar 3.10. produk substansi untuk mendukung kinerja Anggota DPR RI

Perbandingan antara Komite Parlemen Victoria dan Komisi Parlemen Indonesia Persamaan:

Baik di Parlemen Victoria maupun di Parlemen Indonesia, Komite dan Komisi memiliki tugas utama untuk melakukan penyelidikan terkait kebijakan dan pelaksanaan undang-undang serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Keduanya juga memiliki mekanisme untuk mengundang masukan dari publik dan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil investigasi. Dalam kedua sistem ini, proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan cara yang lebih terbuka dan akuntabel.

Perbedaan

Laporan hasil investigasi di Komite Parlemen Victoria dipublikasikan secara terbuka untuk umum, dan pemerintah diberikan waktu enam bulan untuk memberikan tanggapan. Di sisi lain, laporan hasil investigasi di Komisi Parlemen Indonesia lebih terbatas pada internal dan tidak selalu dipublikasikan secara

terbuka untuk umum, tergantung pada kebijakan pimpinan Komisi.

Lesson Learned:

Lesson Learned untuk Indonesia antara lain Penyusunan Laporan hasil Investigasi yang Lebih Terbuka. Komisi pada Parlemen Indonesia diharapkan dapat mempublikasikan laporan hasil investigasi Komisi secara lebih terbuka dan mengharuskan Pemerintah untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu tertentu, misalnya enam bulan. Hal Ini akan mempercepat implementasi rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas.

3. Best Practices

Selama mengikuti pembelajaran tentang persidangan, baik di dalam kelas maupun saat mengunjungi kantor Parlemen Victoria, penulis memperoleh berbagai pengetahuan baru yang memperkaya pemahaman mengenai proses legislatif dan praktik parlementer. Adapun hal-hal utama yang dipelajari meliputi:

1. Efisiensi dalam proses persidangan

Pengamatan terhadap *Question Time* di Parlemen Victoria menunjukkan pentingnya memulai sidang langsung ke agenda inti tanpa pembukaan atau sambutan yang panjang. Implementasi ini dapat mempercepat proses persidangan di DPR RI, sehingga waktu sidang lebih fokus pada diskusi substansial.

2. Transparansi dan Akuntabilitas melalui *Question Time*

Question time di Parlemen Victoria memberikan kesempatan bagi Anggota Legislatif untuk secara langsung mempertanyakan kebijakan eksekutif. Format ini memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. DPR RI dapat mengadopsi format serupa dengan alokasi waktu khusus untuk tanya jawab langsung dengan menteri, yang dilakukan secara reguler dan disiarkan kepada publik.

3. Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Proses Legislatif

Observasi penggunaan teknologi canggih di Parlemen Victoria dapat diterapkan di DPR RI. Sistem digital untuk distribusi dokumen, pengelolaan jadwal, dan voting elektronik akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.

4. Keterlibatan Publik dalam Proses Legislatif

Parlemen Victoria mengintegrasikan partisipasi publik melalui konsultasi daring dan acara keterbukaan publik. DPR RI dapat meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui platform digital, seperti portal konsultasi daring untuk menerima masukan terkait rancangan undang-undang.

5. Pengelolaan Waktu yang Lebih Ketat

Parlemen Victoria menerapkan aturan ketat terkait alokasi waktu berbicara bagi anggota parlemen. Hal ini mengurangi perdebatan yang berlarut-larut. DPR RI dapat memperkenalkan sistem serupa untuk memastikan setiap anggota memiliki waktu yang adil dan sidang berjalan lebih efektif.

6. Budaya Diskusi yang Konstruktif

Pengamatan terhadap budaya diskusi di Parlemen Victoria menunjukkan bahwa perbedaan pendapat disampaikan dengan fokus pada substansi kebijakan, bukan serangan pribadi. DPR RI dapat mempromosikan budaya diskusi yang lebih

berorientasi pada hasil, dengan memberikan pelatihan kepada anggota parlemen tentang retorika yang konstruktif.

7. Peningkatan Kapasitas Staf Pendukung

Staf pendukung di Parlemen Victoria memainkan peran besar dalam riset dan penyusunan dokumen legislasi. DPR RI dapat meningkatkan pelatihan bagi staf pendukung seperti Tenaga Ahli maupun PNS di Badan Keahlian Setjen DPR RI agar lebih profesional dan mampu memberikan analisis kebijakan yang mendalam untuk membantu anggota parlemen.

8. Penerapan Sistem Evaluasi Kinerja

Parlemen Victoria memiliki mekanisme evaluasi kinerja untuk anggota dan lembaga. DPR RI dapat mengadopsi sistem ini untuk mengukur sejauh mana kinerja anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

9. Penyederhanaan Tata Cara Persidangan

Parlemen Victoria mengadopsi tata cara yang sederhana dan tidak terlalu birokratis. DPR RI dapat mengevaluasi tata tertib persidangan untuk menyederhanakan prosedur administrasi yang seringkali memperlambat jalannya sidang.

10. Pembelajaran dan Pertukaran Pengalaman Internasional

Partisipasi aktif dalam kursus dan kunjungan seperti ini memberikan wawasan baru yang dapat diterapkan di DPR RI. Mengadakan program pelatihan serupa secara berkala bagi anggota dan staf DPR RI akan memperkaya pengalaman mereka dan mendorong inovasi dalam praktik parlementer.

Dengan mengadaptasi praktik-praktik terbaik dari Parlemen Victoria dan pembelajaran di kelas Short Course ini, DPR RI diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih modern, dinamis dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Protokol persidangan yang tertib dan teratur di Parlemen Victoria

Proses persidangan di Parlemen Victoria dijalankan dengan sangat tertib dan teratur, mencerminkan profesionalisme dan komitmen terhadap tata kelola yang baik dalam sistem demokrasi parlementer. Seluruh anggota parlemen diatur dengan seksama dalam hal posisi duduk dan ketepatan waktu, memastikan bahwa setiap sesi dimulai tepat waktu dan berlangsung tanpa gangguan. Keputusan ini mengedepankan efisiensi dalam bekerja, yang sekaligus menunjukkan rasa hormat terhadap waktu dan proses legislasi yang harus dijalankan dengan sistematis.

Selain itu, tata tertib persidangan juga mencakup penghormatan yang tinggi terhadap ketua rapat (Speaker) yang memimpin sidang. Ketua rapat memiliki peran penting dalam menjaga agar diskusi tetap fokus dan sesuai dengan aturan. Selama sesi berlangsung, semua anggota parlemen, meskipun kadang ada ketidakpuasan terhadap jawaban dari pemerintah, tetap menjaga sikap sopan santun. Mereka tidak mengganggu jalannya rapat dan mengikuti proses sesuai dengan aturan yang ada, seperti mengangkat tangan untuk mendapatkan giliran berbicara dan tidak melakukan interupsi yang tidak relevan.

Dalam situasi tertentu, apabila ada ketidakpuasan terhadap jawaban atau kebijakan pemerintah, anggota parlemen diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan

lanjutan atau bahkan mengusulkan mosi yang dapat dibahas lebih lanjut. Namun, meskipun ada ketegangan atau perbedaan pendapat, seluruh proses persidangan tetap berjalan dengan penuh rasa hormat dan mengedepankan dialog konstruktif. Keberhasilan sistem ini didukung oleh aturan formal yang tercatat dalam *Standing Orders*, yang mengatur semua aspek dari jalannya rapat hingga interaksi antaranggota.



Gambar 3.11. proses persidangan di Parlemen Victoria

4. Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama mengikuti *Parliamentary Short Course* dan menganalisis kondisi di Indonesia, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas kinerja di Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut :

1. **Digitalisasi Dokumen Legislasi**

Mengembangkan sistem berbasis digital untuk pengelolaan dokumen legislasi, termasuk rancangan undang-undang, risalah rapat, dan laporan pembahasan. Ini akan mempercepat distribusi dokumen kepada anggota parlemen dan publik.

2. **Penguatan Analisis Kebijakan**

Memberikan pelatihan lanjutan kepada staf untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyediakan analisis kebijakan yang komprehensif dan berbasis data. Ini akan membantu anggota DPR dalam proses pengambilan keputusan.

3. **Peningkatan Transparansi Proses Legislasi**

Mengadopsi platform daring yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan RUU secara real-time, termasuk jadwal pembahasan dan hasil keputusan. Transparansi ini dapat memperkuat legitimasi proses legislasi.

4. **Penerapan Kerangka Waktu yang Ketat**

Menyusun dan memonitor jadwal pembahasan RUU secara ketat agar tidak ada pembahasan yang berlarut-larut. Sistem *tracking* berbasis teknologi dapat membantu memastikan setiap RUU selesai tepat waktu.

5. **Kerja Sama Internasional**

Menginisiasi kerja sama dengan parlemen negara lain, seperti Parlemen Victoria, untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat kapasitas staf pendukung dalam aspek legislasi.

Sementara untuk Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Efisiensi dalam Pelaksanaan Sidang**

Mengadopsi format persidangan yang langsung ke agenda utama, seperti yang dilakukan dalam *question time* di Parlemen Victoria. Ini akan mengurangi waktu yang terbuang pada pembukaan atau sambutan seremonial.

2. **Pengembangan Mekanisme *Question Time***

Membantu memfasilitasi pelaksanaan *question time* secara reguler di DPR RI, dengan memastikan agenda, dokumentasi, dan waktu pelaksanaan berjalan sesuai aturan yang transparan dan terstruktur.

3. **Peningkatan Kapasitas Moderator dan Staf Sidang**

Memberikan pelatihan kepada staf pendukung sidang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam moderasi dan pengelolaan waktu selama sidang, sehingga jalannya persidangan lebih efektif.

4. **Integrasi Teknologi dalam Persidangan**

Memanfaatkan sistem voting elektronik, *time tracking*, dan pengelolaan jadwal rapat berbasis aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses sidang.

5. **Standarisasi Tata Cara Sidang**

Menyusun pedoman tata cara sidang yang lebih sederhana dan efisien, mengacu pada praktik terbaik dari Parlemen Victoria, namun tetap sesuai dengan konstitusi dan tata tertib DPR RI.

Untuk rekomendasi yang umum kepada Biro Persidangan I maupun Biro Persidangan II yaitu pengembangan kompetensi staf secara berkala, misalnya dengan mengadakan pelatihan, kursus, atau lokakarya untuk meningkatkan keterampilan staf terutama dalam bidang teknologi, manajemen waktu, dan komunikasi parlementer. Selain itu, membuat mekanisme evaluasi kinerja biro dengan indikator keberhasilan yang jelas, seperti kepatuhan terhadap jadwal, kualitas dokumen yang disusun, dan efisiensi pelaksanaan sidang. Pada saat kunjungan ke Parlemen Victoria, kami diberikan beberapa buku hasil rekomendasi dari Komite di Parlemen Victoria yang juga bisa diakses di website Parlemen Victoria. Kami juga ingin memberikan rekomendasi perihal mengelola platform digital untuk memberikan akses publik terhadap risalah sidang dan informasi lainnya. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam konsultasi atau masukan terkait isu-isu yang dibahas di parlemen.

E. RISALAH

1. Praktik Penyelenggaraan Risalah Di Parlemen Victoria

Materi terkait risalah di Parlemen Victoria, yang dikenal dengan istilah Hansard, disampaikan secara singkat pada hari ketiga dalam program *short course* ini. Dr. Ali Reza Yunespour menjadi pengampu materi ini. Meskipun tidak terdapat sesi khusus terkait risalah rapat (*Hansard*), Kami tetap mendalami materi terkait *Hansard* pada setiap kesempatan diskusi di kelas. Selain itu, kunjungan langsung ke Parlemen Victoria memberikan kesempatan yang berharga untuk melihat secara langsung bagaimana Hansard diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Parlemen Victoria menggunakan *Hansard* untuk merekam, mencatat dan mempublikasikan jalannya sidang, termasuk perdebatan yang terjadi. *Hansard* berfungsi sebagai dokumen resmi yang merekam secara rinci semua percakapan dalam sidang,

seperti pertanyaan, jawaban, dan penjelasan dari anggota parlemen. Sistem ini telah menjadi alat penting di parlemen Australia untuk mencatat dinamika persidangan secara efektif. Tujuan utamanya adalah memberikan akses informasi yang terbuka kepada publik mengenai proses pengambilan keputusan di parlemen. Dengan cara ini, *Hansard* membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.



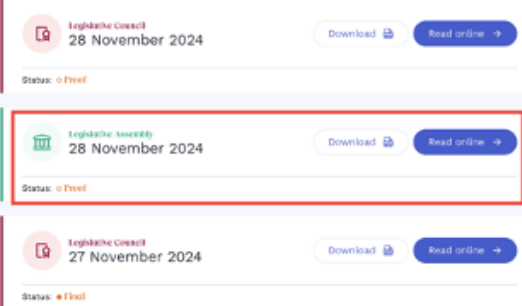
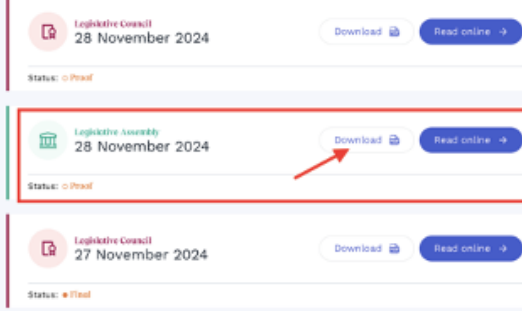
Hansard di Australia, mulai digunakan pada tahun 1856. Pada awalnya, *Hansard* hanya menggunakan teknologi yang sangat sederhana, seperti pena dan mesin ketik, untuk mencatat perdebatan di Parlemen. Sebelum digitalisasi, operator *Hansard* harus menulis cepat maupun mengetik di mesin ketik guna dapat mencatat dan mengikuti kecepatan dinamika percakapan dan perdebatan dalam rapat dan sidang. Catatan ini kemudian disunting dan diterbitkan dalam bentuk laporan tertulis yang tersedia untuk khalayak luas.

Pada tahun 1980-1990, *Hansard* mulai menggunakan teknologi digital untuk merekam perdebatan. Mikrofon otomatis dan kamera mulai digunakan untuk merekam apa yang terjadi di Parlemen. Pada saat yang sama, program pengenalan suara dan sistem komputerisasi mulai digunakan untuk mempercepat proses transkripsi dan penerbitan laporan, yang sebelumnya bisa memakan waktu beberapa hari, kini bisa diterbitkan dalam hitungan jam.

Tim penyelenggara *Hansard*, memastikan bahwa catatan yang dipublikasikan tetap sesuai dengan standar kualitas dan ketepatan. Seperti halnya pembuatan risalah di Indonesia, pengoperasian *Hansard* memerlukan operator dan editor. Setelah teknologi *Hansard* modern diberlakukan, operator hanya bersifat membantu perangkat lunak (*software*) khusus yang disertai sistem pengenalan suara yang digunakan untuk memastikan perekaman seluruh dinamika saat berlangsungnya sidang atau rapat. Para operator *Hansard* duduk di meja kecil di tengah ruang sidang, dekat dengan ujung ruangan. Mereka bertanggung jawab dalam menghasilkan catatan tertulis berupa *hansard* dari jalannya sidang.

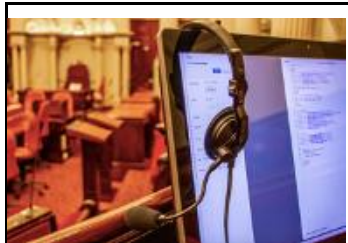
Pada praktiknya, masyarakat dapat mengakses *Hansard* dari rapat dan sidang yang telah berlangsung dengan mudah dan cepat. *Hansard* diunggah dan dapat ditemukan dalam website masing-masing parlemen negara bagian, seperti contohnya di negara bagian Victoria, *Hansard* dapat diakses di www.parliament.vic.gov.au. Adapun cara pengaksesan *Hansard* adalah sebagai berikut:

a. Gunakan kotak pencarian untuk mencari berdasarkan kata kunci, atau telusuri berdasarkan judul	
---	--

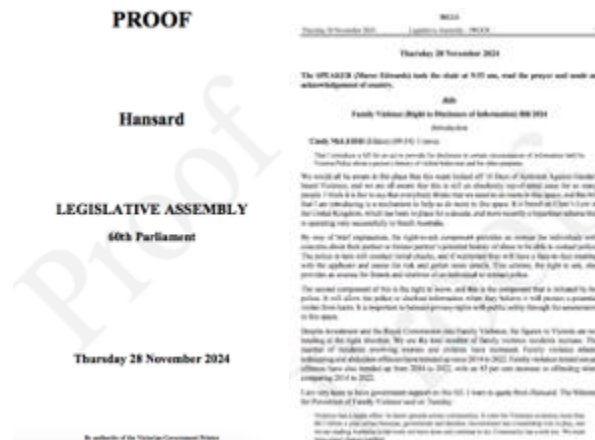
b. Pilih salah satu sidang yang diinginkan	
c. Pilih dari versi PDF	

Secara hakikatnya, hansard menyerupai risalah dalam sidang atau rapat parlemen di Indonesia, yang juga mencatat seluruh dinamika berupa percakapan dan perdebatan di dalam sidang. Dalam suatu dokumen hansard, terdapat nama dari pembicara (anggota parlemen) yang juga mencakup hal-hal yang dibicarakan. Meskipun demikian, dalam dokumen hansard, jeda, gumam (hm, ah, dsb), kesalahan verbal, singkatan (tidak mau menjadi gakmau) serta tata bahasa yang salah akan disunting. Adapun mekanisme perekaman *Hansard* sebagai berikut:

	1. Anggota parlemen yang ingin berbicara (pembicara) akan maju dan berbicara di mikrofon yang berada di depan atau di tengah ruang rapat sidang.
	2. Operator Hansard mencatat nama anggota parlemen yang sedang berbicara (pembicara), rincian waktu dan siapapun yang menyela serta perubahan pembicara.

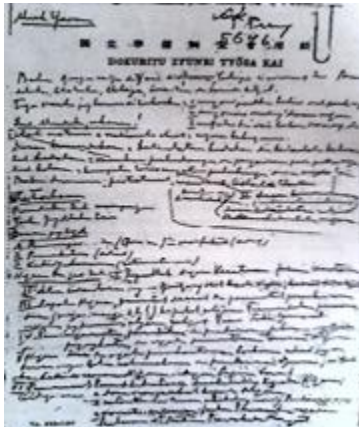
	3. Perangkat lunak (software) dan metadata <i>Hansard</i> mencatat secara langsung dan bersamaan seluruh hal yang disampaikan pembicara. Operator akan menyunting langsung dalam hal terjadi jeda, gumam, kesalahan verbal, singkatan maupun tata bahasa yang salah, terutama memilah dan memperbaiki bahasa dalam hal terdapatnya aksen bagi anggota-anggota parlemen yang tidak memiliki Bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Hal ini dikarenakan perangkat lunak (software) dan metadata <i>Hansard</i> diatur untuk merekam dan mencatat dalam Bahasa Inggris.
	4. Setelah sidang selesai, Editor akan menelusur dan mengoreksi secara detail terkait adanya kekeliruan dalam dokumen perekaman <i>Hansard</i>. Dalam pengeditan editor memiliki panduan referensi dan Standar Operasional Prosedur untuk memastikan konsistensi antar editor.
5. Kemudian, setelah semua sidang dan rapat dalam satu hari selesai, dokumen hansard diunggah ke situs web Parlemen Victoria. Dokumen tersedia dalam waktu 3 (tiga) jam setelah seluruh sidang dan rapat parlemen selesai pada hari itu. Dokumen <i>Hansard</i> tersedia untuk diunduh dari situs web resmi Parlemen Victoria dalam bentuk PDF.	

Terkait dengan dokumen *Hansard*, anggota parlemen dapat mengusulkan koreksi terhadap dokumen *Hansard*. Koreksi ini terutama mengenai fakta-fakta seperti nama orang, organisasi dan tempat, fakta sejarah, serta bahasa maupun aksen Aborigin dan aksen lainnya. Anggota parlemen tidak diizinkan untuk menulis ulang atau mengubah makna, atau memperbaiki catatan resmi, karena dokumen harus tetap mencerminkan apa yang sebenarnya dikatakan. Dapat dilihat contoh dokumen *Hansard* yang mencakup seluruh perdebatan dalam rapat dan/atau sidang parlemen sebagai berikut:



Secara keseluruhan, hansard tidak hanya mencatat apa yang terjadi di Parlemen, akan tetapi menjamin publik khususnya rakyat memiliki akses yang transparan dan akuntabel terhadap informasi mengenai perwakilan rakyat di parlemen dalam pengambilan kebijakan.

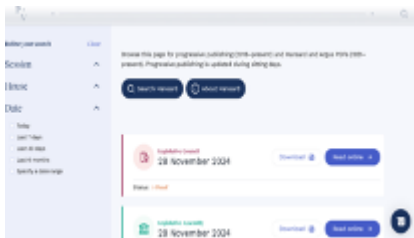
2. Praktik Penyelenggaraan Risalah Di Parlemen Indonesia



Untuk memastikan keautentikan risalah rapat dan menghindari polemik seperti yang terjadi di masa lalu, DPR RI kini mengembangkan proses penyusunan risalah yang berbasis pada sistem kerja yang terstruktur dan akuntabel. Sistem ini melibatkan dua jabatan fungsional utama, yaitu Perisalah Legislatif (PL) dan Asisten Perisalah Legislatif (APL), yang bekerja secara berjenjang.

Dewasa ini, risalah rapat tidak hanya berfungsi sebagai bahan referensi sejarah, tetapi juga menjadi dokumen penting dalam proses persidangan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Dengan peran strategis ini, keberadaan risalah rapat tidak dapat diabaikan. Pentingnya risalah telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 301

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mendefinisikan risalah rapat DPR RI sebagai “Catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat”. Namun, meskipun risalah memiliki peran penting, penyusunannya seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kecepatan proses. Salah satu indikasi masalah ini terlihat dari dokumen risalah rapat yang diunggah ke website dpr.go.id, di mana banyak risalah rapat khususnya dari bulan November belum tersedia, meskipun rekaman video rapat sudah dipublikasikan melalui YouTube pada waktu yang sama.



Jika dibandingkan dengan *Hansard* yang disusun oleh Parlemen Victoria tentu ini sangat berbanding terbalik di mana proses publikasi *Hansard* sangat cepat sehingga masyarakat dapat langsung melihat persidangan yang dilaksanakan oleh Parlemen Victoria melalui *Hansard*.

Melihat adanya perbedaan dalam kecepatan publikasi risalah rapat antara DPR RI dan parlemen Victoria, muncul pertanyaan mendasar terkait “Apa yang menjadi kendala dalam kinerja PL dan APL sehingga risalah belum dapat dipublikasi secara cepat”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk memahami lebih dalam tentang proses penyusunan risalah di DPR RI. Namun sebelum membahas lebih jauh, kami akan terlebih dahulu menjelaskan peran dan fungsi PL serta APL dalam struktur organisasi Sekretariat

Jenderal DPR RI. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tanggung jawab, tantangan, dan kontribusi masing-masing posisi dalam mendukung tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dilakukan oleh DPR RI.

Penyusunan risalah rapat terbagi ke dalam dua tahap utama, yaitu proses persiapan penyusunan risalah dan proses penyusunan risalah. Pada tahap proses persiapan, tanggung jawab berada pada Asisten Perisalah Legislatif (APL). Tahap ini mencakup sejumlah kegiatan penting, seperti:

1. Perekaman Rapat

Rekaman rapat memiliki tujuan utama untuk mendokumentasikan secara akurat seluruh pembicaraan yang berlangsung dalam rapat yang diselenggarakan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dokumentasi suara ini berfungsi sebagai bahan dasar dalam proses penyusunan transkrip, sehingga memastikan akurasi dan ketepatan dalam penyusunan risalah rapat. Kegiatan ini dilakukan oleh JFAPL pada jenjang Terampil dan Mahir, atau pelaksana di lingkungan AKD. Proses perekaman dilakukan dengan menghubungkan alat perekam ke *sound system* untuk menghasilkan kualitas suara yang jernih.

Saat ini, proses perekaman rapat di DPR RI telah diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Perekaman yang diperbarui pada 13 November 2024. Meskipun demikian, SOP tersebut masih memiliki kelemahan, yakni belum mencantumkan secara rinci standar kualitas suara yang harus dipenuhi oleh para petugas perekam. Akibatnya, beberapa rekaman rapat memiliki kualitas suara yang buruk atau kurang jelas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi akurasi dan efisiensi dalam proses penyusunan risalah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap SOP agar mampu mengakomodasi kebutuhan teknis dan memastikan hasil perekaman yang memenuhi standar profesional. Terkait dengan kondisi saat ini, proses perekaman rapat diatur melalui SOP Perekaman yang sudah diperbarui pada tanggal 13 November 2024. Namun sayangnya, dalam SOP tersebut belum mengatur secara jelas tentang standar kualitas suara rekaman yang harus dipenuhi para petugas rekam, dampaknya adalah terdapat rekaman rapat yang memiliki kualitas buruk atau suara yang kurang jelas untuk dilaksanakan.

Alat rekam yang digunakan untuk merekam jalannya rapat.



2. Penulisan daftar urut Pembicara

Langkah selanjutnya, setelah alat rekam suara sudah terhubung dengan *sound system* maka APL Terampil atau Mahir melaksanakan proses penulisan daftar urut nama pembicara. Proses ini merupakan bagian krusial dalam dokumentasi, bertujuan untuk memastikan bahwa substansi yang tercatat dalam risalah sesuai dengan peserta rapat yang menyampaikan pembicaraan. proses pelaksanaan penulisan daftar urut dilakukan secara manual (tulis tangan) atau dengan menggunakan komputer. Nantinya, setiap petugas akan dimengisi sebuah form yang diisi sesuai dengan nama dari pembicara tersebut.

Kondisi saat ini terjadi adalah proses ini membutuhkan konsentrasi dan kemampuan petugas untuk menghafal suara seluruh peserta rapat yang terlibat dalam diskusi tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah masalah ketika karena tidak petugas khususnya pada masa periode keanggota baru langsung mengenal suara dari anggota dan apabila

dalam situasi tertentu suara dari Anggota tidak sama seperti biasa, sehingga saat permasalahan tersebut akan berdampak terhadap kesalahan dalam penulisan daftar pembicara rapat. Selain itu, pencatatan nama pembicara terkadang hanya dilakukan oleh satu petugas saja. Dalam rapat dengan durasi panjang dan diskusi yang berlangsung secara cepat atau saling bersahutan, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi petugas. Akibatnya, risiko kesalahan pencatatan atau terlewatnya informasi penting menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keakuratan risalah rapat.

3. Pembuatan Transkrip

Rekaman suara sudah ada dan didukung dengan daftar urut pembicara, maka tahap selanjutnya adalah menuangkan ke dalam sebuah tulisan. Saat ini memang sudah ada teknologi *voice to text* di mana dengan teknologi tersebut kita bisa mengubah suara langsung menjadi sebuah tulisan, tetapi hal tersebut saat tidak direkomendasikan. Hal ini dikarenakan *voice to text* yang ada khususnya pada bahasa indonesia tingkat akurasiya belum maksimal, apalagi terkadang pada rapat-rapat di legislatif anggota dewan menyisipkan bahasa daerah, dan sistem belum bisa mengenalinya. Oleh karena itu, APL di DPR masih mengerjakan secara manual. Proses ini dikerjakan oleh seluruh jenjang APL.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa proses pembuatan transkrip yang dilakukan secara manual sering menjadi penyebab keterlambatan dalam penyusunan risalah rapat. Berdasarkan SOP Pembuatan Transkrip Rapat, durasi waktu yang ditetapkan untuk mentranskrip rekaman sepanjang 30 menit adalah sekitar 2 jam. Secara logis, untuk rapat dengan durasi 120 menit, proses pembuatan transkrip seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 8 jam atau satu hari kerja.

Namun, dalam kenyataannya, proses tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan petugas untuk beristirahat setelah mendengarkan rekaman rapat selama 15 menit, dengan waktu istirahat rata-rata 1 jam untuk menghindari kelelahan akibat penggunaan headset secara terus-menerus. Batas ini wajar mengingat keterbatasan manusia dalam memproses informasi audio dalam durasi panjang, yang jika diabaikan dapat berdampak pada kualitas transkrip yang dihasilkan.

Setelah seluruh rangkaian proses tahap persiapan penyusunan risalah dilaksanakan, selanjutnya adalah proses penyusunan risalah rapat. tahap ini melibatkan seluruh jenjang jabatan PL. Setidaknya terdapat tiga tahapan, yang akan dilakukan oleh masing-masing jenjang jabatan sampai akhirnya menjadi sebuah risalah rapat yang hari ini dapat kita lihat di dalam *website* dpr.go.id. Adapun tahapan yang dilaksanakan selama proses penyusunan risalah rapat sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan oleh PL Ahli Pertama

Pada tahap awal, PL Ahli Pertama bertugas menyusun risalah rapat sementara. Proses ini melibatkan penyempurnaan transkrip menjadi risalah yang sesuai dengan standar tata naskah yang berlaku. Penyempurnaan tersebut mencakup pemberian judul yang relevan serta koreksi terhadap isi transkrip, terutama untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan bebas dari kesalahan.

b. Tahap Validasi oleh PL Ahli Muda

Setelah risalah sementara selesai disusun, PL Ahli Muda melakukan proses validasi. Tahap ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran isi risalah dengan mencocokkannya kembali terhadap rekaman suara. Meskipun proses ini tampak seperti pengulangan, validasi merupakan langkah penting untuk memastikan keakuratan, keaslian, dan mutu dari risalah rapat. Dengan validasi, setiap informasi yang tercatat dapat dipastikan sesuai dengan fakta diskusi yang terjadi.

c. Tahap Otentifikasi oleh PL Ahli Madya



Tahap akhir adalah otentifikasi, yang merupakan tugas JFPL Ahli Madya sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam proses ini. Otentifikasi adalah proses pengesahan risalah rapat yang telah divalidasi sebelumnya. Langkah ini memberikan jaminan terhadap kualitas risalah, memastikan dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, maupun historis. Secara singkat gambaran proses otentifikasi

adalah melakukan pembubuhan paraf pada risalah rapat yang sudah divalidasi.

Kondisi saat ini, Proses penyusunan risalah dari pertama hingga autentikasi pada dasarnya merupakan pelaksanaan yang baik guna memantapkan akuntabilitas namun

sayangnya secara teknis proses ini dinilai kurang efektif karena hampir seluruh tahapan melaksanakan kegiatan yang berulang yaitu mendengarkan dan mengecek kembali, hal ini yang selanjutnya akan berdampak terhadap keterlambatan di dalam proses publikasi risalah rapat.

3. Best Practices

Selama mengikuti *Parliamentary Short Course* di *Melbourne University*, terdapat beberapa pelajaran penting yang Kami peroleh untuk kemudian dipertimbangkan agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi di Parlemen Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Akurasi Risalah Rapat

Parlemen Victoria memanfaatkan teknologi mikrofon otomatis untuk merekam rapat atau sidang. Mikrofon ini aktif hanya pada pembicara yang sedang mendapat



giliran berbicara. Oleh karena itu, hanya suara pembicara yang terekam dan tercatat, meskipun terdapat kebisingan atau suara dari anggota rapat lainnya. Hal ini

membantu menghasilkan risalah rapat yang lebih jelas dan terfokus, bahkan di tengah suasana rapat yang tidak kondusif sekali pun. Selain itu, Parlemen



Victoria menggunakan teknologi canggih lainnya seperti transkripsi suara otomatis yang mengubah ucapan pembicara menjadi teks secara langsung. Penggunaan kamera definisi tinggi (HD) juga meningkatkan akurasi pencatatan visual, yang memudahkan pemantauan jalannya sidang secara lebih jelas. Dengan fasilitas siaran canggih, setiap sesi sidang dapat disiarkan dengan kualitas tinggi, baik secara langsung maupun melalui rekaman yang dapat diakses publik. Kombinasi teknologi-teknologi ini membawa dampak besar dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan aksesibilitas informasi di Parlemen Victoria.



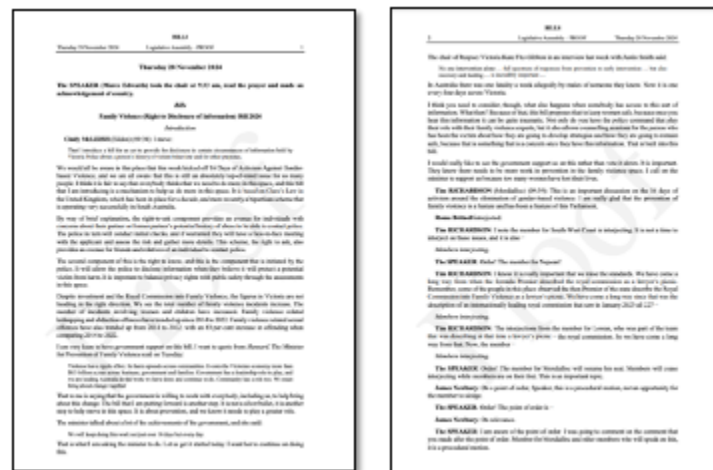
2. Kecepatan Publikasi dan Ketepatan Hasil Risalah Rapat

Parlemen Victoria mampu mempublikasikan hasil risalah rapat dengan cepat berkat kombinasi teknologi canggih dan proses kerja yang efisien. Transkripsi otomatis dipadukan dengan penyuntingan manual untuk memastikan akurasi tanpa mengorbankan kecepatan. Hal ini memungkinkan risalah rapat selesai dan dirilis pada hari yang sama dengan waktu pelaksanaan rapat, sehingga publik dan



anggota parlemen dapat segera mengakses hasil rapat tersebut. Sebaliknya, di Parlemen Indonesia, belum terdapat aturan baku yang mengharuskan risalah rapat diselesaikan pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat. Proses penyelesaian risalah sering kali memakan waktu lebih lama, bergantung pada sumber daya dan tingkat kompleksitas penyuntingan. Dengan menerapkan

teknologi dan metode seperti yang digunakan di Parlemen Victoria, Parlemen Indonesia dapat mempercepat penyelesaian dan publikasi risalah rapat tanpa mengurangi kualitasnya.



3. Layanan Hansard Khusus bagi Anggota Parlemen

Parlemen Victoria menyediakan layanan *Hansard* yang dapat diakses secara eksklusif oleh anggota parlemen. Fasilitas ini memungkinkan anggota untuk memeriksa transkrip sementara dari ucapan mereka selama sidang sebelum publikasi resmi, sehingga mereka dapat memastikan akurasi dan mengoreksi kesalahan jika diperlukan. Pendekatan ini dapat diterapkan di Parlemen Indonesia untuk mendukung anggota parlemen dalam menyampaikan informasi yang lebih akurat kepada konstituen dan masyarakat.

4. Peningkatan Keterampilan Teknologi untuk Staf Risalah

Staf *Hansard* di Parlemen Victoria dilatih untuk mengoperasikan perangkat lunak (*software*) pengenalan suara dan pengeditan transkrip. Pelatihan semacam ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan efisiensi kerja. Parlemen Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk membekali staf risalah dengan keterampilan yang relevan, sehingga mampu menghadapi perubahan teknologi yang dinamis.

4. Usulan Rekomendasi

Apa yang telah dicapai oleh Parlemen Victoria dalam proses publikasi *Hansard* atau risalah rapat merupakan salah satu contoh kemajuan yang patut diapresiasi. Melalui mekanisme yang diterapkan, masyarakat dapat mengakses *Hansard* dari suatu persidangan hanya dalam waktu singkat setelah rapat berlangsung. Menurut Dr. Ali Reza Yunespour, kecepatan publikasi *Hansard* tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap parlemen. Mengingat manfaat yang ditawarkan oleh pendekatan ini, DPR RI perlu mempertimbangkan untuk mempercepat proses penyusunan dan publikasi risalah rapat dengan mengadopsi praktik-praktik yang diterapkan oleh Parlemen Victoria. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Perlu adanya sebuah teknologi yang mengatur tentang pengenalan suara sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan tahap penulisan daftar pembicara rapat.
- b. Perlu ditetapkan standar kemampuan teknis bagi seorang transkriptor untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam proses transkripsi. Salah satu standar yang dapat diterapkan adalah kecepatan mengetik minimal 80 kata per menit, sesuai dengan standar internasional. Standar ini tidak hanya mendukung percepatan penyusunan transkrip, tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam pengelolaan risalah rapat.
- c. Perlu adanya standar kualitas hasil kerja untuk menjamin kualitas dari masing-masing output yang dihasilkan baik APL dan PL.
- d. Menghapus tahap otentifikasi risalah rapat dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat proses penyusunan risalah. Pada dasarnya, proses penyusunan risalah cukup diselesaikan hingga tahap validasi, tanpa memerlukan langkah otentifikasi tambahan. Hal ini sejalan dengan praktik yang dilakukan di Parlemen Victoria, di mana mereka hanya melakukan proses *proofing* sebanyak dua kali. Pendekatan ini memungkinkan risalah rapat dipublikasikan dengan lebih cepat, tanpa mengorbankan keakuratan atau kualitas dokumen.

F. ARSIP

1. Sistem Arsip di Parlemen Australia

Sistem kearsipan di pemerintah Australia, khususnya di Parlemen Australia, dikelola terutama oleh *the National Archives of Australia* (NAA), yang berfungsi sebagai repositori resmi untuk dokumen-dokumen pemerintah federal. Badan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, melestarikan, dan menyediakan akses publik terhadap berbagai catatan yang mendokumentasikan sejarah Australia. NAA menerapkan Model Kontrol Kearsipan, yang memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan catatan pemerintah, termasuk pendaftaran, deskripsi, pelestarian, dan pengelolaan secara keseluruhan. Sejak awal tahun 1960-an, NAA telah menggunakan sistem *Commonwealth Record Series* (CRS) sebagai sistem kontrol kearsipan utama, yang sangat penting untuk mengklasifikasikan dan mengontrol catatan *Commonwealth* agar terorganisir dan dapat diakses dengan baik.

Selain itu, NAA juga mengembangkan Sistem Seri Australia yang dirancang untuk mendeskripsikan catatan yang dimiliki oleh lembaga arsip.

Di Parlemen Australia, sistem kearsipan diatur oleh Undang-Undang Arsip 1983, yang mengharuskan NAA untuk melaporkan kepada Jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada Parlemen Australia. Sebagai bagian dari operasional NAA, sistem CRS memastikan bahwa dokumen-dokumen diarsipkan secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti, sejarawan, dan publik untuk mengakses dokumen penting pemerintah. Selain itu, setiap Parlemen Australia, termasuk Parlemen Federal, Negara Bagian, Wilayah Utara, dan Wilayah Ibu Kota Australia, menerbitkan Dokumen Parlemen yang mencerminkan aktivitas legislatif dan keputusan yang diambil selama periode tertentu. Proses publikasi ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem parlemen.

Di sisi lain, sistem kearsipan di Parlemen Victoria dikelola melalui *Public Record Office Victoria* (PROV), yang berperan penting dalam melestarikan dan menyediakan akses kepada catatan yang dihasilkan oleh Parlemen. PROV menggunakan *the Archival Control Model* (ACM) sebagai kerangka kerja utama, yang melibatkan pendekatan terstruktur untuk mendokumentasikan catatan arsip, termasuk pembuatan skema metadata yang mendeskripsikan catatan dan lembaga yang memproduksinya. Sistem ini memastikan bahwa catatan legislatif, termasuk RUU, undang-undang, dan peraturan, terdokumentasi dengan baik untuk kepentingan referensi historis dan akuntabilitas hukum. PROV juga mengatur akses publik terhadap catatan sejarah, yang vital untuk penelitian, pendidikan, dan pemahaman mengenai evolusi pemerintahan di Victoria. Melalui praktik-praktik ini, Parlemen Victoria menunjukkan komitmen terhadap pelestarian sejarah legislatif, memastikan aksesibilitas dokumen, dan mengikuti kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan catatan penting ini.

Klasifikasi arsip di Parlemen Australia mengikuti pendekatan fungsional yang disesuaikan dengan kegiatan dan fungsi spesifik parlemen. Metode ini memastikan bahwa arsip diorganisir dengan cara yang mendukung aksesibilitas dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan regulasi. Sistem klasifikasi ini kemungkinan besar mempertimbangkan aspek legal dan aksesibilitas arsip, yang sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislatif.

Kebijakan retensi arsip di Parlemen Australia diatur oleh pedoman yang ketat, yang menentukan berapa lama berbagai jenis arsip harus disimpan. Kebijakan ini dipengaruhi oleh persyaratan hukum, kebutuhan operasional, dan nilai historis dari arsip tersebut. National Archives of Australia menyediakan pedoman dan jadwal yang menguraikan periode retensi minimum untuk berbagai kategori arsip. Jadwal ini sangat penting untuk memastikan bahwa arsip disimpan selama jangka waktu yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan hukum, administratif, dan historis.

Transformasi digital telah menjadi fokus utama dalam upaya modernisasi pengelolaan arsip di Parlemen Australia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pengelolaan dokumen dan informasi penting. Parlemen Australia telah membentuk badan-badan khusus seperti Dinas Transformasi Digital dan Dinas Kesehatan Digital Australia untuk mengimplementasikan teknologi digital dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk pengelolaan arsip. Penggunaan perangkat lunak otomatisasi dan penyimpanan berbasis cloud telah menjadi

bagian integral dari transformasi ini, memungkinkan proses pengarsipan dan pemulihan dokumen menjadi lebih cepat dan efisien, serta mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan fisik. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam transformasi digital ini. Parlemen Australia menerapkan teknologi keamanan canggih seperti enkripsi data dan kontrol akses yang ketat untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman keamanan siber. Pemantauan keamanan secara real-time juga dilakukan untuk memastikan integritas data. Adopsi sistem manajemen dokumen dan arsip elektronik (*electronic document and records management system* atau EDRMS) telah memfasilitasi penanganan arsip secara digital, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar penyimpanan arsip digital.

Parlemen Australia juga menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip, termasuk implementasi program pelatihan yang kuat untuk staf, audit rutin terhadap praktik penyimpanan arsip, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses manajemen arsip. Studi kasus sering menyoroti proyek-proyek sukses di mana alat digital telah digunakan untuk merampingkan manajemen arsip dan meningkatkan akses terhadap informasi. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan arsip di Parlemen Australia mencerminkan pendekatan yang terbuka dan transparan dalam pengelolaan informasi publik, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal yang menghargai kebebasan berbicara dan berserikat.

Dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris, sistem pengelolaan arsip Parlemen Australia menunjukkan kesamaan dalam pendekatan dan standar. Namun, dibandingkan dengan negara-negara yang mungkin belum sepenuhnya mengadopsi teknologi digital, seperti Indonesia, Australia mungkin lebih maju dalam hal efisiensi dan aksesibilitas arsip. Ini menunjukkan bahwa Parlemen Australia telah berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu pemimpin dalam praktik pengelolaan arsip modern, dengan fokus pada kepatuhan hukum, efisiensi operasional, dan inovasi teknologi.

2. Sistem Arsip di Parlemen Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan arsip diatur melalui Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (PER ANRI) No. 6 Tahun 2021, yang menekankan tata naskah dinas digital, retensi arsip elektronik, dan klasifikasi arsip elektronik. Sistem klasifikasi arsip di DPR RI menerapkan pendekatan yang terstruktur dan berjenjang untuk mengatur arsip dinamis. Klasifikasi ini menggunakan kode yang terdiri dari gabungan huruf dan angka, dirancang untuk memfasilitasi pengaturan dan akses terhadap arsip secara sistematis. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pengaturan fisik arsip, tetapi juga pada informasi yang terkandung di dalamnya, memungkinkan rekonstruksi kegiatan secara utuh dan akurat. Arsip di DPR RI diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

- a. Arsip Dinamis: Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Arsip Statis: Arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan disimpan secara permanen

Selain itu, arsip juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat keamanan menjadi tiga level: biasa, terbatas, dan rahasia. Klasifikasi ini penting untuk mengontrol akses dan melindungi informasi sensitif dalam proses legislatif.

Kebijakan retensi arsip di DPR RI diatur oleh berbagai peraturan, termasuk pedoman yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Implementasi

Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan komponen kunci dalam manajemen retensi arsip. JRA berfungsi sebagai panduan yang menentukan berapa lama arsip harus disimpan dan kapan arsip tersebut dapat dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip permanen. Implementasi JRA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan arsip dan mengurangi beban penyimpanan arsip yang tidak lagi aktif. Prosedur retensi arsip meliputi:

- a. Transfer arsip inaktif ke fasilitas penyimpanan hingga masa retensinya berakhir.
- b. Pemusnahan arsip yang telah melewati masa retensi dan tidak lagi diperlukan untuk tujuan historis atau hukum.
- c. Transfer arsip bernilai historis atau hukum ke arsip permanen.

Transformasi digital dalam pengelolaan arsip di DPR RI merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas informasi. Beberapa inisiatif utama dalam transformasi digital meliputi:

- a. Implementasi Sistem Informasi Arsip (SIAR) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) untuk memfasilitasi pengelolaan arsip secara digital.
- b. Kolaborasi dengan Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi, termasuk pengembangan sistem informasi dan analitik berbasis kecerdasan buatan.
- c. Pengembangan Electronic Records Management System (ERMS) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip elektronik.

Transformasi digital dalam pengelolaan arsip di DPR RI menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas maksimal. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam teknologi arsip digital, yang menjadi kendala besar dalam menerapkan sistem modern. Selain itu, adaptasi budaya kerja terhadap sistem digital masih belum optimal, sehingga proses perubahan berjalan lambat. Keamanan siber juga menjadi isu penting, mengingat ancaman serangan terhadap sistem informasi DPR yang semakin meningkat.

Di sisi lain, meskipun ada upaya signifikan untuk memodernisasi sistem pengelolaan arsip, DPR RI masih harus menghadapi beberapa hambatan. Pertama, kurangnya tenaga kearsipan atau arsiparis yang memadai untuk menangani volume arsip yang terus berkembang. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang tersedia menghambat pengelolaan arsip yang efisien dan berbasis digital. Prosedur dan kebijakan terkait pengelolaan arsip pun masih perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang cukup besar untuk perbaikan. Salah satunya adalah pengembangan sistem pengelolaan arsip dinamis yang dapat mengatasi beberapa masalah yang ada. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kearsipan melalui program pelatihan dan bimbingan teknis (BIMTEK) dapat menjadi solusi untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia yang terlatih. Terakhir, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang ada, seperti Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media Arsip DPR RI, juga dapat membantu memperkuat sistem pengelolaan arsip agar lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan arsip di DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR menunjukkan komitmen untuk mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen arsip modern, dengan fokus pada klasifikasi yang terstruktur, kebijakan retensi yang jelas, dan transformasi digital yang progresif. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, langkah-langkah yang

diambil menunjukkan upaya DPR RI untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik.

Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, serta memanfaatkan peluang yang ada dalam transformasi digital, DPR RI berpotensi untuk menjadi contoh dalam pengelolaan arsip yang efektif dan modern di lingkungan lembaga pemerintah Indonesia. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi kerja internal, tetapi juga memperkuat hubungan antara parlemen dan rakyat, menjadikan DPR RI lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

3. Best Practices

Dari pengalaman Parlemen Australia, DPR RI dapat belajar hal berikut:

a. Pentingnya Metadata

Pengalaman Parlemen Australia menunjukkan bahwa memiliki sistem metadata yang baik sangat penting untuk memastikan arsip dapat diakses dengan cepat dan akurat. Metadata, yang merupakan informasi yang menjelaskan dan mengelola data lain, berfungsi sebagai kunci untuk mengorganisir, menemukan, dan memahami arsip. Dengan sistem metadata yang terstruktur, Parlemen Australia dapat menyimpan informasi penting tentang setiap arsip, seperti pengarang, tanggal pembuatan, kategori konten, dan tingkat aksesibilitas. Data menunjukkan bahwa penggunaan metadata yang efektif dapat meningkatkan kecepatan pencarian arsip hingga 50%, serta mengurangi waktu yang diperlukan untuk menemukan dokumen yang relevan. Selain itu, metadata juga membantu dalam proses retensi dan disposisi arsip, memungkinkan pengelola arsip untuk secara otomatis menilai nilai historis dan hukum dari dokumen. Dengan demikian, bagi Indonesia, mengembangkan dan menerapkan standar metadata yang komprehensif dalam pengelolaan arsip di DPR RI akan sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam akses informasi publik. Implementasi sistem manajemen metadata yang terintegrasi juga akan memberikan kemudahan dalam pelacakan dan pemeliharaan arsip, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat legislatif.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Penyediaan akses publik ke records legislatif secara daring di Parlemen Australia menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Parlemen Australia telah mengimplementasikan portal online yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen legislatif, seperti undang-undang, laporan, dan notulen rapat, dengan mudah dan cepat. Data menunjukkan bahwa akses daring terhadap records legislatif dapat meningkatkan partisipasi publik hingga 40%, karena lebih banyak warga negara yang dapat terlibat dalam proses demokrasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang dipertimbangkan. Selain itu, akses publik yang mudah juga membantu dalam mengurangi kesenjangan informasi, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, dapat memperoleh informasi penting tentang kegiatan legislatif tanpa harus mengunjungi gedung parlemen secara fisik. Dengan menyediakan records legislatif secara daring, Parlemen Australia tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, tetapi juga mendorong budaya keterbukaan yang esensial dalam sistem demokrasi. Bagi Indonesia, mengadopsi pendekatan serupa dengan menyediakan akses daring terhadap records legislatif di DPR RI dapat memperkuat hubungan antara

pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih informed dan berbasis data.

c. Investasi pada SDM

Pengalaman Parlemen Australia menunjukkan bahwa investasi pada sumber daya manusia (SDM) adalah kunci untuk menjamin manajemen arsip yang baik dan efisien. Dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi arsiparis, Parlemen Australia secara aktif mengembangkan program pelatihan yang berkelanjutan dan mendukung pengembangan profesional di bidang kearsipan. Data menunjukkan bahwa lembaga yang menginvestasikan setidaknya 5% dari anggarannya untuk pelatihan dan pengembangan SDM dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% dan mengurangi kesalahan pengelolaan arsip sebesar 25%. Program ini mencakup pelatihan dalam teknologi informasi, manajemen arsip digital, serta pemahaman tentang regulasi dan kebijakan kearsipan yang berlaku. Selain itu, Parlemen Australia telah melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi untuk menyediakan pendidikan formal bagi para profesional kearsipan, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan sertifikasi dan gelar yang relevan. Dengan demikian, bagi Indonesia, investasi yang lebih besar dalam pengembangan SDM di bidang kearsipan di DPR RI sangat penting untuk memastikan bahwa staf memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola arsip dengan baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, tetapi juga memastikan bahwa proses legislasi dan pengambilan keputusan berbasis data dapat berjalan dengan lancar dan transparan.

d. Digital-First Policy

Kebijakan "digital-first" menjadi contoh penting dalam pengelolaan arsip dan informasi publik yang modern. Kebijakan ini menekankan pentingnya teknologi digital sebagai prioritas utama dalam penciptaan, pengelolaan, dan distribusi dokumen legislatif. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Parlemen Australia tidak hanya berfokus pada digitalisasi arsip yang sudah ada, tetapi juga memastikan bahwa semua dokumen baru yang dihasilkan selama proses legislasi dibuat dalam format digital sejak awal. Data menunjukkan bahwa kebijakan ini telah meningkatkan efisiensi akses informasi, di mana lebih dari 80% dokumen yang dibutuhkan oleh publik kini dapat diakses secara online, mengurangi waktu pencarian sampai 50%. Selain itu, kebijakan digital-first ini juga mendukung transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kegiatan legislatif tanpa harus datang langsung ke gedung parlemen. Dengan fasilitas online yang ramah pengguna, Parlemen Australia mampu menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk warga negara yang berada di daerah terpencil. Bagi Indonesia, mengadopsi kebijakan serupa di DPR RI sangat penting dalam era digital saat ini, di mana aksesibilitas informasi publik menjadi faktor krusial dalam memperkuat demokrasi. Kebijakan digital-first akan mendorong pengelolaan arsip yang lebih efisien, meningkatkan transparansi, serta memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan.

4. Rekomendasi

Berikut beberapa hal yang dapat membantu DPR RI meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan relevansi records management di era digital, sekaligus memperkuat transparansi kepada masyarakat:

a. Digitalisasi Menyeluruh

Dari pengalaman ini, Indonesia dapat belajar untuk mengembangkan kebijakan transisi digital yang komprehensif bagi DPR RI, dengan penekanan khusus pada pengelolaan arsip elektronik. Hal ini mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung sistem arsip digital yang efisien. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk mengimplementasikan sistem manajemen dokumen elektronik (EDMS) yang terintegrasi di seluruh lembaga legislatif. Dengan mengadopsi pendekatan "digital-first" dalam penciptaan dan pengelolaan arsip, termasuk penggunaan teknologi cloud dan solusi identitas digital, DPR RI dapat memastikan bahwa pengelolaan arsipnya tidak hanya modern tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin digital.

Rekomendasi manajemen arsip yang krusial adalah penerapan digitalisasi menyeluruh, yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas arsip secara signifikan. Dalam konteks ini, penting untuk mengimplementasikan sistem arsip digital dengan metadata terstandarisasi, seperti yang telah berhasil dilakukan di Parlemen Australia. Dengan sistem ini, setiap arsip yang dihasilkan tidak hanya disimpan dalam format digital, tetapi juga dilengkapi dengan metadata yang jelas dan terstruktur, yang memudahkan proses pencarian, pengelolaan, dan pemeliharaan arsip. Untuk mencapai efektivitas yang optimal, semua arsip baru harus dihasilkan dalam format digital sejak awal, sehingga tidak ada lagi ketergantungan pada dokumen fisik yang dapat menghambat akses dan pengelolaan. Dengan cara ini, DPR RI dapat menciptakan lingkungan pengelolaan arsip yang lebih modern dan responsif, di mana informasi penting dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam proses legislasi. Digitalisasi menyeluruh tidak hanya akan mempercepat alur kerja internal, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin menginginkan akses yang lebih mudah terhadap informasi publik.

b. Penguatan Regulasi:

Perlu dilakukan penguatan regulasi, khususnya dengan memperkuat implementasi Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan arsip secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan evaluasi rutin dan pengawasan ketat terhadap kepatuhan setiap lembaga dalam menerapkan regulasi tersebut. Dengan adanya evaluasi yang teratur, DPR RI dan lembaga lainnya dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pengelolaan arsip, serta memastikan bahwa semua praktik kearsipan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan ketat juga akan mendorong kesadaran dan tanggung jawab di kalangan pegawai mengenai pentingnya pengelolaan arsip yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan integritas data yang disimpan. Melalui penguatan regulasi ini, diharapkan manajemen arsip di Indonesia akan semakin terstandarisasi, transparan, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi yang akurat dan terpercaya.

c. Akses Publik:

Portal daring yang transparan untuk masyarakat perlu disediakan untuk memungkinkan akses langsung ke records legislatif seperti laporan komite dan Hansard. Dengan adanya portal ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi penting mengenai kegiatan legislatif dan keputusan yang diambil oleh DPR

RI tanpa harus melalui proses yang rumit atau mengunjungi gedung parlemen secara fisik. Portal daring ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses demokrasi. Dengan informasi yang tersedia secara terbuka, warga negara dapat lebih memahami isu-isu yang sedang dibahas, memberikan masukan, serta mengawasi kinerja wakil-wakil mereka di parlemen. Data menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, memperkuat legitimasi proses legislasi, dan menciptakan dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, penyediaan portal daring yang transparan merupakan langkah strategis yang tidak hanya akan memperbaiki pengelolaan arsip, tetapi juga memperkuat hubungan antara DPR RI dan masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

d. Pelatihan SDM

Rekomendasi penting dalam manajemen arsip adalah investasi pada sumber daya manusia (SDM), yang merupakan pondasi utama untuk memastikan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, investasi SDM mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para arsiparis dan staf terkait, sehingga mereka dapat menguasai teknologi terbaru dan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip. Dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan, lembaga dapat meningkatkan kompetensi staf dalam mengelola arsip digital, memahami regulasi yang berlaku, serta menerapkan sistem manajemen arsip yang terstandarisasi. Data menunjukkan bahwa lembaga yang berinvestasi dalam pengembangan SDM dapat meningkatkan produktivitas hingga 30% dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan arsip. Selain itu, dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf, lembaga akan lebih siap menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, investasi pada SDM bukan hanya sekedar pengeluaran, tetapi merupakan langkah strategis yang akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pengelolaan arsip, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Dengan SDM yang terlatih dan kompeten, pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih baik, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

e. Kolaborasi Antarinstansi

Rekomendasi penting dalam manajemen arsip adalah memperkuat kolaborasi antarinstansi, terutama antara lembaga pemerintah dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang terintegrasi dan efisien di seluruh tingkatan pemerintahan. Dengan bekerja sama, instansi-instansi dapat berbagi sumber daya, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip, serta memastikan bahwa semua dokumen dan informasi penting dikelola secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, penguatan kolaborasi ini sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya memiliki data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip Satu Data Indonesia berfokus pada pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antarinstansi, termasuk ANRI, akan memastikan bahwa data dan informasi yang dihasilkan dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem yang lebih besar, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Melalui pendekatan ini,

pengelolaan arsip tidak hanya akan menjadi lebih efisien, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dan berbasis data, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

G. MUSEUM

1. Museum di Parlemen Australia

Museum Parlemen Victoria merupakan bagian dari Gedung Parlemen Victoria, yang terletak di Spring Street, Melbourne yang mudah diakses melalui transportasi umum. Gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara bagian Victoria, tetapi juga menjadi tempat bersejarah yang menawarkan wawasan menarik tentang politik dan sejarah Australia. Pada hari Kamis, 28 November 2024 dipimpin oleh Dr. Ali Reza Yunespour, kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi Parlemen Victoria.



Gambar 3.12. Visitasi ke Parlemen Victoria

Agenda kunjungan ke Parlemen Victoria, terdiri dari:

1. Tour of Parliament yang dipimpin oleh Staf Parlemen, Chris Welstead, kemudian setelah melakukan tour of parliament, peserta diberikan kesempatan untuk
2. Menyaksikan Question Time di Legislative Assembly. Setelah menyaksikan Question Time, peserta
3. Mendapatkan materi mengenai Parliamentary Minutes and Record Keeping oleh Annemarie Burt, Manager of Table Office dan Liam Moran, Manager of Procedure Office. Kemudian setelah mendapatkan paparan materi, peserta
4. diterima oleh Anggota Parlemen, yakni Tom McIntosh dan Ella George.

Saat melakukan Tour of Parliament, peserta mendapatkan penjelasan oleh Staf Parlemen, Chris Welstead. Chris menjelaskan bahwa Gedung Parlemen Victoria bagaikan museum yang menggabungkan sejarah, politik dan arsitektur megah yang menjadikan tempat yang menarik bagi pengunjung untuk memahami lebih jauh mengenai warisan politik dan budaya Victoria.



Gambar 3.13. Desain Gedung Parlemen Victoria

Sejarah Gedung Parlemen Victoria dibangun pada tahun 1856 dan menjadi salah satu contoh terbaik arsitektur kolonial di Australia. Gedung Parlemen ini sempat digunakan sebagai Parlemen Australia setelah federasi pada tahun 1901, sebelum Gedung Parlemen permanen di Canberra selesai pada tahun 1927.

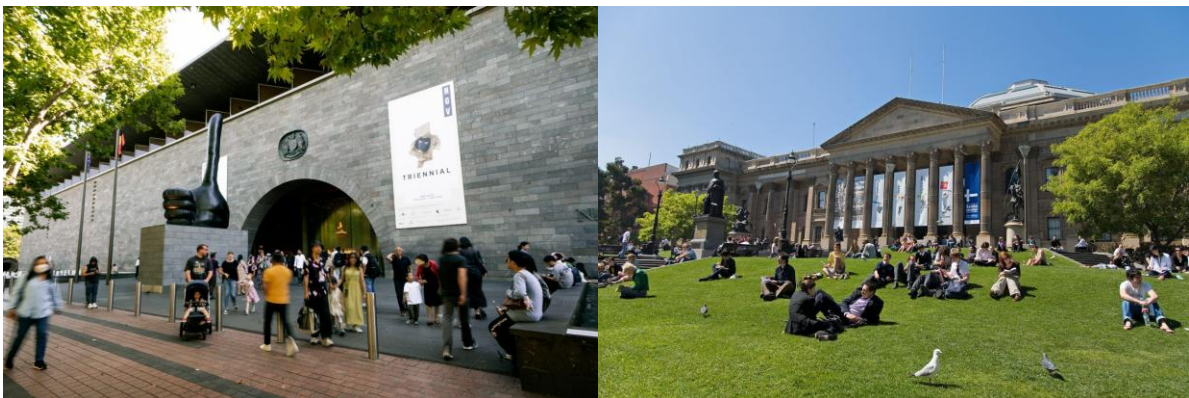
Saat ini Gedung Parlemen Victoria yang juga berfungsi sebagai museum dengan menampilkan koleksi yang mengungkapkan sejarah parlemen negara bagian dan sistem pemerintahannya; peran Gedung Parlemen dalam berbagai momen penting seperti gerakan buruh dan perjuangan hak pilih perempuan; serta menampilkan barang-barang bersejarah, termasuk furnitur asli sejak tahun 1850-an, lukisan yang menggambarkan momen penting dalam sejarah politik, dokumen legislatif seperti Undang-Undang Kolonial hingga konstitusi Victoria dan perisalah rapat berupa hansard di seluruh bagian Gedung Parlemen.

Department Parliamentary Service (DPS) menawarkan berbagai program edukasi kepada pelajar dan publik, yakni dengan Tour of Parliament untuk mempelajari sejarah demokrasi dan mempelajari proses legislatif di Victoria dan Australia, dan juga memungkinkan pengunjung menyaksikan proses parlemen secara langsung jika terdapat sesi parlemen terbuka. Selain program kunjungan Gedung Parlemen, DPS juga kerap kali menggelar acara budaya seperti pameran seni dan loka karya.



Gambar 3.14. Tour of Parliament

Walaupun kunjungan Gedung Parlemen merupakan program DPS, akan tetapi saat ini Chris menyampaikan bahwa minat wisatawan untuk melakukan tour sejarah cukup tinggi. Oleh karena itu, DPS memberikan ruang kerjasama dengan travel agent untuk menjadi bagian program kunjungan sejarah kota Melbourne. Diketahui bahwa di sekitar Gedung Parlemen Victoria, terdapat Princess Theatre yang didirikan tahun 1854 sebagai salah satu teater tertua di Melbourne, kemudian terdapat Old Treasury Building yang dibangun pada tahun 1858 untuk menyimpan emas selama masa Gold Rush Victoria, dan juga terdapat Parliament Gardens, yakni taman kecil yang memiliki air mancur Coles Fountain sebagai monumen yang menghormati toko sejarah yang terletak di sebelah Gedung Parlemen Victoria. Selain itu, program tour ini juga memberikan kesempatan para wisatawan untuk mengunjungi National Gallery dan Library State.



Gambar 3.15. Visitasi National Gallery dan Library State

Tujuan DPS melakukan kolaborasi dengan travel agent untuk program kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa Gedung Parlemen Victoria tidak hanya berfungsi sebagai pusat politik, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran dan pelestarian sejarah. Adapun beberapa tujuan DPS melakukan program kolaborasi tersebut, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang sistem pemerintahan kepada publik dan wisatawan. Dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat memahami bagaimana sistem parlemen bekerja, termasuk proses legislasi, debat, dan pengambilan keputusan;
2. Mendorong partisipasi demokrasi, dimana tujuan kunjungan ini dapat memupuk kesadaran dan minat publik terhadap demokrasi dan politik;
3. Dengan membuka gedung parlemen kepada publik dapat menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas;
4. Memperkuat hubungan dengan publik karena program kunjungan dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat antara publik dan pemerintah;
5. Mendorong rasa kebanggaan dan Identitas lokal dengan memperkenalkan sejarah dan warisan budaya di Gedung Parlemen Victoria dengan mengeksplorasi arsitektur, artefak, identitas politik dan budaya victoria;
6. Kolaborasi program kunjungan ini tentu juga akan meningkatkan pariwisata sebagai salah satu destinasi wisata utama di Melbourne untuk wisatawan domestik dan internasional.

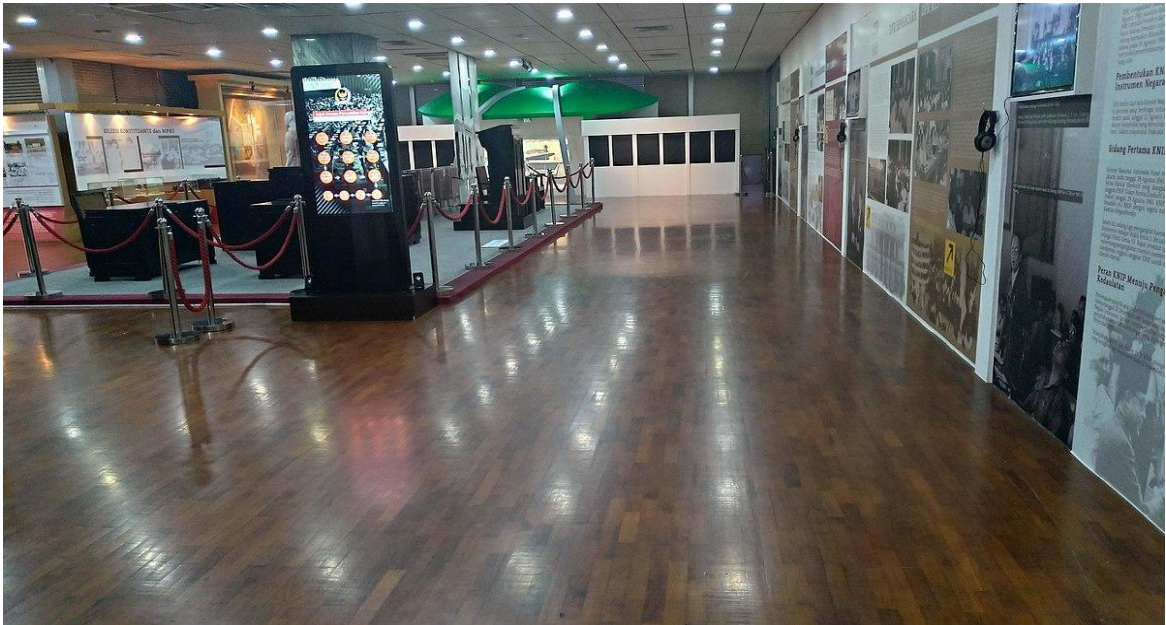
Selain kolaborasi DPS dengan agen travel, di masa pandemi Covid-19, DPS juga melakukan inovasi dengan menyediakan virtual tour yang dapat diakses secara publik melalui website <https://www.parliament.vic.gov.au/visit/virtual-tour/>. DPS menyediakan virtual tour dengan menggunakan teknologi Virtual Reality (VR) yang di bagi menjadi 4 bagian, yakni Virtual Tour Queen's Hall and Vestibule; Virtual Tour at Legislative Council Chamber; Virtual Tour at Legislative Assembly Chamber; dan Virtual Tour at the Library. Maka dengan disediakan 4 bagian tersebut, publik dapat merasakan seperti mengunjungi seluruh bagian Gedung Parlemen Victoria.



Gambar 3.16. Virtual Reality Gedung Parlemen Victoria

2. Apa yang terjadi di Indonesia

Diketahui bahwa saat ini Museum DPR RI berada di bawah Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, yang memiliki tugas pengelolaan museum terkait koleksi museum, menerima kunjungan publik dan mensosialisasikan museum DPR RI melalui kegiatan pameran baik di Gedung DPR RI dan luar kota. Museum DPR RI terletak di Gedung Nusantara lantai 2 yang berisikan barang-barang koleksi sejak jaman Volkstrad, KNIP, DPR masa DPRS, DPR masa Orde Baru, DPR masa Reformasi dan DPR masa kini.



Gambar 3.17. Museum DPR

Sejak Museum DPR RI berada di bawah Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, Museum DPR RI memiliki program unggulan penerimaan kunjungan edukasi. Program tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada publik tentang keparlemenan sejak masa lampau hingga masa kini. Penerimaan kunjungan di tahun 2024 sebanyak 21.000 orang. Peserta kunjungan tersebut sebagian besar berasal dari kalangan sekolah hingga universitas dan publik.



Gambar 3.18. Kunjungan edukasi

Selain program penerimaan kunjungan edukasi, Museum DPR RI kerap kali melakukan pameran sebagai bentuk sosialisasi terhadap sejarah keparlemenan di Indonesia. Pameran Museum DPR RI dilaksanakan sebanyak 2 kali selama setahun baik di Gedung DPR RI maupun di luar kota. Pameran Museum DPR RI dilakukan secara tematik, seperti DPR RI di masa KNIP di Malang, Kolaborasi dan Sinergi Museum DPR RI, dan tematik lainnya untuk menarik minat publik terhadap sejarah keparlemenan.



Gambar 3.19. Pameran Museum DPR RI

Sama halnya dengan DPS, Museum DPR RI juga menyediakan fasilitas virtual tour museum di masa Covid-19 melalui https://museum.dpr.go.id/tour/?fbclid=PAY2xjawG54DhleHRuA2FibQIxMQABpgorlbZ7xlrux5NLPIoCVf6bx-HwlBtZCnjHvmULyB3HiLqLHLE_xr0P5w_aem_Mg9wrBDOhhkH7TyTVLmKOQj. Tujuannya agar publik dapat melakukan kunjungan ke Museum DPR RI dimasa pandemi dan dapat dimanfaatkan setelahnya bagi publik yang belum mendapatkan kesempatan untuk kunjungan fisik ke Museum DPR RI.



Gambar 3.20. konten virtual tour museum

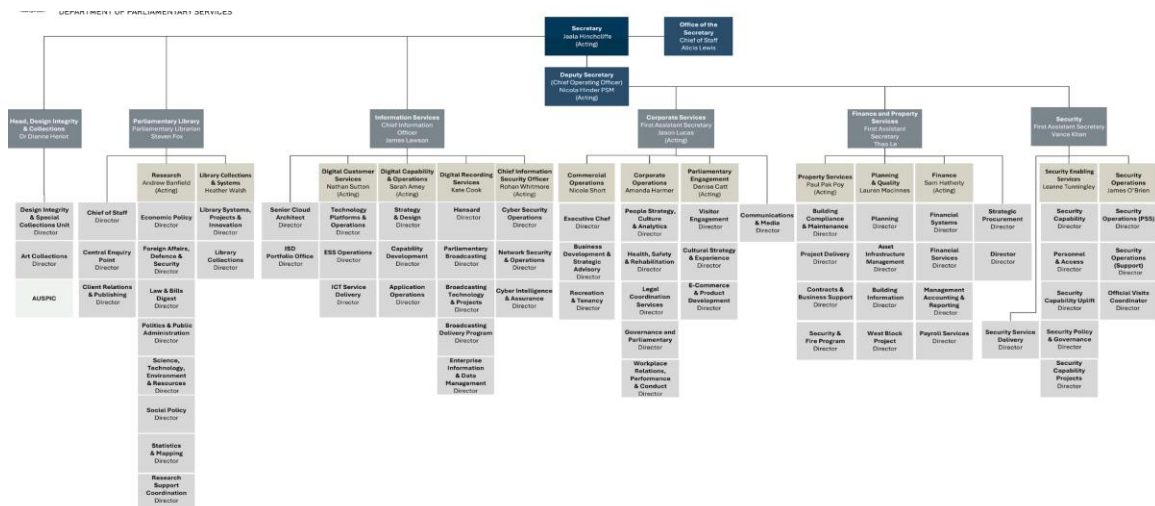
3. Best Practices

Berdasarkan hasil kunjungan ke Parlemen Victoria, terdapat beberapa hal yang dipelajari, yakni:

Koleksi Sejarah

Diketahui bahwa Gedung Parlemen Victoria merupakan bagian dari sejarah keparlemenan Australia sejak tahun 1850-an. Oleh karena itu, Museum Parlemen Victoria yakni terdiri dari Gedung Parlemen itu sendiri beserta dengan koleksi barang-barang di dalamnya. Jika melihat secara langsung, maka pengunjung dapat merasakan aura arsitektur dan koleksi barang yang sudah sangat lampau dan masih dirawat dengan sangat baik oleh DPS. Begitu halnya dengan DPR RI, dimana Komplek Gedung Nusantara saat ini merupakan bagian dari sejarah Gedung CONEF0 sejak tahun 1960-an, akan tetapi sebagian besar Gedung DPR RI saat ini sudah banyak pemugaran, yang secara tidak langsung telah menghilangkan nilai sejarah di dalamnya, walaupun saat ini Gedung Nusantara masih dipertahankan dan dirawat. Akan tetapi, sebagian besar koleksi barang sejarah disatukan pada area khusus sebagai Museum DPR RI.

Kompetensi SDM



Secara struktur organisasi untuk manajemen museum berada di bawah Departemen Perpustakaan yang memiliki tugas untuk pengelolaan koleksi Gedung Parlemen. Sedangkan untuk penerimaan kunjungan, DPS memiliki Departemen

Corporate Service yang memiliki tugas yakni: visitor engagement, cultural strategy & experience; dan e-commerce & product development. Maka untuk tugas pengelolaan koleksi dan pengelolaan manajemen edukasi, Parlemen Victoria memiliki SDM yang khusus. Dalam hal pengelolaan koleksi, Parlemen Victoria memiliki SDM yang khusus dibidang koleksi sejarah, sedangkan untuk manajemen edukasi publik, Parlemen Victoria juga memiliki SDM yang handal di bidang kehumasan.

Seperti halnya di DPR RI semenjak Museum DPR RI menjadi bagian dari Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, Museum DPR RI memiliki program kunjungan Edukasi Publik yang dikelola oleh SDM kehumasan. Sedangkan untuk pengelolaan Museum DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI telah memiliki SDM berupa pamong budaya, pengelola tata pameran dan design.

Sosialisasi dan Digitalisasi

Parlemen Victoria dan DPR RI memiliki kesamaan dalam hal produk sosialisasi untuk memperkenalkan koleksi kepada publik yang bertujuan untuk edukasi, keterbukaan dan pelestarian sejarah bangsa. Akan tetapi, Parlemen Victoria memiliki kreativitas untuk membuka kesempatan publik yang lebih luas, yakni dengan melakukan kolaborasi dengan travel agen untuk mengundang wisatawan internasional. Oleh karena itu, produk-produk edukasi seperti halnya leaflet, caption koleksi, dan SDM nya dipersiapkan dalam berbagai bahasa internasional, seperti bahasa china, bahasa jerman, bahasa perancis dan bahasa inggris itu sendiri.

Selain itu dalam hal digitalisasi, adanya pandemi Covid-19 memaksa Parlemen Victoria dan DPR RI untuk memfasilitasi publik dengan menyediakan layanan virtual tour. Agar publik dapat merasakan dan mengetahui tentang keparlemenan di Victoria maupun di DPR RI dari jarak jauh dan dimana saja. Akan tetapi, Parlemen Victoria memberikan layanan tambahan dengan Virtual Reality (VR). Dengan adanya tambahan VR tersebut, publik lebih merasakan berkunjung ke Parlemen Victoria seperti halnya kunjungan fisik. Selain itu, karena koleksi sejarah Parlemen Victoria adalah Gedung beserta isinya, maka Parlemen Victoria menyediakan virtual tour untuk seluruh area gedung secara detail. Sedangkan di DPR RI, virtual tour museum masih terbatas berada di ruang museum itu sendiri, belum mencakup seluruh kompleks Gedung Nusantara yang juga bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

4. Usulan rekomendasi

Berdasarkan dari hasil kunjungan ke Parlemen Victoria, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa dilaksanakan di DPR RI sebagai hasil dari lesson learn kunjungan short course tersebut, yakni:

- Menjadikan Komplek Gedung Nusantara sebagai bagian dari Museum DPR RI, seperti halnya Gedung Parlemen Victoria adalah bagian dari koleksi bersejarah;
- Peningkatan SDM dalam hal pengelolaan museum. Dimana saat ini Museum DPR RI hanya memiliki 2 (dua) orang pamong budaya, 1 (satu) orang edukator dan 1 (satu) orang pengelola tata pameran. Untuk meningkatkan kualitas Museum DPR RI, maka sebaiknya SDM dapat ditambahkan personil dan ditingkatkan kompetensinya;

- Saat ini kunjungan edukasi publik masih terbatas menerima kunjungan dari kalangan akademis (SD, SMP, SMA dan Universitas) dan publik dari konstituen anggota DPR RI. Alangkah baiknya jika mencontoh Parlemen Victoria bahwa Gedung Parlemen dijadikan tempat wisatawan baik lokal maupun internasional;
- Kerap kali Museum DPR RI dikunjungi oleh tamu parlemen dari luar negeri, akan tetapi baik SDM maupun tata pameran Museum DPR RI belum memfasilitasi bahasa asing. Maka dengan belajar dari Parlemen Victoria, Museum DPR RI sebaiknya juga memfasilitasi bahasa asing agar informasi yang diberikan bisa dinikmati kalangan internasional;
- Dalam hal digitalisasi, seperti halnya Parlemen Victoria, DPR RI memiliki koleksi berharga dalam sejarah bangsa, yakni Komplek Gedung DPR RI. Oleh karena itu, sebaiknya untuk memfasilitasi publik yang tidak dapat berkunjung ke DPR RI dapat diberikan fasilitas virtual tour seluruh komplek Gedung DPR RI.

H. PERPUSTAKAAN

1. Perpustakaan Parlemen di Australia & Victoria

Pada short course yang diikuti, substansi terkait Parliamentary Library of Australia dan Parliamentary Library of Victoria tidak dibahas langsung di kelas. Namun, pada kunjungan ke Parliament of Victoria pada hari ke-4, Kamis, 28 November, terdapat kesempatan bertemu dengan Carolyn Macvean (Manager, Parliamentary Library & Information Service) bersama Dr. Ali Reza Yunespour. Pembahasan mengenai fungsi perpustakaan ini berlangsung secara informal selama sesi questioning di Parlemen, serta dilanjutkan melalui diskusi email dan pembelajaran di kelas.

Pembahasan Utama:

- Parliamentary Library of Australia didirikan pada 1901, menyediakan layanan penelitian, informasi, dan dukungan legislatif untuk anggota Parlemen dan staf mereka.
- Parliamentary Library of Victoria menawarkan layanan serupa di tingkat negara bagian, fokus pada mendukung fungsi legislatif dan akuntabilitas pemerintah.

Poin Penting:

1. Fungsi Utama: Penelitian, analisis, dan penyediaan sumber daya informasi.
2. Keterlibatan dengan Hansard: Mendukung dengan analisis yang relevan.
3. Integrasi dengan Fungsi Parlemen: Kolaborasi erat dengan departemen lain seperti arsip dan administrasi.
4. Struktur dan Kepemimpinan: Kepala perpustakaan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di lingkungan parlemen.

2. Kondisi Perpustakaan DPR RI

Perpustakaan DPR RI telah bertransformasi menjadi ruang yang menarik dan nyaman sejak 2019, dengan koleksi lebih dari 35.000 buku, laporan, risalah rapat UU, jurnal, e-book, dan database. Fasilitas dirancang untuk mendukung kebutuhan:

- Ruang baca dan diskusi: Untuk anggota DPR, staf, dan masyarakat umum.

- Kegiatan literasi informasi dan sosialisasi: Membantu meningkatkan pemahaman tentang legislasi.
- Namun, potensi pengembangan masih terbuka, termasuk:
 - Memperkuat layanan penelitian berbasis bukti untuk anggota DPR.
 - Menjadikan perpustakaan sebagai pusat inklusi informasi untuk masyarakat.

3. Best Practices

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari Parliamentary Library of Australia dan Victoria:

1. Struktur dan Spesialisasi: Memiliki staf dengan spesialisasi subjek sesuai kebutuhan komisi.
2. Program Magang: Mahasiswa jurusan sosial-politik dapat dilibatkan dalam penelitian konkret untuk mendukung legislasi.
3. Integrasi Layanan Informasi: Melibatkan arsip, risalah, IT, dan media sosial untuk meningkatkan aksesibilitas informasi legislatif.
4. Big Data & AI: Mengembangkan data warehouse dan chatbot untuk mendukung layanan referensi.
5. Konsep GLAM: Mengintegrasikan perpustakaan dengan galeri, arsip, dan museum untuk menciptakan layanan yang menarik dan relevan.

4. Usulan Rekomendasi

1. Penguatan Layanan Riset: Menambah staf spesialis untuk mendukung kebutuhan penelitian legislatif.
2. Kolaborasi Universitas: Membuka program magang yang melibatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan mendukung legislasi.
3. Transformasi Digital: Mengembangkan big data berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi layanan informasi.
4. Peningkatan Fasilitas: Membuat ruang yang lebih interaktif dan mendukung diskusi produktif.
5. Inklusi Sosial: Memastikan perpustakaan DPR RI dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan untuk mendukung literasi legislatif.

PENUTUP

Executive Training Program On “Parliamentary Government: Toward A Modern And Dynamic Parliament In Indonesia” At The University Of Melbourne Australia merupakan inisiatif dari Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan *The University Of Melbourne Australia* yang dirancang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat menjadi referensi bagi para pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI maupun masyarakat Indonesia terkait penerapan sistem keparlemenan dan sistem demokrasi di negara lain.

Sebagai penutup, buku ini hadir dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pembaruan pada *supporting system* di DPR RI. Proses transformasi menuju parlemen yang lebih modern dan dinamis membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun masyarakat.

Hasil dari pembelajaran dan wawasan yang diperoleh melalui buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya reformasi dan peningkatan kapasitas *supporting system* lembaga legislatif di Indonesia. Semoga seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, demi tercapainya cita-cita bangsa yang lebih sejahtera dan maju.

Akhirnya, kami menyadari bahwa pembaruan sistem pemerintahan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih baik, melalui parlemen yang lebih kuat, dinamis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.



**PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM LEGISLATIF
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Gedung Sekretariat Jenderal Lantai 4 Ruang 411
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Follow us :



@pusbangkom.dprri



@pusbangkom.dprri



<https://pusbangkom.dpr.go.id/>